SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Muhammad Baqir Aminatullah**

   Alamat : Dusun Tengraca RT.001/RW.001, Desa Plaktak, Kecamatan Pagantenan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur

2. Nama : **Taufadi**

   Alamat : Jl. Lawangan Daya RT.009/RW.004, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur

   Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Desember 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Zaini, S.H., M.H., dan Abd. Kholis, S.H., M.H., kesemuanya para advokat/pengacara pada kantor hukum **Erfandi & Partner**, berlamat di Jalan Basuki Pulau Harapan RT.07/RW.06, Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon**;

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan**, beralamat di Jalan Brawijaya Indah Nomor 34 Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/PY.02.1-SU/3528/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Zana Zerlina, S.H., Azka Rivaldi, S.H., Ismi Rahma Putri, S.H., Tasya Anisa, S.H., M.H., dan Naufal Hilmi Ikhsan, kesemuanya para Advokat, Konsultan Hukum & Asisten Advokat pada **Law Office Saleh & Partners** beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Termohon**;

II. 1. Nama : **KH. Kholilurrahman**
Alamat : Dusun Taman, RT.001/RW.002, Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur

2. Nama : **Sukriyanto**
Alamat : Dusun Onggaan Timur, RT.000/RW.000, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur

Pasangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-KHARISMA/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Sri Sugeng Pujiatmiko, S.H., Sapto Wahyono, S.H., M.Hum., Wahyudi, S.H., Ach. Dlofirul Anam, S.H.I., M.H., Ach. Suhairi, S.H., Ainor Ridha, S.H., Achmad Taufik, S.H., M.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D., S.H., M.Hum., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., dan Ucok Edison Marpaung, S.H., semuanya adalah advokat yang tergabung dalam **"Advokat Kharisma-Kholilurrahman-Sukriyanto"** beralamat di Perumahan Bonorogo Regency, Jalan Bonorogo Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan ahli Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, saksi Termohon dan saksi Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 20.53 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 185/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 23.10 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, **"***Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi***".**

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor: 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024. **(Bukti P-1);**
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam hal ini KPU Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor: 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 06 Desember 2024, Pukul 00.34 WIB. **(Vide Bukti P-1);**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor: 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, pada hari Senin, 9 Desember 2024;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK nomor 3 Tahun 2024 intinya menyatakan bahwa: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten tersebut;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 842 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 September Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024. **(Bukti P-2)**;
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor: 843 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak dengan Nomor Urut 3. - **(Bukti P-3);**
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU nomor 10 Tahun 2016 Jo. UU nomor 6 Tahun 2020 untuk selanjutnya disebut UU Pilkada, Peserta Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
   Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan dengan jumlah penduduk **889.798** jiiwa Juni Tahun 2024. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon/KPU Kabupaten Pamekasan adalah sebesar **572.293 suara,** sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh pasal 158 UU nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak in casu calon nomor urut 2 (dua) adalah paling banyak 1% x 572.293 suara (total suara sah) = **5.722,93 suara yang dibulatkan menjadi 5.723 Suara.**
7. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar **27.506 suara.**
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan terdapat cacat prosedur dan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang akan diuraikan lebih rinci dalam pokok permohonan, adapun pelanggaran yang dimaksud berupa:
   8.1. Disebabkan adanya cacat prosedur dan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Pamekasan melibatkan KPPS selaku penyelengara pemilu dilakukan secara berencana secara sitimatis dan

meluas secara massif dimana ada banyak TPS yang tingkat kehadiran sampai 100 persen, padahal ada pemilih yang tercantum di DPT telah meninggal dunia, peristiwa tersebut tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) desa 114 (seratus empat belas) TPS di Kabupaten Pamekasan,dibiarkan oleh KPPS sebagai penyelenggara ditingkat KPPS;

8.2. Pelanggaran berupa ketidaknetralan penyelenggara pemilihan serentak di Kabupaten Pamekasan tahun 2024 dilakukan oleh KPPS yang tersebar secara terstruktur 5 (lima) Kecamatan dari total 13 (tiga belas) Kecamatan di Kabupaten Pamekasan;

8.3. Pelanggaran berupa ketidaknetralan Kepala Desa;

8.4. Pelanggaran berupa Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali;

8.5. Pelanggaran Politik Uang/Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

8.6. Pelanggaran berupa Netralitas Penyelenggara Pemilu;

Pelanggaran secara sistematis sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh KPPS yang tersebar secara merata dan masif hampei terjadi diseluruh desa 5 Kecamatan dari total 13 (empat belas) Kecamatan Se-Kabupaten Pamekasan yang akan pemohon dalilkan secara jelas dan terperinci pada bagian pokok permohonan;

9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan **“ambang batas”** Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum

Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. Oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor: 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 06 Desember 2024,Pkl. 00.34 Wib.**(Vide Bukti P-1);**

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. Fattah Jasin, MS. - RP Ahmad Mujahid Ansori, Drs.	17.307
2.	Dr. KH. Kholilurrahman, SH. M.Si. - H. Sukriyanto	291.246
3.	**Muhammad Baqir Aminatullah - Taufadi, S.H.I. (Pemohon)**	**263.740**
Total Suara Sah		**572.293**

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **263.740** suara) - **(Bukti P-4)**;

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya cacat prosedur dan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Pamekasan melibatkan KPPS selaku penyelengara pemilu dilakukan secara berencana secara sitimatis dan meluas secara massif dimana ada banyak TPS yang tingkat kehadiran sampai 100 persen, padahal ada pemilih yang tercantum di DPT telah meninggal dunia, peristiwa tersebut tersebar di beberapa TPS di Kabupaten Pamekasan,dibiarkan oleh KPPS sebagai penyelenggara ditingkat TPS antara lain:

   A. PEMILIH YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA DAN TERDAFTAR DALAM DPT, NAMUN DIGUNAKAN OLEH OKNUM TERTENTU UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA.

   Dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Pamekasan, fakta yang terjadi banyak orang yang sudah meninggal dunia dan terdaftar di DPT, tapi digunakan oleh orang lain untuk mencoblos dalam pilkada kabupaten Pamekasan, kejadian ini terjadi di beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan sebagai berikut:

   a) KECAMATAN PEGANTENAN.

   1) Di TPS 4 Desa PASANGGAR, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 6 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	JUMAIDAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 207/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.

2.	LUKAT	Telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 380/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
3.	MAHRAJAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 385/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
4.	MANINTEN	Telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 339/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
5.	PARTO	Telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 339/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
6.	SLEMAN	Telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 309/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.

---------- **(Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12)**;

2) Di TPS 05 Desa PASANGGAR, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran hampir mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, yakni sesuai dengan dari DPT 598 yang hadir berjumlah 596 orang, Pemohon menemukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 6 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Ketarangan
1.	SIMAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 280/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.

2.	MUHLIS	Telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 121/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
3.	ARDIYAN	Telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 302/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
4.	SUKRAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 289/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
5.	BUNAYA	Telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 300/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.
6.	MOH. IRSYAD	Telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 338/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024.

-------- **(Bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-20);**

3) Di TPS 6 Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 11 orang dan menjadi TKI sebanyak 20 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	HADILI	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0213/432. 507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.

2.	BUNISA	Telah meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 029/432. 507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
3.	BUNA	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 028/432. 507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
4.	BUKASAH	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 026/432. 507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
5.	BULI	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 021/432. 507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
6.	A.SATTAR SULAM	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 021/432. 507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
7.	SAPRAEI	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0233/432. 507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
8.	SAPRAE	Telah meninggal duniaberdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0232/432. 507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
9.	SANTAWI	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0231/432. 507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
10.	ROFIAH	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0230/432. 507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
11.	MISNASAH	Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0223/432. 507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

12.	MOH. SAMSUL	Telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2024 berdasarkan Keterangan Saksi
13.	MISJATI	Telah meninggal dunia berdasarkan Keterangan Saksi.
14.	MINSIYAH	Telah meninggal dunia berdasarkan Keterangan Saksi.
15.	MOH. SUPARTO	Telah meninggal dunia berdasarkan saksi

---------- **(Bukti P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32 dan P-33);**

4) Di TPS 8 Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100 % (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 33 Pemilih, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	MISNADIN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0221/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
2.	MISTURAH	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0222/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
3.	MOH. MUHYIDIN	Berdasrkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0223/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
4.	MOH. SULI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0224/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
5.	PATLIYAH	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0225/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.

6.	PATNI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0226/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
7.	SAMIUDDIN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0227/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
8.	SARU	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0228/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
9.	SATUYA	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0229/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
10.	SIHAH	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0230/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
11.	SINAMI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0231/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
12.	SUNAMI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0232/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
13.	TALI	Bberdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0233/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
14.	ABD.HALIM	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 021/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
15.	ABDUSALAM	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 022/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
16.	ARTALI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 023/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
17.	BATIYA	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 024/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.

18.	BU SINAB	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 025/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
19.	BUSAR	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 026/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
20.	JUHARI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 027/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
21.	JUSUP	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 028/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
22.	KEMBAR	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 029/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
23.	LASTANI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0210/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
24.	LASTIN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0211/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
25.	LIMA	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0212/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
26.	MAAD	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0213/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
27.	MANIJA	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0214/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
28.	MARKATI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0215/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
29.	MARLANI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0216/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.

30.	MARTILEM	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0217/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
31.	MAT DIMIN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0218/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
32.	MAT HERI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0219/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
33.	MISJANTEN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0220/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.

---------- **(Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-68)**;

5) Di TPS 13 Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 3 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	MISNADIN	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0252/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.
2.	IMAM HAMBALI	Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0251/432.507.02/2024, tanggal 04 Desember 2024.

---------- **(Bukti P-69, P-70, P-71 dan P-72)**;

6) Di TPS 3 Desa TEBUL TIMUR, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 3 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	SAFRAJI	Telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2022, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Moh. Haris (Anak dari Almarhum Safraji).
2.	MIATI	Telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2022, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Annisatul Fitriyah (Anak dari Almarhumah Miati).
3.	NURHOLIS	Telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2022, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Adus Salam (Anak dari Almarhumah Nurholis).

---------- **(Bukti P-73, P-74, P-75, P-76 dan P-77)**;

7) Di TPS 2 Desa BULANGAN BARAT, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 5 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	TOMIN	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tanggal 07 Desember 2024, dari Kepala Desa Bulangan Barat.
2.	SANIRAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2024, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tanggal 07 Desember 2024, dari Kepala Desa Bulangan Barat.
3.	ATMANI	Telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2024, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tanggal 07 Desember 2024, dari Kepala Desa Bulangan Barat.

4.	ABD. BAKI	Telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tanggal 07 Desember 2024, dari Kepala Desa Bulangan Barat.
5.	SUKRI	Telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tanggal 07 Desember 2024, dari Kepala Desa Bulangan Barat.

---------- **(Bukti P-78, P-79, P-80, P-81, P-82, P-83 dan P-84)**;

8) Di TPS 1 Desa BULANGAN TIMUR, Kecamatan Pegantenan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 5 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	MOH. SAKI	Telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2024, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Moh. Sakki (Saudara/Ipar dari Almarhum Moh. Saki).
2.	MISJATI	Telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2024, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Iwan (Tetangga dari Almarhum Misjati).
3.	MULIHA	Telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Satoryo (Ponakan dari Muliha).
4.	NITO	Telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2023, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Anwar (Tetangga dari Almarhum Nito).

5.	MISTAR	Telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2023, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Iwan (Saudara dari Almarhum Mistar).

---------- **(Bukti P-85, P-86, P-89, P-90 dan P-91)**;

9) Di TPS 15 Desa TANJUNG, Kecamatan Pegantenan, berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon menemukan fakta bahwa jumlah Pemilih yang hadir di TPS adalah sebanyak 528 Orang dan Jumlah Pemilih dalam DPT adalah 530 orang, sedangkan yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 3 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	HOZAIMAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2023, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Abd. Salam (Adik Ipar dari Almarhumah Hozaimah).
2.	ISMAN	Telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2024, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Imam Nawawi (Cucu dari Almarhum Isman).
3.	MARSUKI	Telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Abd. Salam (Saudara dari Almarhum Marsuki).

---------- **(Bukti P-92, P-93, P-94, P-95 dan P-96)**;

b) KECAMATAN PROPPO

1) Di TPS 1 Desa Mapper, Kecamatan Roppo, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 2 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	FADILLAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Bahrul (Keluarga dari Almarhum Fadillah).
2.	MUZAMMIL HAMID	Telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2024, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Ach. Syafi'i (Kakak dari Almarhum Muzammil Hamid).

---------- **(Bukti P-97, P-98, P-99 dan P-100)**;

c) KECAMATAN PALENGGAAN

1) Di TPS 14 Desa BANYUPELLE, Kecamatan Palenggaan, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 1 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	ABDU MUNI	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Umar Faruq (Anak dari Almarhum Abdu Muni).

---------- **(Bukti P-101, P-102 dan P-103)**;

2) Bahwa selain TPS-TPS yang diuraikan diatas, terdapat TPS-TPS lain yang memiliki pelanggaran dan kecurangan adalah sebagai berikut:

2.1. Di TPS 1 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 1 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	SLAMET READY	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1/59/432.507.16/2022, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.

----------**(Bukti P-112, P-113 dan P-114)**;

2.2. Di TPS 4 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 2 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	FATIMUS ZAHRAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1/7/432.507.16/2022, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.
2.	SATUNA	Telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1/15/432.507.16/2022, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.

---------- **(Bukti P-115, P-116, P-117 dan P-118)**;

2.3. Di TPS 6 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu, tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 2 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

No.	Nama	Alamat
1.	ENNI KIRANA SUPRAPTI	Telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1/31/432.507.16/2022, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.
2.	JULI	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1/59/432.507.16/2022, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.

---------- **(Bukti P-119, P-120, P-121 dan P-122)**;

2.4. Di TPS 1 Desa LESONG LAOK, Kecamatan Batumarmar tingkat kehadiran 100%(seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon menemukan fakta di DPT yang sudah meninggal dan bepergian sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 1 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	RAMBESI	Telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/199/432.512.04/2024, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Lesong Laok.

---------- **(Bukti P-123, P-124 dan P-125)**;

2.5. Di TPS 3 Desa PATOAN LAOK, Kecamatan Palenggan tingkat kehadiran 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon menemukan fakta di DPT yang sudah meninggal dan bepergian sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 1 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	ACHMAD SUUDI	Telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Khoirunnisak Hidayati (sepupu Almarhum Achmad Suudi).
2.	RODIAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2020, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Mafis Qortubi (ponakan Almarhumah Rodiah)
3.	AMINOLLAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Abdurrohman (anak Almarhum Aminollah)
4.	SUBRI	Telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2019, berdasarkan dari Abd. Mutollib (anak Almarhum Achmad Suudi)

---------- **(Bukti P-126, P-127, P-128, P-130 dan P-131)**;

3. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS tersebut diatas, sebagian telah dilakukan keberatan oleh Saksi Pemohon pada saat pelaksanaan rekap di tingkat KPU Kabupaten Pamekasan berdasarkan Formulir Model D. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. **(Bukti P-104)**.

B. TERJADINYA PELANGGARAN *MONEY POLITIC* (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN OLEH CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2.

1. Bahwa dugaan Pelanggaran politik uang *(money politic)*, yang diduga dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan Tim Suksesnya yang membagikan amplop berisi uang dan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Peristiwa ini telah dilaporkan dan sudah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan dengan nomor register nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/16.28/X/2024;

2. Bahwa terhadap pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut diatas telah diputus oleh Bawaslu yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pamekasan menyatakan pelanggaran tersebut telah memenuhi syarat sebagai pelanggaran pidana Pemilu dan hingga saat ini sudah masuk dalam tahap penyidikan di Polres Pamekasan. **(Bukti P-105)**;

C. PELANGGARAN NETRALITAS OLEH KEPALA DESA

1. Bahwa terdapat beberapa kepala desa yang melanggar netralitas dengan secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang bahkan dilakukan sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan, ada beberapa Kepala Desa di Pantura mendukung Paslon No. urut 2 dan setelah penetapan pasangan calon diteukan juga kepala desa yang melanggar netralitas kepada desa **(Bukti P-106);**
2. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/PL/PB/KAB/XII/2024, tertanggal 03 Desember 2024 dan saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan di Bawaslu. Mohon kepada Mahkamah untuk meminta keterangan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan terkait dengan laporan tersebut **(Bukti P-107)**;
3. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan telah dilimpahkan kepada Bupati Pamekasan untuk diberikan sanski sesuai dengan regulasi yang berlaku.

D. Pelanggaran Berupa Pemilih yang Mencoblos Lebih dari Satu Kali

1. Bahwa KPPS membiarkan terjadinya pelanggaran adanya warga yang memakai masker dan melakukan pencobloasan di kotak suara lebih dari satu kali di TPS 4 Desa Tebul Timur. **(Bukti P-108)**;
2. Bahwa selain kejadian tersebut diatas, kejadian pencoblosan lebih dari satu kali juga terjadi di TPS 8 Desa Waru Timur, yang dilakukan oleh warga yang memakai kaos Paslon 02 **(Bukti P-109)**;

3. Bahwa kejadian serupa pencoblosan lebih dari satu kali terjadi di TPS 5 Desa Panaan, yang dilakukan oleh seorang warga yang mencoblos Paslon 02 di kotak suara lebih dari satu kali sambil mengatakan “bukti nyata”. **(Bukti P-110)**;
4. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 7 Desa Blaban, berupa adanya warga yang mengambil surat undangan pencoblosan dari warga lain untuk melakukan pencoblosan di TPS **(Bukti P-111)**;
5. Bahwa dengan banyaknya pelanggaran tersebut diatas maka perbuatan Termohon sudah jelas melanggar Pasal 112 ayat (2) yang menyatakan;

   (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

   a. Pembukaan Kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

   b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

   c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan;

   d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

   e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

E. Adanya Kejadian Nama Pemilih Yang Menggunakan Haknya Berdasarkan DPT, Ternyata Sudah Meninggal Dunia Sebelum Tanggal 27 November 2024.

1. Di TPS 1 Desa LESONG LAOK, Kecamatan Batumarmar pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model

C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 1 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	RAMBESI	Telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/199/432.512.04/2024, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Lesong Laok.

---------- **(Bukti P-112, P-113 dan P-114)**;

2. Di TPS 3 Desa PATOAN LAOK, Kecamatan Palenggan pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 4 (empat) orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	ACHMAD SUUDI	Telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Khoirunnisak Hidayati (sepupu Almarhum Achmad Suudi).
2.	RODIAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2020, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Nafis Qortubi (ponakan Almarhumah Rodiah)
3.	AMINOLLAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Abdurrohman.

4.	SUBRI	Telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Abd. Mutollib (anak Almarhum Subri)

---------- **(Bukti P-115, P-116, P-117, P-118, P-119 dan P-120)**;

3. Di TPS 2 Desa PATOAN LAOK, Kecamatan Palenggaan, pada hari pemungutan suara di TPS tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT yang sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 4 (empat) orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	BADRI	Telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Wahyudi (Ponakan dari Almarhum Badri)
2.	HADALI	Telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Mohammad bakiruddin (anak dari Almarhum Hadali)
3.	JUANA	Telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Abdul Mukti (Ponakan dari Almarhum Juana)
4.	SAKWI	Telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Moh. Firdaus (cucu dari Almarhum Sakwi).

---------- **(Bukti P-121, P-122, P-123, P-124, P-125 dan P-126)**;

4. Di TPS 4 Desa PATOAN LAOK, Kecamatan Palenggaan, pada hari pemungutan suara di TPS tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model

C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT yang sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 1 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	MUYANI	Telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari Khotibul Umam (Ponakan dari Almarhumah Muyani)

---------- **(Bukti P-127, P-128 dan P-129)**;

5. Di TPS 1 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 1 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	SLAMET READY	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1/59/432.507.16/2022, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.

---------- **(Bukti P-130, P-131 dan P-132)**;

6. Di TPS 4 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 2 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	FATIMUS ZAHRAH	Telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1/7/432.507.16/2024, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.
2.	SATUNA	Telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1/15/432.507.16/2024, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.

---------- **(Bukti P-133, P-134, P-135 dan P-136)**;

7. Di TPS 6 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 2 orang sebagimana disebutkan sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat
1.	ENNI KIRANA SUPRAPTI	Telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1/31/432.507.16 /2024, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.
2.	JULI	Telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1/59/432.507.16 /2024, tanggal 04 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dasok.

---------- **(Bukti P-137, P-138, P-139 dan P-140)**;

8. Di TPS 010 Desa Banyupelle, Kecamatan Palenggaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar

dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-141 dan P-142)**;

9. Di TPS 011 Desa Banyupelle, Kecamatan Palenggaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah dunia meninggal sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-143 dan P-144)**;
10. Di TPS 004 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenggaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-145 dan P-146)**;
11. Di TPS 007 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenggaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-147 dan P-148)**;
12. Di TPS 002 Desa Panaan, Kecamatan Palenggaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-149 dan P-150)**;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

13. Di TPS 003 Desa Panaan, Kecamatan Palenggaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-151 dan P-152)**;
14. Di TPS 001 Desa Patoan Laok, Kecamatan Palenggaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-153 dan P-154)**;
15. Di TPS 001 Desa Campor, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-155 dan P-156)**;
16. Di TPS 003 Desa Campor, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-157 dan P-158)**;
17. Di TPS 006 Desa Campor, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-159 dan P-160)**;

18. Di TPS 007 Desa Campor, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-161 dan P-162)**;
19. Di TPS 002 Desa Mapper, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-163 dan P-164)**;
20. Di TPS 003 Desa Mapper, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-165 dan P-166)**;
21. Di TPS 004 Desa Mapper, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-167 dan P-168)**;
22. Di TPS 001 Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-169 dan P-170)**;

23. Di TPS 005 Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-171 dan P-172)**;
24. Di TPS 003 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-173 dan P-174)**;
25. Di TPS 004 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-175 dan P-176)**;
26. Di TPS 006 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-177 dan P-178)**;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

27. Di TPS 002 Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-179 dan P-180)**;
28. Di TPS 006 Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-181 dan P-182)**;
29. Di TPS 001 Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-183 dan P-184)**;
30. Di TPS 001 Desa Sopa'ah, Kecamatan Pademawu, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-185 dan P-186)**;
31. Di TPS 002 Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-187 dan P-188)**;

32. Di TPS 002 Desa Sana Tengah, Kecamatan Pademawu, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-189 dan P-190)**;
33. Di TPS 001 Desa Bangreseh, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-191)**;
34. Di TPS 001 Desa Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-192)**;
35. Di TPS 010 Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-193)**;
36. Di TPS 004 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model

C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-194)**;

37. Di TPS 005 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-195)**;
38. Di TPS 006 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-196)**;
39. Di TPS 007 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-197)**;
40. Di TPS 009 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-198)**;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

41. Di TPS 001 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-199)**;
42. Di TPS 002 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-200)**;
43. Di TPS 004 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-201)**;
44. Di TPS 005 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-202)**;
45. Di TPS 006 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-203)**;

46. Di TPS 007 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-204)**;
47. Di TPS 009 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-205)**;
48. Di TPS 002 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-206)**;
49. Di TPS 003 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-207)**;
50. Di TPS 002 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model

C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-208)**;

51. Di TPS 004 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-209)**;
52. Di TPS 005 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-210)**;
53. Di TPS 006 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-211)**;
54. Di TPS 007 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-212)**;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

55. Di TPS 009 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-213)**;
56. Di TPS 010 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-214)**;
57. Di TPS 011 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-215)**;
58. Di TPS 012 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-216)**;
59. Di TPS 013 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-217)**;

60. Di TPS 014 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-218)**;
61. Di TPS 002 Desa Campor, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-219)**;
62. Di TPS 004 Desa Campor, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-220)**;
63. Di TPS 005 Desa Campor, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-221)**;
64. Di TPS 008 Desa Campor, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-222)**;

65. Di TPS 011 Desa Campor, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-223)**;
66. Di TPS 004 Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-224)**;
67. Di TPS 008 Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-225)**;
68. Di TPS 001 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-226)**;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

69. Di TPS 008 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-227)**
70. Di TPS 012 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-228)**;
71. Di TPS 013 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-229)**;
72. Di TPS 014 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-230)**;
73. Di TPS 001 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-231)**;

74. Di TPS 003 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-232)**;
75. Di TPS 005 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-233)**;
76. Di TPS 006 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-234)**;
77. Di TPS 009 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-235)**;
78. Di TPS 013 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-236)**;

79. Di TPS 004 Desa Totoan Laok, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-237)**;
80. Di TPS 002 Desa Totoan Laok, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-238)**;
81. Di TPS 003 Desa Totoan Laok, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-239)**;
82. Di TPS 001 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-240)**;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

83. Di TPS 005 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-241)**;
84. Di TPS 006 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-242)**;
85. Di TPS 008 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-243)**;
86. Di TPS 003 Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-244)**;
87. Di TPS 018 Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-245)**;

88. Di TPS 001 Desa Mapper, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-246)**;
89. Di TPS 004 Desa Rangperang Daya, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-247)**;
90. Di TPS 005 Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, pada hari pemungutan suara di TPS, tingkat kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, akan tetapi Pemohon menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. **(Bukti P-248)**;

F. Adanya Pelanggaran Berupa Intimidasi dan Pengusiran terhadap Saksi paslon nomor Urut 3 yang di lakukan oleh Panitia

1. Bahwa terdapat fakta dalam pemilihan calon Bupati Pamekasan terjadinya intimidasi dan pengusiran oleh panitia kepada saksi untuk menandatangani C1 yang terjadi di beberapa TPS.
2. Bahwa akibat dari adanya intimidasi tersebut, saksi dari pasangan calon nomor urut 3 merasa tertekan, sebagaimana yang terjadi di TPS sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

No	Nama	TPS	Desa
1	Sufyan Assauri	01	Bangsereh
2	Syafiuddin	09	Bujur Barat
3	Achmad Wesilurrahman	05	Bujur Tengah
4	M. Sholahudin Al Ayyubi	06	Bujur Tengah
5	Rudi	07	Bujur Tengah
6	Ach Syamsul	10	Bujur Tengah
7	Abdul Kadir	04	Bujur Tengah
8	Mulyadi	06	Dasok
9	Moh Nurhamidi	04	Dasok
10	Sitti Aisyah	07	Larangan Badung
11	Herry Purnomo	04	Larangan Badung
12	Holili	02	Potoan Laok
13	Amirosi Sakari	01	Potoan laok
14	Fathor Rosi	03	Sana Tengah
15	Harupi	07	Plakpak
16	Muh Rofii	01	Bulengan Baranta
17	Sapandi	01	Bulengan Timur
18	Subaidi	06	Palesanggar
19	Abd Karim	08	Palesanggar
20	Hosnan	06	Pasanggar
21	Muslim	04	Pasanggar
22	Abd Azis	09	Pasanggar
23	Moh Hasan	07	Pasanggar
24	Fausen	07	Campor
25	Ainul Kori	06	Campor
26	Kurdi	03	Campor
27	Subeidi	01	Campor
28	Faisal	03	Jamberingin
29	Mustain	02	Kramat
30	Ilham wahyudi	01	Sopaah
31	Abdussalam	01	Prekbun
32	Moh Fajarul Maulidi	06	Panglegur
33	Ach Samian	17	Plakpak

---------- **(Bukti Bukti P-249 sampai dengan P-281)**;

3. Bahwa selain dari adanya intimidasi, Saksi Paslon nomor 3 tidak diberitahukan adanya orang yang telah meninggal sehingga para saksi menandatangani C.Hasil Salinan-KWK-Bupati.

G. PEMILIH YANG SUDAH MERANTAU DAN BEKERJA KE LUAR NEGERI YANG TERDAFTAR DALAM DPT, NAMUN DIGUNAKAN OLEH OKNUM TERTENTU UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA.

1. Bahwa banyaknya pelanggaran oleh KPPS atau Termohon KPID Pamekasan, modusnya juga terjadi dengan cara mencoblos pasangan nomor urut 2 padahal orangnya sedang merantau;
2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Pamekasan, fakta yang terjadi banyak orang yang sudah merantau atau kerja ke luar negeri digunakan oleh orang lain untuk mencoblos dalam pilkada kabupaten Pamekasan, kejadian ini terjadi di beberapa TPS yang tersebar sebagai berikut:

No	Nama	Desa	
1	Amrosiy	Bujur Timur	Batu Mar-mar
2	Nasukdin	Bujur Timur	Batu Mar-mar
3	Ismail	Bujur Timur	Batu Mar-mar
4	Bersawi	Bujur Timur	Batu Mar-mar

---------- (Bukti P-282, P-283, P-284 dan P-285);

H. PEMILIH YANG SUDAH MERANTAU DAN BEKERJA KE LUAR NEGERI YANG TERDAFTAR DALAM DPT, NAMUN DIGUNAKAN OLEH OKNUM TERTENTU UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA.

Bahwa kehadiran pemilih 100% padahal di Daftar hadir pemilih tetap ada yang tidak tanda tangan antara lain

1. TPS 3 Tebul Timur
2. TPS 1 Desa Dasok
3. TPS 1 Desa Bulanagan Timur
4. TPS 2 Desa Bulangan Berenta
5. TPS 3 Desa Pasean
6. TPS 2 Sanah Tengah
7. TPS 08 Palesangger
8. TPS 09 Pasangger

9. TPS 6 Palesangger
10. TPS 2 Desa Kramat
11. TPS 1 Dasok
12. TPS 1 Sopaah
13. TPS 2 Sana Tengah
14. TPS 9 Blaban
15. TPS 5 Blaban
16. TPS 7 Blaban
17. TPS 3 Blaban
18. TPS 10 Bujur Tengah
19. TPS 6 Bujur Tengah
20. TPS 4 Blaban
21. TPS 12 Bujur Tengah
22. TPS 8 Blaban
23. TPS 3 Blaban
24. TPS 2 Blaban
25. TPS 3 Bujur Barat
26. TPS 3 Sana Tengah
27. TPS 1 Bujur Barat
28. TPS 7 Bujur Barat

Bahwa kehadiran pemilih 100% padahal di Daftar hadir Dimana tanda tangannya diduga dilakukan oleh satu orang karena tanda tangannya sama semua antara lain

29. TPS 1 Desa Dasok Kec Pademawu
30. TPS 6 Desa Dasok
31. TPS 2 Desa Sanah Tengah
32. TPS 08 Desa Palesangger
33. TPS 6 Desa Palesangger
34. TPS 10 Desa Bujur Tengah
35. TPS 17 Desa Plakpak
36. TPS 01 Desa Lesong dejeh (dicentang)
37. TPS 1 Desa Lesong laok
38. TPS 04 Desa Lesong Laok

39. TPS 1 Desa Sopaah
40. TPS 2 Desa Sana Tengah
41. TPS 9 Desa Blaban
42. TPS 5 Desa Blaban
43. TPS 2 Desa Blaban
44. TPS 1 Desa Blaban
45. TPS 7 Desa Blaban
46. TPS 3 Desa Blaban
47. TPS 10 Desa Bujur Tengah
48. TPS 12 Desa Bujur Tengah
49. TPS 4 Desa Blaban
50. TPS 8 Desa Blaban
51. TPS 5 Desa Blaban
52. TPS 3 Desa Blaban
53. TPS 2 Desa Blaban
54. TPS 6 Desa Blaban
55. TPS 1 Desa Blaban
56. TPS 7 Desa Bujur Tengah
57. TPS 5 Desa Bujur Tengah
58. TPS 9 Desa Bujur Tengah (dicontreng)
59. TPS 9 Desa Bujur Barat
60. TPS 3 Desa Bujur Barat
61. TPS 2 Desa Bujur Barat
62. TPS 5 Desa Bujur Barat
63. TPS 8 Desa Bujur Tengah
64. TPS 13 Desa Palasangger
65. TPS 12 Desa Batu Bintang
66. TPS 14 Desa Bujur Tengah
67. TPS 8 Desa Bujur Barat
68. TPS 3 Desa Sana Tengah
69. TPS 1 Desa Bujur Barat
70. TPS 1 Desa Batu Bintang
71. TPS 7 Desa Bujur Barat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Bahwa Kehadiran melebihi jumlah DPT dan ada yang tidak hadir

72. TPS 1 Desa Plekbun
73. TPS 1 Desa Lesong laok
74. TPS 6 Desa Dasok

Bahwa Kehadiran 100% DPT dan tidak ada yang tanda tangan daftar hadir tidak di tanda tangani

75. TPS 11 Desa Bujur Tengah Batu Marmar
76. TPS 6 Desa Bujur Tengah

----------**(Bukti 286 sampai dengan P-335)**;

Berdasarkan dalil-dalil pelanggaran yang diuraikan diatas, maka Pemohon minta dilakukan Pilkada Ulang di Kabupaten Pemekasan atau Pemenang Pertama yaitu pasangan nomor Urut 2 didiskualifikasi atau dilakukan PSU sepanjang mengenai TPS-TPS yang didalilkan dalam posita dan petitum permohonan Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, secara kasuistik dibuktikan dan diputusakan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, yang dimumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemekasan untuk Pemilukada ulang di Kabupaten Pemekasan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, secara kasuistik dibuktikan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, yang dimumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan;
5. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini;

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, secara kasuistik dibuktikan dan diputuskan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, yang dimumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 Kecamatan sepanjang di TPS-TPS yang disebutkan dan dilakukan supervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan dibawah ini sebagai berikut:
    1) Di Kecamatan Pegantenan antara lain:
        a. TPS 04, TPS 05, Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan;
        b. TPS 06, TPS 08 dan TPS 013 Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan;

c. TPS 03 Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan;
d. TPS 02, Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan;
e. TPS 01 Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan;
f. 15 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan;

2) Di Kecamatan Proppo antara lain:
a. TPS 01, Desa Mapper, Kecamatan Proppo;

3) Di Kecamatan Palengaan antara lain:
a. TPS 14 Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan;

4) TPS 6 Desa Pasanggar Kecamatan Palenggaan;
5) TPS 1 Desa LESONG LAOK, Kecamatan Batumarmar,
6) TPS 3 Desa PATOAN LAOK, Kecamatan Palenggan,
7) TPS 2 Desa PATOAN LAOK, Kecamatan Palenggaan,
8) TPS 4 Desa PATOAN LAOK, Kecamatan Palenggaan,
9) TPS 1 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu,
10) TPS 4 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu,
11) TPS 6 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu,
12) TPS 010 Desa Banyupelle, Kecamatan Palenggaan,
13) TPS 011 Desa Banyupelle, Kecamatan Palenggaan,
14) TPS 004 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenggaan,
15) TPS 007 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenggaan,
16) TPS 002 Desa Panaan, Kecamatan Palenggaan,
17) TPS 003 Desa Panaan, Kecamatan Palenggaan,
18) TPS 001 Desa Patoan Laok, Kecamatan Palenggaan,
19) TPS 001 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
20) TPS 003 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
21) TPS 006 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
22) TPS 007 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
23) TPS 002 Desa Mapper, Kecamatan Proppo,
24) TPS 003 Desa Mapper, Kecamatan Proppo,
25) TPS 004 Desa Mapper, Kecamatan Proppo,
26) TPS 001 Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo,
27) TPS 005 Desa Panaguan, Kecamatan Proppo,
28) TPS 003 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan,

29) TPS 004 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan,
30) TPS 006 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan,
31) TPS 002 Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan,
32) TPS 006 Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan,
33) TPS 001 Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu,
34) TPS 001 Desa Sopa'ah, Kecamatan Pademawu,
35) TPS 002 Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu,
36) TPS 002 Desa Sana Tengah, Kecamatan Pademawu,
37) TPS 001 Desa Bangreseh, Kecamatan Batumarmar,
38) TPS 001 Desa Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar,
39) TPS 010 Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar,
40) TPS 004 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar,
41) TPS 005 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar,
42) TPS 006 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar,
43) TPS 007 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar,
44) TPS 009 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar,
45) TPS 001 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
46) TPS 002 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
47) TPS 004 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
48) TPS 005 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
49) TPS 006 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
50) TPS 007 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
51) TPS 009 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
52) TPS 002 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
53) TPS 003 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
54) TPS 002 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
55) TPS 004 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
56) TPS 005 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
57) TPS 006 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
58) TPS 007 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
59) TPS 009 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
60) TPS 010 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
61) TPS 011 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,

62) TPS 012 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
63) TPS 013 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
64) TPS 014 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
65) TPS 002 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
66) TPS 004 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
67) TPS 005 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
68) TPS 008 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
69) TPS 011 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
70) TPS 004 Desa Jambringin, Kecamatan Proppo,
71) TPS 008 Desa Jambringin, Kecamatan Proppo,
72) TPS 001 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan,
73) TPS 008 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan,
74) TPS 012 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan,
75) TPS 013 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan,
76) TPS 014 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan,
77) TPS 001 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan,
78) TPS 003 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan,
79) TPS 005 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan,
80) TPS 006 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan,
81) TPS 009 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan,
82) TPS 013 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan,
83) TPS 004 Desa Totoan Laok, Kecamatan Palengaan,
84) TPS 002 Desa Totoan Laok, Kecamatan Palengaan,
85) TPS 003 Desa Totoan Laok, Kecamatan Palengaan,
86) TPS 001 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan,
87) TPS 005 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan,
88) TPS 006 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan,
89) TPS 008 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan,
90) TPS 003 Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean,
91) TPS 018 Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan,
92) TPS 001 Desa Mapper, Kecamatan Proppo, dan
93) TPS 004 Desa Rangperang Daya, Kecamatan Proppo;
94) TPS 1 Desa Bulanagan Timur

95) TPS 2 Desa Bulangan Berenta
96) TPS 3 Desa Pasean
97) TPS 09 Pasangger
98) TPS 3 Blaban
99) TPS 8 Blaban
100) TPS 3 Bujur Barat
101) TPS 3 Sana Tengah
102) TPS 1 Bujur Barat
103) TPS 17 Desa Plakpak
104) TPS 01 Desa Lesong Dejeh
105) TPS 1 Desa Lesong laok
106) TPS 04 Desa Lesong Laok
107) TPS 2 Desa Sana Tengah
108) TPS 3 Desa Bujur Barat
109) TPS 8 Desa Bujur Tengah
110) TPS 12 Desa Batu Bintang
111) TPS 8 Desa Bujur Barat
112) TPS 3 Desa Sana Tengah
113) TPS 1 Desa Bujur Barat

5. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan melaksanakan putusan ini;

ATAU:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya **(ex aequo et bono).**

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti elektronik yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-335, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 842 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 September Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor: 843 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK Bupati/Walikota Kabupaten Pamekasan berupa Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 4, Desa Pasanggar, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 4, Desa Pasanggar, Kecamatan Pengantenan.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pasanggar Nomor: 207/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Jumaidah yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2024.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pasanggar Nomor: 380/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Lukat yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2022.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pasanggar Nomor: 385/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Mahrajah yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2022.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pasanggar Nomor: 339/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Maninten yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2021.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pasanggar Nomor: 339/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Parto yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2022.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pasanggar Nomor: 309/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Sleman yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2024.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 5, Desa Pasanggar, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 5, Desa Pasanggar, Kecamatan Pengantenan.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pasanggar Nomor: 302/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Ardiyan yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2021.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pasanggar Nomor: 300/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Bunaya yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2021.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pasanggar Nomor: 338/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Moh. Irsyad yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2023.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pasanggar Nomor: 121/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Muhlis yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pasanggar Nomor: 280/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Simah yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2023.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pasanggar Nomor: 289/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Sukrah yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2024.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 6, Desa Palesanggar, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 6, Desa Palesanggar, Kecamatan Pengantenan.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 021/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama A. Sattar Sulam yang telah meninggal dunia.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 026/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Bukasah yang telah meninggal dunia.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 027/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Bulu yang telah meninggal dunia.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 028/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Buna yang telah meninggal dunia.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 029/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Bunisa yang telah meninggal dunia.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 0213/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Hadili yang telah meninggal dunia.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 0223/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Misnasah yang telah meninggal dunia.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 0230/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Rofiah yang telah meninggal dunia.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 0231/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Santawi yang telah meninggal dunia.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 0232/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Saprae yang telah meninggal dunia.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 0233/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Sapraei yang telah meninggal dunia.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 8, Desa Palesanggar, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 8, Desa Palesanggar, Kecamatan Pengantenan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 021/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Abd. Halim yang telah meninggal dunia.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 022/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Abdusalam yang telah meninggal dunia.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 024/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Batiya yang telah meninggal dunia.
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 025/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Bu Sinab yang telah meninggal dunia.
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 0233/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Sapraei yang telah meninggal dunia.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 026/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Busar yang telah meninggal dunia.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 027/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Juhari yang telah meninggal dunia.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 028/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Jusup yang telah meninggal dunia.
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 029/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Kembar yang telah meninggal dunia.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 0210/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Lastani yang telah meninggal dunia.
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 0211/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Lastin yang telah meninggal dunia.
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 021/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Lima yang telah meninggal dunia.
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 0213/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Maad yang telah meninggal dunia.
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Palesanggar Nomor: 0214/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Manija yang telah meninggal dunia.
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0215/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Markati yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0216/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Marlani yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0217/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Martilem yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0218/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Matdimin yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0219/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Matheri yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0220/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Misjanten yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian , yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar Nomor: 0221/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Misnadin yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0222/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Misturah yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0223/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Moh. Muhyidin yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0224/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Moh. Suli yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0225/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Patliyah yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0226/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Patni yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0227/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Samiuddin yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0228/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Saru yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0229/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Satuya yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0230/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Sihah yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0231/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Sinami yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0232/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Sunami yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0233/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Tali yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 13, Desa Palesanggar, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

70. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 13, Desa Palesanggar, Kecamatan Pengantenan.
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0251/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Imam Hambali yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0252/12/432.507.12/2024, tanggal 5 Desember 2024 atas nama Misnadin yang telah meninggal dunia, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Palesanggar.
73. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 3, Desa Tebul Timur, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan.
74. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 3, Desa Tebul Timur, Kecamatan Pengantenan.
75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Miati telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2022, yang dibuat oleh Annisatul Fitriyah selaku anak dari Almarhumah Miati.
76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Nurholis telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2022, yang dibuat oleh Abdus Salam selaku anak dari Almarhum Nurholis.
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Safraji telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2022, yang dibuat oleh Moh. Haris selaku anak dari Almarhum Safraji.
78. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 2, Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

79. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 2, Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pengantenan.
80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian, tertanggal 07 Desember 2024 atas nama Abd. Baki telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021, yang terbitkan oleh Kepala Desa Bulangan Barat.
81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian, tertanggal 07 Desember 2024 atas nama Atmani telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2024, yang dibuat oleh Kepala Desa Bulangan Barat.
82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian, tertanggal 07 Desember 2024 atas nama Sanirah telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2024, yang dibuat oleh Kepala Desa Bulangan Barat.
83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian, tertanggal 07 Desember 2024 atas nama Sukri telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2021, yang dibuat oleh Kepala Desa Bulangan Barat.
84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian, tertanggal 07 Desember 2024 atas nama Tomin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2020, yang dibuat oleh Kepala Desa Bulangan Barat.
85. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 1, Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan.
86. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 1, Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pengantenan.
87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Moh. Saki telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2024, yang dibuat oleh Moh. Sakki selaku saudara/ipar dari Almarhum Moh. Saki.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Misjati telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2024, yang dibuat oleh Iwan selaku terangga dari Almarhum Misjati.
89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Mistar telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mai 2023, yang dibuat oleh Iwan selaku saudara dari Almarhum Mistar.
90. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Muliha telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023, yang dibuat oleh Satoryo selaku keponakan dari Almarhum Muliha.
91. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Nito telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2023, yang dibuat oleh Anwar selaku tetangga dari Almarhum Nito.
92. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 15, Desa Tanjung, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan.
93. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 15, Desa Tanjung, Kecamatan Pengantenan.
94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Hozaimah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2023, yang dibuat oleh Abd. Salam selaku adik ipar dari Almarhumah Hozaimah.
95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Isman telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2024, yang dibuat oleh Imam Nawawi selaku cucu dari Almarhum Isman.
96. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Marsuki telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024, yang dibuat oleh Abd. Salam selaku Saudara dari Almarhum Marsuki.
97. Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 1, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

98. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 1, Desa Mapper, Kecamatan Proppo.
99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Fadillah telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021, yang dibuat oleh Badrul selaku keluarga dari Almarhum Fadillah.
100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Muzammil Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2024, yang dibuat oleh Ach. Syafi'i selaku kakak dari Almarhum Muzammil Hamid.
101. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 14, Desa Banyupelle, Kecamatan Palenggan, Kabupaten Pamekasan.
102. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 14, Desa Banyupelle, Kecamatan Palenggan.
103. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Abdu Muni telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021, yang dibuat oleh Umar Faruq selaku anak dari Almarhum Abdu Muni.
104. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model D. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, yang diajukan oleh Saksi Pemohon pada saat Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Pamekasan.
105. Bukti P-105 : Print Out berita dari kabarmadura.id dengan judul "Bawaslu Pamekasan Terima 7 Laporan, Mulai Netralitas Kades hingga Politik Uang".
Link berita: https://kabarmadura.id/bawaslu-pamekasan-terima-7-laporan-dugaan-pelanggaran-pilkada-mulai-netralitas-kades-hingga-politik-uang/

106. Bukti P-106 : Print Out berita dari tvonenews.com dengan judul “Babak Baru, Kasus Money Politic Tim Cabup Bagi-bagi Amplop Isi Uang Masuk Tahap Penyidikan di Polres Pamekasan”.
Link berita: https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/267267-babak-baru-kasus-money-politic-tim-cabup-bagi-bagi-amplop-isi-uang-masuk-tahap-penyidikan-di-polres-pamekasan
107. Bukti P-107 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/PL/PB/KAB/XII/2024, tertanggal 03 Desember 2024
108. Bukti P-108 : Video warga yang memakai masker dan melakukan pencobloasan di kotak suara lebih dari satu kali di TPS 4 Desa Tebul Timur.
109. Bukti P-109 : Video warga yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali juga terjadi di TPS 8 Desa Waru Timur, yang dilakukan oleh warga yang memakai kaos Paslon 02
110. Bukti P-110 : Video seorang warga yang mencoblos Paslon 02 di kotak suara lebih dari satu kali sambil mengatakan “bukti nyata”, di TPS 5 Desa Panaan.
111. Bukti P-111 : Video warga yang mengambil surat undangan pencoblosan dari warga lain untuk melakukan pencoblosan di TPS 7 Desa Blaban.
112. Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01, Desa Lesong Laok, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
113. Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 01, Desa Lesong Laok, Kecamatan Batumarmar.
114. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Lesong Laok Nomor: 470/199/432.512.04/2024, tanggal 4 Desember 2024 atas nama Rambesi yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2021.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

115. Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 03, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
116. Bukti P-116 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 03, Desa Lesong Laok, Kecamatan Batumarmar.
117. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Achmad Suudi telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2019, yang dibuat oleh Khodirunnisak Hidayati selaku Sepupu dari Almarhum Achmad Suudi.
118. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Rodiah telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2020, yang dibuat oleh Nafis Qurtubi selaku Ponakan dari Almarhumah Rodiah.
119. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Aminollah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2019, yang dibuat oleh Abdurrohman.
120. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Achmad Suudi telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2018, yang dibuat oleh Abd. Mutollib selaku anak dari Almarhum Subri.
121. Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 02, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
122. Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 02, Desa Lesong Laok, Kecamatan Batumarmar.
123. Bukti P-123 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Bardi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2019, yang dibuat oleh Wahyudi selaku Ponakan dari Almarhum Bardi.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

124. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Hadali telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2019, yang dibuat oleh Wahyudi selaku anak dari Almarhum Hadali.
125. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Juana telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2021, yang dibuat oleh Abdul Mukti selaku Ponakan dari Almarhumah Juana.
126. Bukti P-126 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Sakwi telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2019, yang dibuat oleh Moh. Firdaus selaku cucu dari Almarhum Sakwi.
127. Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 04, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
128. Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 04, Desa Lesong Laok, Kecamatan Batumarmar.
129. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Muyani telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2019, yang dibuat oleh Wahyudi selaku Ponakan dari Almarhumah Muyani.
130. Bukti P-130 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.
131. Bukti P-131 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 01, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu.
132. Bukti P-132 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Dasok Nomor: 472.1/59/432.507.16/2022, tanggal 04 Desember 2024, yang menerangkan Slamet Riyadi telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2020.
133. Bukti P-133 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 04, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

134. Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 04, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu.
135. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Dasok Nomor: 472.1/7/432.507.16/2024, tanggal 04 Desember 2024, yang menerangkan Fatimus Zahra telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2023.
136. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Dasok Nomor: 472.1/15/432.507.16/2024, tanggal 04 Desember 2024, yang menerangkan Satuna telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2023.
137. Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 06, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.
138. Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 06, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu.
139. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Dasok Nomor: 472.1/31/432.507.16/2024, tanggal 04 Desember 2024, yang menerangkan Enni Kirana Sprati telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2022.
140. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Dasok Nomor: 472.1/59/432.507.16/2024, tanggal 04 Desember 2024, yang menerangkan Juli telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2020.
141. Bukti P-141 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 10, Desa Banyupelle, Kecamatan Palenggan, Kabupaten Pamekasan.
142. Bukti P-142 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 10, Desa Banyupelle, Kecamatan Palenggan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

143. Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 11, Desa Banyupelle, Kecamatan Palenggan, Kabupaten Pamekasan.
144. Bukti P-144 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 11, Desa Banyupelle, Kecamatan Palenggan.
145. Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 04, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenggan, Kabupaten Pamekasan.
146. Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 04, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenggan.
147. Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 07, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenggan, Kabupaten Pamekasan.
148. Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 07, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenggan.
149. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 02, Desa Panaan, Kecamatan Palenggan, Kabupaten Pamekasan.
150. Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 02, Desa Panaan, Kecamatan Palenggan.
151. Bukti P-151 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 03, Desa Panaan, Kecamatan Palenggan, Kabupaten Pamekasan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

152. Bukti P-152 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 03, Desa Panaan, Kecamatan Palenggan.
153. Bukti P-153 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01, Desa Patoan Laok, Kecamatan Palenggan, Kabupaten Pamekasan.
154. Bukti P-154 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 01, Desa Patoan Laok, Kecamatan Palenggan.
155. Bukti P-155 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
156. Bukti P-156 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 01, Desa Campor, Kecamatan Proppo.
157. Bukti P-157 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 03, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
158. Bukti P-158 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 03, Desa Campor, Kecamatan Proppo.
159. Bukti P-159 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 06, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
160. Bukti P-160 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 06, Desa Campor, Kecamatan Proppo.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

161. Bukti P-161 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 07, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
162. Bukti P-162 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 07, Desa Campor, Kecamatan Proppo.
163. Bukti P-163 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 02, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
164. Bukti P-164 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 02, Desa Mapper, Kecamatan Proppo.
165. Bukti P-165 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 03, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
166. Bukti P-166 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 03, Desa Mapper, Kecamatan Proppo.
167. Bukti P-167 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 04, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
168. Bukti P-168 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 04, Desa Mapper, Kecamatan Proppo.
169. Bukti P-169 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01, Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

170. Bukti P-170 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 01, Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo.
171. Bukti P-171 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 05, Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
172. Bukti P-172 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 05, Desa Panaguan, Kecamatan Proppo.
173. Bukti P-173 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 03, Desa Tanjung, Kecamatan Pagantenan, Kabupaten Pamekasan.
174. Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 03, Desa Tanjung, Kecamatan Pagantenan.
175. Bukti P-175 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 04, Desa Tanjung, Kecamatan Pagantenan, Kabupaten Pamekasan.
176. Bukti P-176 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 04, Desa Tanjung, Kecamatan Pagantenan.
177. Bukti P-177 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 06, Desa Tanjung, Kecamatan Pagantenan, Kabupaten Pamekasan.
178. Bukti P-178 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 06, Desa Tanjung, Kecamatan Pagantenan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

179. Bukti P-179 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 02, Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.
180. Bukti P-180 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 02, Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan.
181. Bukti P-181 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 06, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.
182. Bukti P-182 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 06, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan.
183. Bukti P-183 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01, Desa Prekbun, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.
184. Bukti P-184 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 01, Desa Prekbun, Kecamatan Tlanakan.
185. Bukti P-185 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01, Desa Sopa'ah, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.
186. Bukti P-186 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 01, Desa Sopa'ah, Kecamatan Pademawu.
187. Bukti P-187 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01, Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.
188. Bukti P-188 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 01, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pademawu.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

189. Bukti P-189 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan.
190. Bukti P-190 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, TPS 01, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean.
191. Bukti P-191 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01, Desa Bangreseh, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
192. Bukti P-192 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01, Desa Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
193. Bukti P-193 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 10, Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
194. Bukti P-194 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 04, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
195. Bukti P-195 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 05, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
196. Bukti P-196 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 06, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
197. Bukti P-197 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 07, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
198. Bukti P-198 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 09, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
199. Bukti P-199 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

200. Bukti P-200 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 02, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
201. Bukti P-201 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 04, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
202. Bukti P-202 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 05, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
203. Bukti P-203 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 06, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
204. Bukti P-204 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 07, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
205. Bukti P-205 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 09, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
206. Bukti P-206 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 02, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
207. Bukti P-207 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 03, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
208. Bukti P-208 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 02, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
209. Bukti P-209 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 04, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

210. Bukti P-210 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 05, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
211. Bukti P-211 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 06, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
212. Bukti P-212 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 07, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
213. Bukti P-213 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 09, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
214. Bukti P-214 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 10, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
215. Bukti P-215 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 11, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
216. Bukti P-216 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 12, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
217. Bukti P-217 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 13, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
218. Bukti P-218 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 14, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
219. Bukti P-219 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 02, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
220. Bukti P-220 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 04, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

221. Bukti P-221 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 05, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
222. Bukti P-222 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 08, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
223. Bukti P-223 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 11, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
224. Bukti P-224 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 04, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
225. Bukti P-225 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 08, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
226. Bukti P-226 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
227. Bukti P-227 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 08, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
228. Bukti P-228 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 12, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
229. Bukti P-229 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 13, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
230. Bukti P-230 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 14, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
231. Bukti P-231 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01, Desa Rombuh, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
232. Bukti P-232 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 03, Desa Rombuh, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

233. Bukti P-233 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 05, Desa Rombuh, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
234. Bukti P-234 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 06, Desa Rombuh, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
235. Bukti P-235 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 07, Desa Rombuh, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
236. Bukti P-236 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 13, Desa Banyupelleh, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
237. Bukti P-237 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 04, Desa Totoan Laok, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
238. Bukti P-238 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 02, Desa Totoan Laok, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
239. Bukti P-239 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 03, Desa Totoan Laok, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
240. Bukti P-240 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01, Desa Banyupelleh, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
241. Bukti P-241 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 05, Desa Banyupelleh, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
242. Bukti P-242 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 06, Desa Banyupelleh, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
243. Bukti P-243 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 08, Desa Banyupelleh, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

244. Bukti P-244 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 03, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan.
245. Bukti P-245 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 18, Desa Plakplak, Kecamatan Pangantenan, Kabupaten Pamekasan.
246. Bukti P-246 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
247. Bukti P-247 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 04, Desa Rangperang, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
248. Bukti P-248 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 05, Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
249. Bukti P-249 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Sufyan Assauri yang bertugas di TPS 01 Desa bangreseh mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
250. Bukti P-250 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Syafiuddin yang bertugas di TPS 09 Desa Bujur Barat mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
251. Bukti P-251 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Achmad Wesilurrahman yang bertugas di TPS 05 Desa Bujur Tengah mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
252. Bukti P-252 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama M. Sholahudin Al Ayubi yang bertugas di TPS 06 Desa Bujur Tengah mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
253. Bukti P-253 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Rudi yang bertugas di TPS 07 Desa Bujur Tengah mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

254. Bukti P-254 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Ach. Syamsul yang bertugas di TPS 10 Desa Bujur Tengah mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
255. Bukti P-255 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Abdul Kadir yang bertugas di TPS 04 Desa Bujur Tengah mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
256. Bukti P-256 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Mulyadi yang bertugas di TPS 06 Desa Dasok mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
257. Bukti P-257 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Moh. Nurhamidi yang bertugas di TPS 04 Desa Dasok mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
258. Bukti P-258 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Sitti Aisyah yang bertugas di TPS 07 Desa Larangan Badung mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
259. Bukti P-259 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Herry Purnomo yang bertugas di TPS 04 Desa Larangan Badung mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
260. Bukti P-260 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Holili yang bertugas di TPS 02 Desa Patoan Laok mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
261. Bukti P-261 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Amirosi Sakari yang bertugas di TPS 01 Desa Patoan Laok mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
262. Bukti P-262 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Fathur Rosi yang bertugas di TPS 03 Desa Sana Tangah mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

263. Bukti P-263 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Harupi yang bertugas di TPS 07 Desa Plakpak mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
264. Bukti P-264 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Muh. Rofii yang bertugas di TPS 01 Desa Bulengan Baranta mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
265. Bukti P-265 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Sapandi yang bertugas di TPS 01 Desa Bulengan Timur mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
266. Bukti P-266 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Subaidi yang bertugas di TPS 06 Desa Palesanggar mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
267. Bukti P-267 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Abd. Karim yang bertugas di TPS 08 Desa Palesanggar mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
268. Bukti P-268 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Hosnan yang bertugas di TPS 06 Desa Pasanggar mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
269. Bukti P-269 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Muslim yang bertugas di TPS 04 Desa Pasanggar mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
270. Bukti P-270 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Abd. Azis yang bertugas di TPS 09 Desa Pasanggar mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
271. Bukti P-271 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Abd. Azis yang bertugas di TPS 07 Desa Pasanggar mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

272. Bukti P-272 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Fausen yang bertugas di TPS 07 Desa Campor mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
273. Bukti P-273 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Ainul Kori yang bertugas di TPS 06 Desa Campor mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
274. Bukti P-274 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Kurdi yang bertugas di TPS 03 Desa Campor mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
275. Bukti P-275 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Subeidi yang bertugas di TPS 01 Desa Campor mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
276. Bukti P-276 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Faisal yang bertugas di TPS 03 Desa Jambringin mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
277. Bukti P-277 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Mustain yang bertugas di TPS 02 Desa Kramat mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
278. Bukti P-278 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Ilham Wahyudi yang bertugas di TPS 01 Desa Abdussalam mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
279. Bukti P-279 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Abdussalam yang bertugas di TPS 01 Desa Prekbun mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
280. Bukti P-280 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Moh. Fajarul yang bertugas di TPS 06 Desa Panglegur mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.
281. Bukti P-281 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon atas nama Ach. Samian yang bertugas di TPS 17 Desa Plakpak mendapat tekanan untuk menandatangani C.Hasil-KWK-Bupati dan salinannya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

282. Bukti P-282 : Fotokopi Surat Pernyataan bahwa pemilih atas nama Amrosiy yang beralamat di Desa Bujur Timur Kecamatan Batumarmar sudah merantau sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
283. Bukti P-283 : Fotokopi Surat Pernyataan bahwa pemilih atas nama Naksudin yang beralamat di Desa Bujur Timur Kecamatan Batumarmar sudah merantau sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
284. Bukti P-284 : Fotokopi Surat Pernyataan bahwa pemilih atas nama Ismail yang beralamat di Desa Bujur Timur Kecamatan Batumarmar sudah merantau sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
285. Bukti P-285 : Fotokopi Surat Pernyataan bahwa pemilih atas nama Bersawi yang beralamat di Desa Bujur Timur Kecamatan Batumarmar sudah merantau sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
286. Bukti P-286 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 03 Blaban.
287. Bukti P-287 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Blaban.
288. Bukti P-288 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Dasok.
289. Bukti P-289 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Bulangan Timur.
290. Bukti P-290 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 02 Bulangan Branta.
291. Bukti P-291 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 02 Sana Tengah.
292. Bukti P-292 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 08 Palesanggar.
293. Bukti P-293 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 09 Pasanggar.
294. Bukti P-294 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 06 Palesanggar.
295. Bukti P-295 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 02 Kramat.
296. Bukti P-296 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Dasok.
297. Bukti P-297 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Sopa’ah.
298. Bukti P-298 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 09 Blaban.
299. Bukti P-299 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 05 Blaban.
300. Bukti P-300 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 10 Bujur Tengah.
301. Bukti P-301 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 06 Bujur Tengah.
302. Bukti P-302 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 04 Blaban.
303. Bukti P-303 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 12 Bujur Tengah.
304. Bukti P-304 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 08 Blaban.
305. Bukti P-305 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 02 Blaban.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

306. Bukti P-306 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 03 Bujur Barat.
307. Bukti P-307 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 03 Sana Tengah.
308. Bukti P-308 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 07 Bujur Barat.
309. Bukti P-309 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 06 Dasok.
310. Bukti P-310 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 17 Plakpak.
311. Bukti P-311 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Lesong Daja.
312. Bukti P-312 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Lesong Laok.
313. Bukti P-313 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 04 Lesong Laok.
314. Bukti P-314 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Blaban.
315. Bukti P-315 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 06 Balaban.
316. Bukti P-316 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 09 Bujur Tengah.
317. Bukti P-317 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 02 Bujur Barat.
318. Bukti P-318 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 08 Bujur Tengah.
319. Bukti P-319 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 13 Palesanggar.
320. Bukti P-320 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 12 Batu Bintang.
321. Bukti P-321 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 14 Bujur Tengah.
322. Bukti P-322 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 08 Bujur Barat.
323. Bukti P-323 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Batu Bintang.
324. Bukti P-324 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 11 Bujur Tengah.
325. Bukti P-325 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 05 Bujur Barat.
326. Bukti P-326 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 3 Tebul Timur.
327. Bukti P-327 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Prekbun.
328. Bukti P-328 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Nomor 128/Panwaslu/XI/2012 yang merekomendasikan KPUD Pamekasan untuk membuka pendaftaran baru Calon Bupati Pamekasan karena Calon Bupati yaitu KH Kholilurrahman tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon Bupati dikarenakan tidak memiliki ijazah SD/MI.
329. Bukti P-329 : Fotokopi Formulir Temuan dan Kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan terkait dugaan pelanggaran KPUD Pamekasan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Calon Bupati Kholilurrahman tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Bupati karena ijazah SKPI MI tidak ada.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

330. Bukti P-330 : Fotokopi Surat Keterangan hilang ijazah calon Bupati nomor urut 2 an. KH. Kholilurrahman, SH yang dikeluarkan tgl 16 April 2012 padahal di Surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah MIN Karanganyar Paiton an. M. Cholil yang berbeda dengan nama di dalam surat keterangan hilang.
331. Bukti P-330a : Fotokopi Daftar Angka Penilaian Nomor Pokok: 0179 atas nama M.Cholil, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Paiton, Karang Anyar, Probolinggo.
332. Bukti P-331 : Fotokopi Surat Keberatan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 terhadap KPUD Pamekasan yang membiarkan Gudang Logistik KPUD Pamekasan di jaga oleh Pasangan Calon nomor urut 2 padahal sedang terjadi sengketa di MK.
333. Bukti P-332 : Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan yang dikeluarkan oleh KPUD Pamekasan.
334. Bukti P-333 : Video Kepala Desa atas nama Fahri yang bersama-sama dengan Bupati nomor Urut 2 datang ke MK mengawal persidangan sengketa Pilkada, Dimana sebelumnya Kades tersebut diketahui mendukung Pasangan Calon nomor 2.
335. Bukti P-334 : Fotokopi Berita tentang pemanggilan terhadap 5 Kades yang mendukung secara terang-terangan pasangan calon Kharisma.
336. Bukti P-335 : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian dari Suami Pia yaitu Bapak Girno yang disaksikan langsung Horrima.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 10 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Moh. Saleh

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk dalam rangka mengawal konstitusi dan demokrasi (*the guardian of the constitution and Democracy*) dan lebih jauh dari itu adalah menyelamatkan suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam

penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Oleh sebab itu, MK tidak hanya memeriksa dan mengadili kuantitas perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tetapi juga terhadap kualitas penyelenggaraan Pilkada yang berpengaruh terhadap perolehan suara dan berpotensi mengubah keterpilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. KH. Kholilurrahman, SH. M.Si. - H. Sukriyanto) terindikasi terjadi pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) dalam proses pemungutan suara dan cacat prosedur dalam penetapan perolehan suara oleh Penyelenggara Pilkada Kabupaten Pamekasan, dimana pelanggarannya tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) desa 114 (seratus empat belas) TPS di Kabupaten Pamekasan. Pelanggaran hukum ini diduga kuat berpengaruh terhadap perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 291.246 dan Pasangan Calon Nomor 3 sebesar 263.740 atau terdapat selisih sebesar 27.506.

Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang akan dijelaskan sebagai Keterangan Ahli adalah:

1. Keabsahan Model C. Hasil-KWK-Bupati sebagai dasar Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024.
2. Akibat hukum atas ketidakabsahan Model C. Hasil-KWK-Bupati terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024.

Keabsahan Model C. Hasil-KWK-Bupati sebagai dasar Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

Model C. Hasil-KWK-Bupati merupakan berita acara, sertifikat, dan catatan hasil perhitungan perolehan suara di TPS yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan anggota KPPS serta Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Ketua KPPS mendokumentasikan formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati tersebut dalam bentuk Dokumen Elektronik. KPPS kemudian menyampaikan formulir Model C. Hasil- KWK-Bupati kepada KPU (Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota). Oleh karena Model C. Hasil-KWK- Bupati merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Model C. Hasil-KWK-Bupati disebut sebagai Keputusan (*beschikking*) sebagaimana Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Model C. Hasil-KWK-Bupati menjadi dasar bagi PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dalam menetapkan perolehan suara di TPS bagi pasangan calon, maka Model C. Hasil-KWK-Bupati harus dilihat keabsahannya. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa keabsahan tindak pemerintahan dapat diukur pada 3 (tiga) aspek, yaitu:

a. Aspek wewenang, yaitu diukur dari dasar wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam melakukan tindakan pemerintahan, baik diperoleh secara atributif melalui peraturan perundang-undangan atau delegasi atau mandat melalui pelimpahan wewenang. Wewenang merupakan salah satu unsur dari terpenuhinya prinsip "*rechtmatigeheid van bestuur*". Oleh karena itu, setiap wewenang harus bertumpu pada batasan-batasan yang ditetapkannya, berkenaan dengan batasan wewenang tersebut, Philipus M. Hadjon mengemukakan, bahwa setiap wewenang itu dibatasi oleh isi/materi (substansi), wilayah/ruang (*locus*), dan waktu (*tempus*). Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat wewenang atau dalam artian bahwa di luar-luar batas-batas itu suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*). Tindakan tanpa wewenang bisa berupa onbevoegdheid ratione materiae (tidak berwenang secara materi/substansi), onbevoegdheid ratione loci (tidak berwenang secara lokus/tempat), dan onbevoegdheid ratione temporis (tidak berwenang secara tempus/waktu).
b. Aspek Prosedur, yaitu diukur dari asas negara hukum, atau asas demokrasi atau asas instrumental. Asas negara hukum terutama berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Asas demokrasi berkenaan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas instrumental meliputi asas efisiensi (*doelmatigeheid*/daya guna) asas efektivitas (*doeltreffenheid*/hasil guna); dan/atau
c. Aspek substansi, yaitu berkenaan dengan adanya tindakan pemerintahan secara sewenang-wenang (*willekeur*) atau penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) (Philipus M. Hadjon, dkk, 2010:105).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon bahwa terdapat beberapa pelanggaran dalam pencatatan hasil perhitungan perolehan suara ke dalam Model C. Hasil-KWK-Bupati, yaitu:

1. Pemilih Yang Sudah Meninggal Dunia Dan Terdaftar Dalam DPT, Namun Digunakan Oleh Oknum Tertentu Untuk Melakukan Pencoblosan Surat Suara Dalam Pemungutan Suara.
2. Pelanggaran Berupa Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari Satu Kali
3. Adanya Kejadian Nama Pemilih Yang Menggunakan Haknya Berdasarkan DPT, Ternyata Sudah Meninggal Dunia Sebelum Tanggal 27 November 2024
4. Pemilih Yang Sudah Merantau Dan Bekerja Ke Luar Negeri Yang Terdaftar Dalam DPT, Namun Digunakan Oleh Oknum Tertentu Untuk Melakukan Pencoblosan Surat Suara Dalam Pemungutan Suara.
5. Bahwa Kehadiran Pemilih 100% Padahal Di Daftar Hadir Di mana Tanda Tangannya Diduga Dilakukan Oleh Satu Orang Karena Tanda Tangannya Sama Semua Antara Lain.
6. Kehadiran Melebihi Jumlah DPT dan Ada Yang Tidak Hadir.
7. Bahwa Kehadiran 100% DPT Dan Tidak Ada Yang Tanda Tangan Daftar Hadir Tidak Di Tanda Tangani.

Berdasarkan alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon bahwa pelanggaran di atas dilakukan oleh KPPS. Oleh karena KPPS sebagai penyelenggara Pilkada, maka KPPS tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir). Menurut Philipus M. Hadjon bahwa unsur penyalahgunaan wewenang terdapat 3 (tiga), yaitu Met opzet (dengan sengaja), Mengalihkan tujuan wewenang, dan Ada interes pribadi yang negatif. Oleh karena itu, semua Model C. Hasil-KWK-Bupati yang terbukti dihasilkan dari tindakan penyalahgunaan wewenang oleh KPPS disebut cacat substansi. Oleh karenanya itu, Model C. Hasil-KWK-Bupati menjadi tidak sah secara hukum.

Akibat hukum atas ketidakabsahan Model C. Hasil-KWK-Bupati terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

Akibat hukum atas ketidakabsahan Model C. Hasil-KWK- Bupati yang dihasilkan dari tindakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir),

maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Model C. Hasil-KWK-Bupati yang terbukti mengandung cacat substansi. Oleh karena Model C. Hasil-KWK-Bupati mengandung cacat substansi, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan segala tindakan/Keputusan yang mendasarkan pada Model C. Hasil-KWK- Bupati, termasuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB.

Sebagai akibat lanjutan atas ketidakabsahan pencatatan hasil perolehan suara dalam Model C. Hasil-KWK-Bupati, maka Mahkamah Konstitusi cukup beralasan untuk memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang terbukti mengandung cacat substansi. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 bahwa PSU dilakukan jika terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Kesimpulan

1. Semua Model C. Hasil-KWK-Bupati yang terbukti dihasilkan dari tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh KPPS adalah tidak sah secara hukum karena cacat substansi.
2. Akibat hukum atas ketidakabsahan Model C. Hasil-KWK-Bupati adalah dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan juga terhadap keputusan yang

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

mendasarkan pada Model C. Hasil-KWK- Bupati, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024. Oleh karena itu, menjadi cukup beralasan bagi MK untuk memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua TPS yang terbukti dihasilkan dari tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh KPPS.

Ahli menambahkan keterangan di dalam persidangan sebagai berikut:

Keabsahan tindakan pemerintahan dapat diukur melalui tiga aspek utama, yaitu wewenang, prosedur, dan substansi. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa aspek wewenang bersumber dari tiga bentuk, yaitu atributif, delegasi, dan mandat. Setiap bentuk wewenang memiliki batasan substansi, wilayah, dan waktu. Jika suatu tindakan pemerintahan melampaui batasan tersebut, maka tindakan tersebut menjadi tidak sah atau *onbevoegdheid*, yang dapat dikategorikan sebagai *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci*, dan *onbevoegdheid ratione temporis*.

Aspek prosedural mengacu pada kepatuhan terhadap asas negara hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental. Asas negara hukum berkaitan dengan pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Asas demokrasi menekankan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan asas instrumental berfokus pada efisiensi (*doelmatigheid*) dan efektivitas (*resultaatmatigheid*). Kepatuhan terhadap ketiga asas ini menjadi penentu sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintahan.

Dari aspek substansi, tindakan pemerintahan dapat dinilai dari apakah terdapat tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus tertentu, keabsahan tindakan pemerintahan juga dipertanyakan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Misalnya, dalam peraturan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, salah satu syarat pencalonan adalah melampirkan fotokopi ijazah. Namun, dalam praktiknya, verifikasi terhadap ijazah dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi sering kali diperlukan untuk memastikan keabsahan dokumen yang diajukan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Dalam regulasi terkait, Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5343 Tahun 2015 mengatur bahwa apabila ijazah hilang atau rusak, dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Jika surat tersebut tidak memenuhi format yang telah ditetapkan, maka keabsahannya dapat dipertanyakan. Hal ini berimplikasi pada validitas ijazah di jenjang pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, dalam konteks pemilihan kepala daerah, syarat administratif terkait pendidikan harus ditinjau secara ketat agar tidak menimbulkan cacat prosedural maupun substansial.

Kasus lain yang mencerminkan cacat prosedural dan substansial dalam pemilihan kepala daerah adalah keterlibatan pemilih yang telah meninggal atau merantau dalam proses pemungutan suara. Beberapa bukti menunjukkan adanya suara yang diberikan atas nama individu yang tidak hadir pada pemilihan. Dalam hal ini, KPPS sebagai penyelenggara pilkada dianggap telah menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*). Hal ini mencakup penandatanganan C.Hasil yang mencerminkan tingkat kehadiran 100%, meskipun terdapat bukti bahwa beberapa pemilih telah meninggal atau merantau. Penyalahgunaan wewenang ini dapat berakibat pada ketidakabsahan hasil pemilihan.

Selain itu, pelanggaran yang terjadi juga dikategorikan sebagai pelanggaran *Terstruktur, Sistematis, dan Masif* (TSM). Kriteria TSM ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/2008 yang menetapkan bahwa pelanggaran pemilu dapat dikategorikan sebagai TSM apabila terjadi secara terorganisir, sistemik, dan memiliki dampak luas terhadap hasil pemilihan.

Berdasarkan analisis ini, secara keseluruhan, pelanggaran yang bersifat prosedural dan substansial dalam pemilihan kepala daerah dapat berimplikasi pada pembatalan hasil pemilu. Oleh karena itu, reformasi dalam regulasi dan peningkatan pengawasan dalam proses pemilu perlu dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

SAKSI PEMOHON

1. **Achmad Mukhlisin**
   - Saksi menerangkan merupakan pemilih dalam Pilkada Pamekasan serta menjadi relawan bagi Pasangan Calon Nomor 3.

- Saksi menerangkan bahwa meskipun tidak terdaftar secara resmi dalam struktur tim kampanye, saksi tetap aktif dalam kegiatan relawan.
- Saksi mendukung dan mengampanyekan Pasangan Calon Nomor 3.
- Saksi menerangkan bahwa saksi memberikan suara di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, namun tidak mengingat nomor TPS tempatnya memilih.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui hasil perolehan suara di TPS tempatnya memilih.
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah menjadi bagian dari tim hukum Pasangan Asri (Ahmad Syafii-Khalil Asy'ari) dalam Pilkada 2013.
- Saksi menerangkan bahwa dalam Pilkada 2013, Panwaslu Kabupaten Pamekasan mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan bahwa Pasangan Kompak (Khalilurrahman-Masduki) tidak memenuhi syarat karena permasalahan ijazah.
- Saksi menerangkan bahwa rekomendasi Panwaslu tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU, tetapi justru KPU mendiskualifikasi Pasangan Asri dari kontestasi Pilkada 2013.
- Saksi menerangkan bahwa saksi melaporkan tindakan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang kemudian berujung pada pemecatan seluruh Komisioner KPU Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013.
- Saksi menerangkan bahwa saksi baru menyadari relevansi kasus Pilkada 2013 dengan perkara ini setelah diberitahu oleh Kuasa Hukum Pemohon.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada laporan resmi dari Pasangan Calon Nomor 3 ke Bawaslu mengenai dugaan kecurangan terkait ijazah dalam Pilkada 2024.

2. **Hairul Hakim**
   - Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan relawan untuk Pasangan Calon Nomor 03 dalam Pilkada Pamekasan.
   - Saksi menerangkan bahwa tidak terdaftar secara resmi dalam tim sukses, namun aktif dalam kegiatan kampanye.
   - Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pencalonan Pasangan Calon Nomor 03.

- Saksi menerangkan bahwa saksi menggunakan hak pilih di TPS 1, Dusun Pepen, Desa Tlagah, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.
- Saksi menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor 03 memenangkan perolehan suara di TPS 1, namun saksi tidak mengingat jumlah suara yang diperoleh.
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 4, Desa Pasanggar, terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia dan merantau tetapi tetap tercatat memilih.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh, terdapat 6 pemilih yang sudah meninggal dan 6 pemilih yang merantau, namun tetap terdaftar memberikan suara.
- Saksi menerangkan bahwa Jumaidah dan Lukat termasuk dalam daftar pemilih yang telah meninggal dunia, tetapi masih tercatat memilih.
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 4, Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, terdapat seorang pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali.
- Saksi menerangkan bahwa informasi terkait pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali diperoleh dari tim relawan dan bukan hasil pengamatan langsung oleh saksi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi telah melaporkan dugaan kecurangan ini secara lisan kepada Panwas setempat, namun tidak membuat laporan tertulis.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengalami intimidasi dari tim Pasangan Calon Nomor 02 saat mencoba menyampaikan keberatan terkait dugaan kecurangan.
- Saksi menerangkan bahwa intimidasi tersebut dilakukan oleh seseorang bernama Agus Saleh, yang merupakan bagian dari tim Pasangan Calon Nomor 02.
- Saksi menerangkan bahwa meskipun mengalami intimidasi, saksi tetap menandatangani dokumen di TPS 4.

3. **Mohammad Saleh Rekso**
   - Saksi menerangkan bahwa saksi menggunakan hak pilih di TPS 1, Desa Lesong Daya, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
   - Saksi merupakan relawan Pasangan Calon Nomor 03.

- Saksi menerangkan bahwa di desanya terdapat banyak pemilih yang telah meninggal dunia dan merantau, namun tetap tercatat memberikan suara.
- Saksi menerangkan bahwa terdapat sekitar 25 pemilih yang telah merantau ke Malaysia, tetapi tetap tercatat memilih di TPS.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak dapat menyebutkan secara pasti jumlah pemilih yang telah meninggal dunia, namun menegaskan bahwa saksi mengenali beberapa di antaranya.
- Saksi menerangkan bahwa panitia pemungutan suara di TPS 1 didominasi oleh pendukung Pasangan Calon Nomor 02.
- Saksi menerangkan bahwa suara dari pemilih yang telah meninggal dunia dan merantau diberikan kepada Pasangan Calon Nomor 02.
- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan satu-satunya pendukung Pasangan Calon Nomor 03 di TPS tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi menandatangani dokumen pemungutan suara di TPS dalam kondisi terpaksa, setelah mendapat tekanan dari panitia menjelang waktu salat Ashar.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak membuat catatan keberatan tertulis, tetapi telah menyampaikan keberatan secara lisan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengalami ancaman saat berada di TPS 3, Dusun Karang Timur, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar.
- Saksi menerangkan bahwa saksi lainnya juga mengalami ancaman agar tetap diam dan tidak mempersoalkan dugaan pelanggaran yang terjadi.
- Saksi menerangkan bahwa dugaan kecurangan yang disaksikannya telah saksi sampaikan dalam grup WhatsApp relawan Pasangan Calon Nomor 03, namun saksi sendiri tidak menyaksikan secara langsung dugaan pelanggaran tersebut di TPS terkait.
- Saksi menerangkan bahwa terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 02, yang terjadi di Desa Cok Gunung sebelum hari pemilihan.
- Saksi menerangkan bahwa uang diberikan dalam amplop yang di dalamnya terdapat nomor urut Pasangan Calon Nomor 02.
- Saksi menerangkan bahwa besaran uang yang diberikan kepada pemilih adalah sebesar Rp50.000,00 per orang.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA *A QUO*

1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 **[“UU PILKADA”]**
2) Bahwa perlu diperhatikan, sejak diundangkannya UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

BENTUK PELANGGARAN/SENGKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat **Terstruktur, Sistematis dan Masif**	➢ **Bawaslu** ➢ **Mahkamah Agung**
Pelanggaran Kode Etik	➢ DKPP
Pelanggaran Administrasi	➢ KPU ➢ Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	➢ Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	➢ Sentra Gakkumdu ➢ Pengadilan Negeri ➢ Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	➢ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ➢ Mahkamah Agung
PHP PILKADA	➢ **Mahkamah Konstitusi RI**

3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat pemisahan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain yang telah dipisahkan secara hukum. Sehingga, setiap Lembaga negara tersebut di atas tidak boleh terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan di setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 **("Pilbup Pamekasan 2024")**;

4) Bahwa Mahkamah Konstitusi RI **("MK RI")** diamanatkan oleh Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada hanya untuk menyelesaikan sengketa atas Perselisihan penetapan **perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana perselisihan hasil Pilbup Pamekasan 2024 ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pilbup Pamekasan 2024 yaitu setelah penghitungan suara;

5) Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan Pilbup Pamekasan 2024 itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan **("KPU Pamekasan")** atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan?" Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pilkada, dimana MK RI pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Walikota hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh KPU Pamekasan saja dan MK RI tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada UU Pilkada;

6) Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, melalui Paragraf Keempat Hlm. 42, dinyatakan:

> "..*Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca* ***"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.."***

Dengan demikian MK RI mempertegas kedudukan MK RI beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota

sebagaimana putusan MK tersebut diatas dan UU Pilkada, **MK RI hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan**;

7) Bahwa lebih lanjut apabila terdapat persoalan-persoalan sepertihalnya adanya dugaan **TSM**, **Pidana Money Politik dan Netralitas Kepala Desa beserta Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan** dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota beserta Persoalan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut:

Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif (Hal. 7 s/d 22)

".. Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam proses pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Pamekasan melibatkan KPPS selaku penyelenggara pemilu dilakukan secara berencana secara sistematis dan meluas secara massif dimana ada banyak TPS yang tingkat kehadiran sampai 100 persen, padahal ada pemilih yang tercantum di DPT telah meninggal dunia, peristiwa tersebut tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) desa 114 (seratus empat belas) TPS di Kabupaten Pamekasan,dibiarkan oleh KPPS sebagai penyelenggara ditingkat KPPS..";

Money Politic (Hal. 23)

"..Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan tim suksesnya yang membagikan amplop berisi uang dan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.."

Pelanggaran Netralitas oleh Kepala Desa (Hal. 23)

"..Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh Kepala Desa di Pantura yang mendukung Pasangan Calon Nomor urut 2.."

Tanggapan Termohon

8) Bahwa setelah Termohon memperhatikan dan membaca secara seksama terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dalil Pemohon tidak menarasikan adanya perselisihan hasil suara antara suara milik Pemohon yang didasari produk hukum atas rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, dalam hal ini Model C. Hasil-KWK-Bupati **("C. Hasil")**, Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota **("D. Hasil Kecamatan")**, dan Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota **("D. Hasil Kabupaten").** Namun dalam hal ini Pemohon hanya menjelaskan adanya dugaan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pelanggaran Administrasi, dan Pelanggaran Pidana Pemilihan. Dimana dalil yang dinarasikan oleh Pemohon tersebut bukan menjadi objek kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi secara jelas disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada.

   Lebih lanjut dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 sebagaimana termuat pada halaman 42 yang pada intinya "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi..", kemudian oleh Mahkamah diperkuat dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang pada intinya menyebutkan:

   Pasal 8 ayat (4)

   ".. alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.."

9) Bahwa sebagaimana uraian Termohon di atas secara jelas menegaskan jika Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan dugaan adanya Pelanggaran

yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) serta Pelanggaran Administrasi sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon;

10) Bahwa dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, Pelanggaran Administrasi, pelanggaran Kode Etik dan dugaan Tindak Pidana Pemlihan. Maka, sudah sepatutnya Majelis Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo.*

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN *A QUO* KE MAHKAMAH KONSTUTUSI RI

11) Bahwa sebelumnya Termohon sampaikan perihal kedudukan Pemohon dan Pihak Terkait sebagai perserta Pilbup Pamekasan Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 842 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024.

12) Bahwa selanjutnya Termohon menetapkan nomor urut sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 843 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 yang menetapkan Dr, Fattah Jasin, MS dan RP. Ahmad Mujahid Ansori, Drs Nomor urut (01) dan Dr. KH. Kholilurrahman, S.H., M.Si. - H. Sukriyanto nomor urut (02) dan Muhammad Baqir Aminatullah - Taufadi, S.H.I. nomor urut (03).

13) Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
≤ 250.000	2%
> 250.000 - 500.000	1,5%
> 500.000 - 1.000.000	1%
> 1.000.000	0,5%

14) Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum RI nomor; 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 **(Surat Kemendagri) [Bukti T-1]**, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan adalah sebesar **889,798** jiwa dari total 13 Kecamatan dan 189 Kelurahan. Hal ini menunjukkan batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah **1%** dari total suara sah yang berjumlah sebesar **572.293** suara sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Pamekasan ("**D-Hasil Kabupaten Pamekasan**") **[Bukti T-3]**;

15) Dengan demikian selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah 5.723 suara sebagaimana penghitungan berikut:

572.293 x 1% = **5.723 Suara**

16) Bahwa selanjutnya, diketahui selisih suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.00 WIB **("KKPU 1438/2024") [Bukti T - 19]**, yakni sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	Dr. Ir. Fattah Jasin, M.Si. - RP. Ahmad Mujahid Ansori	**17.307** (tujuh belas ribu tiga ratus tujuh) suara
02	Dr. K.H. Kholilurrahman, S.H., M.S.i - H. Sukriyanto	**291.246** (dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam) suara

03	Muhammad Baqir Aminatullah - Taufadi, S.H.I.	**263.740** (dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh) suara
Total Selisih Suara		291.246 - 263.740 = **27.506 Suara**

17) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 02 dan pasangan calon nomor urut 03 **adalah 27.506 suara atau 4,8% (empat koma delapan persen)** yang mana jauh melebihi dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada, yakni **sebesar 5.723 suara atau 1% (satu persen)** ;

18) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas Pemohon **tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)** untuk mengajukan Permohonan *a quo,* karena selisih suara antar pasangan calon nomor urut 02 dan dengan pasangan calon nomor urut 03 yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard);*

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR KARENA TERDAPAT PERBEDAAN YANG SANGAT ESENSIAL DAN INKONSISTEN DALAM KONSTRUKSI PERMOHONAN (*OBSCUUR LIBEL*)

19) Bahwa setelah Termohon membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil **Pemohon** baik dalam Permohonan maupun perbaikannya, ternyata terdapat banyak dalil **Pemohon** dalam Permohonannya yang tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang dianggap merugikan **Pemohon** telah beralih atau berpindah pada Pasangan Calon lainnya, dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut:

20) Bahwa ketidakjelasan dalil pemohon sangat terlihat jelas dan nyata pada halaman 8 sampai 22 permohonan yang pada pokoknya menguraikan, adanya dugaan terdapat pemilih yang sudah meninggal

dunia di beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten Pamekasan, namun tetap melakukan proses pemilihan di TPS yang hanya dinyatakan oleh Pemohon dengan berdasar pada daftar hadir pemilih di TPS tersebut;

Tanggapan Termohon

21) Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon, mendasari dugaanya dengan surat kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa. Sejatinya, hal tersebut merupakan dugaan yang mengada - ngada ataupun tidak berdasar pada dokumen hukum yang sah;
22) Bahwa selanjutnya ketidakjelasan dan ketidaklengkapan pemohon dalam menguraikan dalil-dalil permohonannya juga terdapat pada halaman 23 sampai 24 Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

    "Bahwa KPPS membiarkan terjadinya pelanggaran adanya warga yang memakai masker dan melakukan pencoblosan di kotak suara lebih dari satu kali"

Tanggapan Termohon

23) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dinarasikan oleh Pemohon di atas, yang menyatakan adanya dugaan pencoblosan lebih dari satu kali karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas siapa nama orang yang telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali tersebut;
24) Bahwa tanggapan Termohon atas dalil Pemohon pada Pokok Permohonan halaman 23 sampai 24 yang merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak lengkap *(obscuur libel),* dikarenakan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap identitas dari warga yang diduga melakukan pencoblosan lebih dari satu kali tersebut;
25) Bahwa apabila Pemohon mendalilkan adanya dugaan orang yang mencoblos lebih dari satu kali, seharusnya Pemohon menguraikan secara detail agar tidak menimbulkan persepsi liar / tuduhan yang tidak tepat dan hanya berdasar pada bukti video yang Pemohon ajukan dalam

Permohonan dan tidak memiliki kejelasan atas identitas Pihak yang ada di dalam Video tersebut;

26) Bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya halaman 3 yang pada intinya:

".. Keputusan KPU Pamekasan Nomor 1209 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 00.34 WIB.."

27) Bahwa lebih lanjut Pemohon menarasikan dalam permohonannya halaman 10 yang pada intinya:

".. di TPS 6 Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan kehadiran 100%, padahal pada faktanya ada 11 orang yang telah meninggal dunia dan menjadi TKI sebanyak 11 orang.."

28) Bahwa juga Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada halaman 15 yang pada intinya:

".. di TPS 13 Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan kehadiran 100%, padahal pada faktanya ada 3 orang yang telah meninggal dunia.."

Tanggapan Termohon

29) Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil Pemohon yang menarasikan Keputusan KPU Pamekasan nomor 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 00.34 WIB, karena Keputusan Termohon yang benar Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 adalah Keputusan KPU Pamekasan nomor 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 01.00 WIB.

30) Bahwa selanjutnya Termohon juga menolah terhadap dalil Pemohon pada halaman 10 dan 15, karena apa yang Pemohon dalilkan berkenaan dengan orang meninggal tidak sesuai dengan table nama yang Pemohon sebutkan. Hal ini menunjukkan Pemohon dalam membuat Permohon tidak kurang hati-hati sehingga mengakibatkan dalil yang dinarasikan oleh Pemohon kabur atau tidak jelas.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

31) Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas kabur karena dalam menarasikan permohonannya antara Posita dan Pettitum tidak sesuai. Hal ini terjadi pada Permohonan Pemohon halaman 49 petitum ke 3 poin 4 yang meminta Pemungutan suara ulang di 7 Kecamatan yang ada pada Kabupaten Pamekasan untuk Pilbup Pamekasan 2024. Sedangkan setalah Termohon baca pada seluruh posita permohonan Pemohon dari halaman 8 s/d 48 Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon hanya ada 5 Kecamatan saja diantaranya:
    1. Kecamatan Pegantenan
    2. Kecamatan Proppo
    3. Kecamatan Palengaan
    4. Kecamatan Pademawu
    5. Kecamatan Batumarmar

    Hal ini menunjukkan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena antara posita dan petitumnya tidak nyambung yang mengakibatkan permohonan Pemohon masuk pada kriteria yang cacat formil.
32) Bahwa urgensi menguraikan kejadian secara lengkap dan terperinci menjadi salah satu syarat formil bagi Pemohon apabila mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil Pilbup Pamekasan 2024 Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Mahkamah Konstitusi. Hal mana telah secara jelas terurai dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang pada intinya Pemohon diharuskan untuk menguraikan secara jelas;
33) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon yang Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur karena Permohonan Pemohon tidak terperinci dan menyebutkan secara jelas (*Obscuur Libel*) sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard)*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, pada pokoknya menyatakan **Termohon** telah diduga melakukan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, serta Termohon telah melakukan pelanggaran Etik dan selain itu, **Pemohon** juga mendalilkan dugaan adanya pelanggaran pidana pemilihan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I.1 GAMBARAN UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024

34) Bahwa sebelum Termohon menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan tentang Gambaran umum Pilbup Kabupaten Pamekasan tahun 2024;

35) Bahwa Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 (DAK2) memiliki penduduk sebanyak 889.798 jiwa **[Bukti T-1],** selanjutnya di Kabupaten Pamekasan daftar pemilih tetapnya sebanyak 666.048 pemilih dan terdapat 1.270 TPS yang tersebar di 13 Kecamatan dan 189 Desa/Kelurahan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor: 841 Tahun 2024 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pamekasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 **[Bukti T-2];**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk	889.798
2.	Jumlah DPT	666.048
3.	Jumlah Kecamatan	13
4.	Jumlah Kelurahan	189

36) Bahwa lebih lanjut dalam proses pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 27 November 2024 dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang dimulai dari tanggal 29 November 2024 yang

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

selanjutnya dilakukan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pamekasan tanggal 5 Desember 2024 sebagaimana Form Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 **[Bukti T - 3]** adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Pemilih Laki-laki	274.229
2.	Jumlah Pemilih Perempuan	305.301
3.	Jumlah Pemilih Pindahan	111
4.	Jumlah Pemilih Tambahan	951
5.	Jumlah Suara Sah	572.293 suara
6.	Jumlah Suara Tidak Sah	8.299 suara
7.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	580.592 suara

37) Bahwa Termohon sampaikan proses penyelenggaraan/tahapan Pilbup Kabupaten Pamekasan 2024 yang dimulai dari pemungutan surat suara pada tingkat TPS tanggal 27 November 2024 sampai dengan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan tanggal 5 Desember 2024 berjalan dengan lancar hingga sampai pada penetapan hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pamekasan;

I.2 TIDAK ADANYA PEMILIH YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA DAN TERDAFTAR DALAM DPT, NAMUN DIGUNAKAN OLEH OKNUM TERTENTU UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN SURAT SUARA DI TPS

38) Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil yang telah dibacakan oleh kuasa hukum Pemohon saat persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, karena seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak ada yang mendalilkan atau menguraikan adanya selisih suara antara penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon yang didasari pada C. Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon dengan Penghitungan perolehan suara Pilbup Kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Pemohon berdasarkan C. Hasil yang dimiliki oleh Termohon, lantaran dewasa ini MK RI telah dibatasi Kewenangannya setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, yang mana secara tegas menjelaskan sebagaimana terurai pada halaman 42 yang pada intinya "**..Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi..**" Artinya seluruh alasan dan dalil yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan dugaan Pelanggaran **Terstruktur, Sistematis dan Masif** serta dugaan adanya pelanggaran administasi dan etik dalam Permohonan *a quo* menurut Putusan MK diatas, tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga harus ditolak;

39) Bahwa Termohon mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam Jawaban Termohon serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan *(mutatis mutandis)* dalam Jawaban Termohon yang terurai dalam pokok perkara;

40) Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 8 dan 9 pada intinya mendalilkan:

> *".. Di TPS 4 Desa Pesanggar Kecamatan Pegantenan tingkat kehadiran 100% berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta sudah meninggal sebelum pemilihan sebanyak 6 (enam) orang dan TPS 5 sebanyak 6 (enam) orang..dst..."*

41) Bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada halaman 10 s/d 15 pada intinya:

> *".. di TPS 6 Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan tingkat kehadiran 100% berdasarkan C. Hasil Salinan KWK Bupati, Pemohon temukan fakta di DPT yang sudah meninggal sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sejumlah 11 (sebelas) orang TPS 8 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Pemilih dan TPS 13 sebanyak 3 (tiga) orang..dst.."*

TANGGAPAN TERMOHON

42) Bahwa sebelum Termohon menguraikan Jawaban perlu kiranya Termohon sampaikan berkenaan dengan proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih dalam pelaksanaan Pilbup Pamekasan yang dimulai dari tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor: 841 Tahun 2024 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pamekasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 tanggal 19 September 2024;

43) Bahwa selama proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Termohon, tidak ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pilbup Pamekasan Tahun 2024 *in casu* Pihak Pemberi Keterangan atau lembaga pemantau Pilbup Pamekasan Tahun 2024 yang terdaftar di KPU Pamekasan *in casu* Termohon dan dari masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Pamekasan terhadap nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* karena meninggal dunia;

44) Bahwa adapun proses tahapan pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih dalam pelaksanaan Pilbup Pamekasan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon telah menerima DP4 dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana 30 Mei 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara Nomor: 115/PL.01.2-BA/3528/2024 tanggal 30 Mei 2024 **[Bukti T - 4]**

b. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Pencocokan data Pemilih (Coklit) selama 1 (satu) bulan dalam hal ini dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan nomor 826 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara (DPS) Kabupaten Pamekasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Bupati Pamekasan Tahun 2024 tanggal 11 Agustus 2024 **[Bukti T - 5)]**

c. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), kemudian Termohon mengumumkan secara online dan offline tanggal 25 Juli s/d tanggal 25 Agustus 2024 data Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah disusun pada tingkat Kelurahan/Desa dalam hal ini oleh petugas PPS untuk melihat tanggapan dari masyarakat mengenai pemilih yang telah meninggal dan pindah serta pemilih yang tidak memenuhi syarat **[Bukti T - 6]**

d. Bahwa setelah semua proses tahapan pemutakhiran data pemilih selesai, tanggal 19 September 2024 Termohon menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor: 841 Tahun 2024 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pamekasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 **[Bukti T-2]**

45) Bahwa kembali Termohon tegaskan selama proses Pencocokan data Pemilih **(“Coklit”)** yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih **(“Pantarlih”)** nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya pada halaman 10 s/d 15 sama sekali tidak ada yang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan data dikarenakan telah meninggal dunia, sehingga saat proses Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan **(“DPSHP”)**, sehingga Termohon tidak dapat melakukan penghapusan data pemilih sebelum adanya dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana Pasal 13 ayat (4) huruf h s/d l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang pada intinya salah satu syarat data pemilih dapat di coret apabila pemilih meninggal dunia dibuktikan dengan akta kematian;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

46) Bahwa adapun lembaga yang berwenang sebagaimana Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berbunyi:

".. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.."

47) Bahwa pada saat proses penetapan DPHP dan DPSHP, Kepala Desa turut serta menyaksikan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon dalam hal ini PPS di semua Kelurahan/Desa sebanyak 189 yang ada di Kabupaten Pamekasan, sehingga surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo.*

48) Bahwa dengan demikian Termohon telah melakukan penetapan data pemilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga data pemilih yang telah ditetapkan oleh **Termohon adalah data pemilih yang sah menurut hukum**;

49) Bahwa terhadap kehadiran 100% berdasarkan model C. Hasil Salinan KWK Bupati yang didalilkan Pemohon padahal ada orang yang meninggal dunia yang terjadi pada:

No	TPS	Desa	Kecamatan	Jumlah orang meninggal
1.	4	Pasanggar	Pegantenan	6 orang
2.	5	Pasanggar	Pegantenan	6 orang
3.	**6**	**Palesanggar**	**Pegantenan**	**11 orang**
4.	**8**	**Palesanggar**	**Pegantenan**	**33 orang**
5.	13	Palesanggar	Pegantenan	3 orang
6.	**3**	**Tebul Timur**	**Pegantenan**	**3 orang**
7.	2	Bulangan Barat	Pegantenan	5 orang
8.	1	Bulangan Timur	Pegantenan	5 orang
9.	15	Tanjung	Pegantenan	3 orang

Merupakan dalil yang sia-sia, karena Pemohon dalam mendalilkan terdapat adanya orang yang meninggal dunia tidak mensandarkan pada dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga apa yang didalilkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya bersumber dari surat pernyataan dan surat keterangan dari Kepala Desa yang masih diragukan validitasnya;

50) Bahwa terhadapa dalil Pemohon yang menyatakan adanya orang meninggal dunia di TPS 6 Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan sebanyak 11 orang telah meninggal adalah tidak benar karena setelah Termohon melakukan sampling terhadap nama-nama orang terduga meninggal oleh Pemohon didapati sebanyak 3 orang yang menyatakan masih hidup sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Dusun Dadak Timur Desa Palesanggar tanggal 14 Januari 2025. **[Bukti T-20].**
51) Selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya orang meninggal dunia di TPS 8 Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan sebanyak 33 orang telah meninggal juga tidak benar, setelah Termohon melakukan sampling terhadap nama-nama orang yang terduga meninggal tersebut didapati sebanyak 22 orang yang menyatakan masih hidup sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Dusun Dadak barat Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan. **[Bukti T-21]**
52) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang telah meninggal dunia di TPS 3 Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan atas “Safraji dan Nurholis” adalah tidak benar. Karena nama - nama yang disebutkan oleh Pemohon tersebut tidak terdaftar sebagai pemilih di TPS 3 Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar.
53) Bahwa lebih lanjut dalil pemohon yang menyatakan pemilih telah meninggal dunia yang termuat pada halaman 14 nomor 25 atas nama lima adalah tidak benar, karena atas nama lima di TPS 8 Desa

Palesanggar Kecamatan Pagentenan masih hidup sebagaimana surat pernyataan yang termuat dalam video dibuat tanggal 11 Januari 2025 **[Bukti T - 7]**

54) Bahwa lebih anehnya lagi dalam permohonan *a quo* Pemohon dalam Permohonannya mendasarkan pada surat keterangan kematian setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, sedangkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa adalah tanggal 4, 5 dan 7 Desember 2024.

55) Bahwa lebih lanjut, saat proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 yang dilakukan oleh Termohon di TPS sebagaimana yang disebutkan di atas, tidak terdapat keberatan yang dilakukan oleh Pemohon maupun melalui saksinya saat penghitungan surat suara di tingkat TPS. Namun sebaliknya, setelah dilakukan penghitungan surat suara, saksi dari Pemohon yang bertugas pada TPS-TPS yang disebutkan di atas membubuhi tanda tangan di Form Model C. Hasil KWK Bupati. Artinya hal ini menunjukkan Pemohon telah menyetujui terhadap perolehan hasil penghitungan Pilbup Pamekasan Tahun 2024 di tingkat TPS, sehingga dokumen Form Model C. Hasil pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah dokumen yang telah sah menurut hukum dan disetujui oleh Pemohon sebelumnya;

56) Bahwa idealnya apabila Pemohon keberatan terhadap perolehan hasil yang ada pada Form Model C. Hasil KWK Bupati milik Termohon, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara, yang pada intinya menyatakan:

"..saksi yang hadir tidak bersedia menanda tangani C. Hasil, wajib dicatat sebagai dalam Form C. Kejadian Khusus yang sertai dengan alasan.."

Namun pada faktanya, saksi dari Pemohon menanda tangani Form Model C. Hasil KWK Bupati, artinya fakta ini menunjukkan Pemohon setuju dengan Form Model C. Hasil KWK Bupati pada Pilbup Pamekasan Tahun 2024 milik Termohon;

57) Bahwa selain itu, dokumen Form Model C. Hasil KWK Bupati telah di awasi oleh Pengawas TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pamekasan 2024 serta tidak ada catatan dan/atau saran perbaikan maupun rekomendasi dari Pengawas tersebut.

58) Bahwa Pemohon seharusnya mendalilkan persandingan suara berdasarkan Form Model C. Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon dan Form Model C. Hasil yang dimiliki oleh Termohon. Namun, karena Pemohon tidak mendalilkan perselisihan suara, maka secara tidak langsung Pemohon telah menyetujui hasil dari rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon di tingkat TPS. Adapun hasil rekapitulasi yang benar menurut Termohon diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1 C. Hasil rekapitulasi yang benar menurut Termohon Pilbup Pamekasan Tahun 2024 ***[Bukti T - 8]***

No	TPS	Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3
Desa Pasanggar				
1.	4	6 suara	326 suara	264 suara
2.	5	5 suara	403 suara	181 suara
Desa Palesanggar				
3.	6	5 suara	406 suara	138 suara
4.	8	3 suara	333 suara	206 suara
5.	13	1 suara	185 suara	237 suara
Tebul Timur				
6.	3	2 suara	277 suara	255 suara
Desa Bulangan Barat				
7.	2	9 suara	271 suara	158 suara
Desa Tanjung				
8.	15	3 suara	278 suara	244 suara

59) Bahwa kembali Termohon sampaikan pada Kecamatan Pegantenan ada keberatan dari saksi Pemohon tertanggal 29 November 2024 yang pada intinya keberatan karena terjadi kecurangan di beberapa TPS saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, namun Pemohon atau saksinya tidak penyandingan dokumen lainnya yang dapat membantah dokumen D. Hasil tingkat Kecamatan Pegantenan. Akan tetapi, tetap Termohon sampaikan kepada Majelis Mahkamah yang memeriksa dan mengadili

perkara *a quo* suara yang benar menurut Termohon Pilbup Pamekasan Tahun 2024 pada Kecamatan Pegantenan **[Bukti T - 9]** sebagai berikut:

Tabel 2 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai D. Hasil Pada Kecamatan Pegantenan Tanggal 29 November 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	Keterangan
		D. Hasil Kecamatan	
01	Dr. Ir. Fattah Jasin, MS- RP Ahmad Mujahid Ansori	28	Sesuai
02	Dr. KH. Kholilurrahman, S.H. M.Si.- H.Sukriyanto	4.774	Sesuai
03	Muhammad Baqir Aminatullah- Taufadi, S.H.I	2.701	Sesuai

60) Bahwa Pemohon menarasikan dalam Permohonannya pada halaman 18 s/d 22 yang pada intinya menyatakan:

".. di TPS 1 Desa Mapper Kecamatan Proppo, tingkat kehadiran 100% berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, namun terdapat 2 orang meninggal dunia.."

".. di TPS 14 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan tingkat kehadiran 100% berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, namun ada yang meninggal sejumlah 1 orang.."

".. di TPS 1 Desa Dasok Kecamatan Pademawu tingkat kehadiran 100% berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati, namun ada yang meninggal 1 orang, TPS 4 sejumlah 2 orang dan TPS 6 sebanyak 2 orang.. "

".. di TPS 1 Desa Lesong Laok Kecamatan Batumarmar tingkat kehadiran 100% berdasarkan Model C Hasil Salinan KWK Bupati, namun terdapat orang meninggal dunia sebanyak 1 orang.."

".. di TPS 3 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan tingkat kehadiran 100% berdasarkan Model C Hasil Salinan KWK Bupati, terdapat orang yang meninggal 1 orang.."

Tanggapan Termohon

61) Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang termuat pada halaman 18 s/d 22 permohonan *a quo yang* mempermasalahkan tingkat kehadiran yang 100% di beberapa TPS pada Desa-desa yang dipersoalkan di atas oleh Pemohon, seperti yang terjadi pada TPS 3 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan yang menurut Pemohon menyampaikan terdapat orang yang meninggal sebanyak 1 (satu) orang. Namun, pada uraian berikutnya Pemohon menarasikan nama-nama orang yang dinyatakan meninggal sebanyak 4 (empat) orang. Sehingga, sampai saat ini Pemohon sejatinya bingung atau tidak konsisten atas dalil permohonannya sendiri;

62) Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak menarasikan dalam dalilnya, surat suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebanyak 10 (sepuluh) surat suara atau hak pilih sebanyak 10 orang tersebut jika seluruh suara tersebut diberikan kepada Pemohon, sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait secara signifikan. Sehingga, dalil-dalil yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut merupakan dalil yang sia-sia apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada berbunyi:

Pasal 156 ayat (2)

> *".. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.."*

Maka, MK RI sudah sepatutnya untuk menolak argumentasi Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

63) Bahwa walaupun dalam permohonan *a quo* Pemohon tidak dapat menarasikan dan/atau Pemohon tidak membuktikan dengan persandingan suara yang benar menurut Pemohon dengan Termohon yang ada pada TPS 1 Desa Mapper, Kecamatan Proppo, TPS 14 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan, TPS 1, TPS 4, TPS 6 Desa Desok Kecamatan Pademawu, TPS 1 Desa Lesong Laok Kecamatan

Batumarmar, TPS 3 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan karena dalam permohonan *a quo* tidak disandingkan dengan data yang dimiliki oleh Termohon, dengan ini Termohon sampaikan suara yang benar menurut Termohon untuk Pilbup Pamekasan Tahun 2024 yang ada pada TPS-TPS yang dijadikan objek permasalahan oleh Pemohon, sebagai berikut:

Tabel 3 C. Hasil yang benar menurut Termohon untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 [Bukti T - 10]

No	TPS	Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3
Desa Mapper Kecamatan Proppo				
1.	1	4 suara	217 suara	186 suara
Desa Banyupalle Kecamatan Palengaan				
2.	14	3 suara	264 suara	219 suara
Desa Dasok Kecamatan Pademawu				
3.	1	11 suara	404 suara	128 suara
4.	4	5 suara	498 suara	64 suara
5.	6	9 suara	336 suara	204 suara
Desa Lesong Laok Kecamatan Batumarmar				
6.	1	3 suara	153 suara	405 suara
Desa Pataon Laok Kecamatan Palengaan				
7.	3	1 suara	528 suara	16 suara

64) Bahwa Termohon tegaskan, setelah melakukan penghitungan terhadap perolehan suara pada TPS - TPS yang disebutkan di atas, tidak adanya sama sekali keberatan dari saksi Pemohon yang dimuat pada Form Model C. Hasil Tingkat TPS. Bahkan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form Model C. Hasil milik Termohon. Selain itu Pengawas TPS yang bertugas pada TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak memberikan saran perbaikan maupun rekomendasi. Hal ini menunjukkan Pemohon telah menyetujui Form Model C. Hasil yang artinya dokumen Form Model C. Hasil milik Termohon adalah sah menurut hukum dan disetujui oleh Pemohon;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

65) Bahwa selanjutnya pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Pemohon tidak juga menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yang dituangkan dalam Form D. Kejadian Khusus. Sehingga, Termohon melakukan penetapan rekapitulasi tingkat kecamatan;
66) Bahwa karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak dapat membandingkan suara yang diperoleh milik Pemohon yang dapat mempengaruhi hasil suara pihak Terkait, maka Pemohon dalam hal hanya membangun narasi seakan-akan Termohon melakukan pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, sistematis dan Masif yang pada kenyataanya tidak dapat Pemohon buktikan secara terang benderang. Sehingga, memang sudah sepatunya dalil Pemohon untuk dikesampingkan karena bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*;
67) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 19 yang pada menyatakan ada yang meninggal dunia di TPS 1 Desa Mapper Kecamatan Proppo atas nama “Fadillah” tidak tercatat sebagai pemilih di TPS 1 Desa Mapper karena pada saat pencocokan data pemilih karena telah meninggal sebagaimana bukti Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa Mapper Kecamatan Proppo **[Bukti T 11].** Bukti ini menunjukkan Pemohon telah memasukkan bukti yang tidak relevan dengan fakta yang sebenarnya sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.
68) Bahwa selain itu Pemohon yang menyatakan kehadiran 100% pada TPS 1 Desa Mapper Kecamatan Proppo adalah tidak benar, karena sebagai Form Model C. Hasil TPS 1 Desa Mapper Kecamatan Proppo kehadiran pemilih adalah sebanyak 411 pemilih dari 543 pemilih yang sebagai pemilih tetap. Apabila Termohon presentasikan kehadiran pemilih pada TPS 1 Desa Mapper Kecamatan Proppo adalah sebesar 75,7%. Artinya dalil permohonan Pemohon tersebut bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

69) Bahwa walaupun Pemohon tidak menyandingkan Penghitungan perolehan suara milik Pemohon berdasarkan dokumen yang dimiliki menurut Pemohon dan sebagaimana Form Model D. Hasil Kecamatan Proppo saksi Pemohon telah membubuhi tanda tangan, artinya hal ini menunjukkan Pemohon telah setuju atas rekapitulasi tersebut. Maka Termohon sampaikan suara yang benar berdasarkan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan pada Pilbup Pamekasan Tahun 2024 menurut Termohon sebagai berikut:

***Tabel 4 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai D.Hasil Pada Kecamatan Proppo Tanggal 29 November 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 2024 [Bukti* T - 12]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Yang Benar Menurut Termohon	Keterangan
		D.Hasil Hasil Kecamatan	
01	Dr. Ir. Fattah Jasin, MS - RP Ahmad Mujahid Ansori	24	Sesuai
02	Dr. KH. Kholilurrahman, S.H. M.Si. - H.Sukriyanto	872	Sesuai
03	Muhammad Baqir Aminatullah - Taufadi, S.H.I	2.191	Sesuai

70) Bahwa pada Kecamatan Palengaan tidak terdapat keberatan, namun tetap dicatat dalam Form Model D. Kejadian Khusus, karena saksi Pemohon tidak mau tanda tangan. Selanjutnya Termohon sampaikan rekapitulasi Hasil Kecamatan Palengaan sebagaimana Form Model D. Hasil **[Bukti T - 13]** pada Pilbup Pamekasan Tahun 2024 yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Tabel 5 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai D.Hasil Pada Kecamatan Palengaan Tanggal 29 November 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	Keterangan
		D.Hasil Hasil Kecamatan	
01	Dr. Ir. Fattah Jasin, MS- RP Ahmad Mujahid Ansori	29	Sesuai
02	Dr. KH. Kholilurrahman, S.H. M.Si.- H.Sukriyanto	3.891	Sesuai
03	Muhammad Baqir Aminatullah- Taufadi, S.H.I	5.902	Sesuai

71) Bahwa saksi Pemohon saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Pademawu tidak membubuhi tanda tangan, yang tercatat dalam Form D Kejadian Khusus tanggal 29 November 2024 yang pada intinya saksi Pemohon tidak menandatangani Form Model D. Hasil Kecamatan Pademawu tanpa ada alasan yang jelas.

72) Bahwa walaupun Pemohon saksinya tidak menda tangani Form Model D. Hasil Kecamatan Pademawu tetap Termohon sampaikan suara yang benar berdasarkan rekapitulasi tingkat Kecamatan Pademawu **[Bukti T - 14]** untuk Pilbup Pamekasan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai D. Hasil Pada Kecamatan Pademawu Tanggal 29 November 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	Keterangan
		D. Hasil Hasil Kecamatan	
01	Dr. Ir. Fattah Jasin, MS- RP Ahmad Mujahid Ansori	236	Sesuai
02	Dr. KH. Kholilurrahman, S.H. M.Si.- H.Sukriyanto	1.212	Sesuai
03	Muhammad Baqir Aminatullah- Taufadi, S.H.I	1.237	Sesuai

73) Bahwa saat rekapitulasi tingkat kecamatan batumarmar saksi Pemohon tidak tanda tangan di Form Model D. Hasil Kecamatan Batumarmar yang dituangkan dalam Form Model D Kejadian Khusus, namun saksi Pemohon tidak juga menanda tangani Form Model D. Kejadian Khusus tanpa ada alasan yang jelas.

74) Bahwa berdasarkan Formulir D. Hasil Kecamatan Batumarmar **[Bukti T - 15]** pada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai D.Hasil Pada Kecamatan Batumarmar Tanggal 29 November 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	Keterangan
		D. Hasil Hasil Kecamatan	
01	Dr. Ir. Fattah Jasin, MS- RP Ahmad Mujahid Ansori	36	Sesuai
02	Dr. KH. Kholilurrahman, S.H. M.Si.- H.Sukriyanto	4.478	Sesuai
03	Muhammad Baqir Aminatullah- Taufadi, S.H.I	3.920	Sesuai

I.3 *MONEY POLITIC* (POLITIK UANG) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024

75) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang termuat dalam halaman 23 yang pada intinya menyatakan:

“....dugaan pelanggaran politik uang (money politic), yang diduga oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan Tim Suksesnya yang membagikan amplop berisi uang dan stiker. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2. Peristiwa ini telah dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu....”

“ ... terhadap pelanggaran money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut telah diputus oleh Bawaslu....”

Tanggapan Termohon

76) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf p UU No.8/2015 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 13

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

77) Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf d UU No. 10/ 2016 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 30

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

D. Menyampaikan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang.

78) Bahwa kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf d yang berbunyi;

Pasal 135

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) merupakan:

c. tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

79) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya praktik *money politic* yang diduga oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan Tim Suksesnya yang membagikan amplop berisi uang dan stiker tidak menjadi ranah Termohon untuk menindaklanjuti, namun pada saat proses pemungutan suara pada tingkat TPS yang ada di Kabupaten Pamekasan, Termohon telah menyampaikan bahwa rekapitulasi pada Tingkat TPS hingga Kabupaten telah berjalan dengan lancar;

80) Bahwa terhadap laporan Nomor: 004/PL/PB/KAB/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang telah disampaikan oleh Pemohon, belum terdapat adanya putusan resmi terhadap laporan tersebut. Sehingga dengan adanya suatu perkara yang belum *inkracht,* tidak dapat dijadikan dasar ataupun alasan bagi Pemohon untuk mendalilkan hal tersebut, sebagaimana sesuai dengan asas praduga tidak bersalah *(presumption of Innocence);*

81) Bahwa sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, dalil yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi, dengan demikian Termohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

I.4 PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA PADA PILBUP PAMEKASAN 2024 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024

82) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 23 yang pada intinya mendalilkan pada pokoknya:

".. terdapat Kepala Desa yang melanggar netralitas dengan secara terang-terangan yang melanggar netralitas dengan secara terang - terangan mendukung Pasangan Calon Nomor urut 02 yang bahkan dilakukan sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan.. Dst.."

TANGGAPAN TERMOHON

83) Bahwa apa yang Pemohon dalilkan mengenai adanya pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam melakukan kampanye pada Pilbup Pamekasan 2024 Pamekasan tahun 2024. Dalil yang dimohonkan Pemohon tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pelanggaran. Karena apa yang Pemohon dalilkan hanya berupa laporan saja yang tidak disertai dengan keputusan yang sah oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan adalah tidak berdasar;

84) Bahwa secara normatif sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU No. 10/2016 pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 70

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

85) Bahwa sebagaimana uraian Pasal di atas, Kepala Desa tidak dilarang untuk melakukan kampanye, selama memiliki izin kampanye sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan Pasal tersebut. Karena dalam hal ini Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas apakah Kepala Desa dalam permohonan *a quo* memiliki izin atau tidak dalam ikut serta kampanye. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan pada Permohonannya adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak atau tidak dapat menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

I.5 PELANGGARAN PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI SATU KALI PADA PILBUP PAMEKASAN 2024 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024

86) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 24 yang pada intinya mendalilkan adanya tindakan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 4 Desa Tebul Timur, TPS 8 Desa Waru Timur, TPS 5 Desa Panaan dan TPS 7 Desa Blaban;

Tanggapan Termohon

87) Bahwa apa yang Pemohon dalilkan terkait pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS sebagaimana yang diuraikan Pemohon merupakan dalil yang tidak memiliki dasar yang jelas. Karena terhadap bukti yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya berupa video **[*vide* Bukti P-108 s/d P-111]** masih membutuhkan validasi dari keterangan ahli terkait kejelasan bukti-bukti video tersebut;

88) Bahwa karena, Bukti video yang diuraikan oleh Pemohon dapat dimungkinkan adalah berupa video rekayasa atau video yang telah diedit oleh Pemohon yang seolah-olah bukti tersebut menunjukkan adanya orang yang telah mencoblos lebih dari satu kali. Sedangkan saat proses pemungutan suara, pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon di atas berjalan dengan lancar. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya keberatan atau catatan Form Model C. Kejadian Khusus;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

89) Bahwa selanjutnya, Termohon jelaskan sebagaimana dokumen Form Model C. Hasil pada TPS 4 Desa Tebul Timur, TPS 8 Desa Waru Timur, TPS 5 Desa Panaan dan TPS 7 Desa Blaban, saksi dari Pemohon membubuhi tanda tangan. Dalam hal ini dapat diartikan, bahwa Pemohon telah setuju terhadap perolehan hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS yang Pemohon permasalahkan dan Pengawas TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak ada saran perbaikan dan/atau rekomendasi;

90) Bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan adanya perselisihan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, Termohon sampaikan suara yang benar menurut hasil penghitungan Termohon **[Bukti T - 16]** adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Tps Sesuai C. Hasil Pada Pilbup Pamekasan Tahun 2024

No	TPS	Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3
Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan				
1.	4	6 suara	458 suara	29 suara
Desa Waru Timur Kecamatan Waru				
2.	8	1 suara	99 suara	288 suara
Desa Panaan Kecamatan Palengaan				
3.	5	7 suara	341 suara	151 suara
Desa Blaban Kecamatan Batumarmar				
6.	7	0 suara	570 suara	1 suara

91) Bahwa selanjutnya Termohon sampaikan, perhitungan terhadap perolehan suara pada TPS - TPS yang disebutkan diatas, sama sekali dari saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan atas hasil perolehan suara yang dimuat dan ditulis pada Form Model C. Hasil Tingkat TPS, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak didasarkan pada bukti yang valid. Sehingga patut sekiranya Mahkamah untuk menolak permohanan Pemohon.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

I.6 TENTANG ADANYA INTIMIDASI DAN PENGUSIRAN TERHADAP SAKSI PASLON NOMOR URUT 3 YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PADA PILBUP PAMEKASAN 2024 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024.

92) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 44 yang pada intinya menyatakan adanya intimidasi yang dilakukan oleh KPPS kepada 33 orang saksi untuk menandatangani C. Hasil di beberapa TPS Kabupaten Pamekasan;

Tanggapan Termohon

93) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi oleh KPPS terhadap 33 orang saksi Pemohon di beberapa TPS yang didalilkan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar. Karena Pemohon dalam Permohonannya tidak mampu menguraikan secara jelas dan detail mengenai dalil tersebut. Sehingga apa yang Pemohon sampaikan dalam Permohonannya tidak jelas bagaimana tindakan intimidasi yang diduga dilakukan oleh KPPS di beberapa TPS yang Pemohon permasalahkan;

94) Bahwa apabila 33 orang saksi dari Pemohon merasa terintimidasi, seharusnya saksi-saksi dari Pemohon tersebut menyatakan keberatan yang dituangkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) PKPU 17/2024 yang menyatakan sebagai berikut:

"..saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani C. Hasil, wajib dicatat sebagai dalam Form C. Kejadian Khusus yang sertai dengan alasan.."

95) Namun pada faktanya, berdasarkan Form Model C. Hasil yang dimiliki oleh Termohon, saksi-saksi yang Pemohon dalilkan yang merasa diintimidasi oleh KPPS, sama sekali tidak ada yang menyatakan keberatan dalam Form Model C. Kejadian Khusus dan saksi-saksi Pemohon tersebut juga tetap menandatangani hasil Form Model C. Hasil KWK Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

96) Bahwa sebagaimana uraian di atas terhadap dalil Pemohon terkait adanya intimidasi terhadap 33 orang saksi Pemohon adalah tidak jelas dan mendasar. Karena ketidakjelasan uraian dan bukti yang Pemohon sampaikan pada Permohonannya tidak dapat dibuktikan. Sehingga, apa yang Pemohon dalilkan hanyalah asumsi belaka. Maka dari itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

I.7 TENTANG PEMILIH YANG SUDAH MERANTAU DAN KERJA KE LUAR NEGERI YANG TERDAFTAR DALAM DPT, NAMUN DIGUNAKAN OLEH OKNUM TERTENTU UNTUK PENCOBLOSAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA.

97) Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 46 yang menyatakan sebagai berikut:

> "*...Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Pamekasan, fakta yang terjadi banyak orang yang sudah merantau atau kerja ke luar negeri digunakan oleh orang lain untuk mencoblos dalam pilkada kabupaten Pamekasan, kejadian ini terjadi di beberapa TPS yang tersebar sebagai berikut:..*"

Tanggapan Termohon

98) Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada Permohonanya sebagaimana uraian di atas, tidak memiliki dasar dan kejelasan dalam permohonannya. Karena Pemohon tidak mampu menguraikan permohonannya dengan jelas dan lengkap serta tidak mampu untuk mencantumkan bukti yang jelas. Pemohon dalam buktinya hanya menunjukkan surat keterangan merantau tanpa adanya bukti kuat bahwa masyarakat yang merantau tersebut benar-benar tidak menggunakan hak pilihnya dan hak pilihnya digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;

99) Bahwa Termohon menegaskan, dapat dimungkinkan masyarakat yang memiliki hak pilih namun merantau tetap menggunakan hak pilihnya, karena besarnya partisipasi masyarakat dalam Pilbup Pamekasan Tahun 2024. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan tersebut masih

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

memerlukan validasi lebih lanjut terkait penggunaan hak pilih masyarakat yang sedang merantau. Hal ini juga dibuktikan dengan terisi penuhnya daftar hadir di tiap-tiap TPS yang Permohon permasalahkan;

100) Bahwa selain itu, Pemohon menarasikan Permohonannya pada halaman 45 poin G “Pemilih yang sudah merantau ke luar negeri yang terdaftar dalam DPT, Namun digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan pencoblosan surat suara dalam pemungutan suara” tidak menyertakan locus secara spesifik, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan sudah sepatutnya ditolak.

101) Bahwa lebih lanjut Pemohon dalam permohonannya menarasikan pada halaman 48 tentang kehadiran melebihi jumlah DPT dan ada yang tidak hadir yang terjadi pada TPS 1 Desa Prekbun, TPS 1 Desa Lesong Laok dan TPS 6 Desa Dasok.

102) Bahwa atas dalil tersebut Termohon menolak dengan tegas atas narasi Pemohon tersebut diatas, dalam hal ini tampak jika Pemohon tidak memahami perihal macam-macam daftar pemilih dalam Pilbup Pamekasan 2024.

103) Bahwa pada kesempatan ini Termohon sampaikan macam-macam pemilih /Warga Negara Indonesia yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya, sebagaimana Pasal 1 angka 19 - 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, diantaranya:

a. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun saat pemungutan suara,
b. Pemilih Pindahan adalah Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dan dicatat dalam daftar Pemilih pindahan.
c. Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun memenuhi syarat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.

104) Bahwa Pemohon yang mempermasalahkan di TPS 1 Desa Prekbun, TPS 1 Desa Lesong Laok dan TPS 6 Desa Dasok karena adanya pemilih yang melebihi dari jumlah DPT adalah hal yang wajar dalam setiap pemilihan termasuk yang terjadi di TPS yang Pemohon persoalkan, disebabkan pada TPS yang Permohon permasalahkan tersebut memang ada pemilih tambahan dan pemilih pindahan dengan rincian sebagai berikut **[Bukti T - 17]**:

Tabel 9: TPS-TPS objek perkara yang dipermasalahkan oleh Pemohon karena adanya jumlah pengguna pemilih diatas jumlah DPT

Pengguna Hak Pilih	Laki-laki	Perempuan	Total
Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	TPS 1 Desa Prekbun: 191	224	416
	TPS 1 Desa Lesong laok: 260	297	557
	TPS 6 Desa Dasok: 278	282	560
Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan	TPS 1 Desa Prekbun: -	-	-
	TPS 1 Desa Lesong laok: -	-	-
	TPS 6 Desa Dasok: -	-	-
Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan	TPS 1 Desa Prekbun: 2	1	3
	TPS 1 Desa Lesong laok	2	3
	TPS 6 Desa Dasok:-	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih	TPS 1 Desa Prekbun: 193	225	418
	TPS 1 Desa Lesong laok: 262	300	562
	TPS 6 Desa Dasok: 278	283	561

105) Bahwa dengan adanya pemilih yang lebih dari jumlah DPT pada TPS yang Pemohon permasalahkan tidak bertentangan dengan ketentuan pemungutan dan penghitungan surat suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, sehingga sudah sepatutnya dalil Pemohon ditolak seluruhnya;

106) Bahwa selanjutnya, terhadap kurangnya atau tidak lengkapnya bukti dan uraian Pemohon sebagaimana Permohonan *a quo,* dalil yang diajukan Pemohon dapat dikatakan hanyalah asumsi Pemohon tanpa bukti yang jelas dan tidak berdasar. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

I.8 TANGGAPAN TERMOHON ATAS PEMOHON YANG MEMINTA UNTUK DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PILBUP PAMEKASAN TAHUN 2024.

107) Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang termuat pada halaman 48 sebagaimana dalam petitumnya menyatakan yang pada intinya memerintahkan pada Termohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pilbup Pamekasan Tahun 2024 yang disupervisi oleh KPU RI.

Tanggapan Termohon

108) Bahwa pada faktanya, pelaksanaan Pilbup Pamekasan tahun 2024 sama sekali tidak terdapat satupun kondisi ataupun peristiwa hukum yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Karena tidak terdapat pembukaan kotak suara yang dilakukan dengan melawan hukum, tidak terdapat KPPS yang meminta pemilih untuk memberikan tanda khusus pada surat suara yang sudah digunakan, tidak terdapat KPPS yang merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan, tidak terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, dan tidak terdapat satupun pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

109) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya laporan serta rekomendasi panwaslu ataupun bawaslu yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kondisi-kondisi hukum tersebut. Bahkan Pemohon melalui saksinya sama sekali tidak mengajukan keberatan ataupun kejadian khusus terkait kondisi-kondisi khusus.;

110) Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan, saksi dari Pemohon memang telah mengajukan keberatan pada tanggal 5 Desember 2024 yang tertuang pada Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat Kabupaten Pamekasan (**Bukti T - 18**). Namun, dalam keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon, tidak berkaitan dengan adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 telah berlangsung dengan demokratis dan konstitusional tanpa terdapat satupun ketentuan hukum yang dilanggar;

111) Bahwa oleh karenanya, sama sekali tidak terdapat landasan hukum argumentatif bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Pilbup Pamekasan Tahun 2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya;

112) Bahwa dengan demikian, hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 **[Bukti T-3]** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kabupaten Sesuai D.Hasil Kabupaten Pamekasan Tanggal 5 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	**Dr. Ir. Fattah Jasin, MS- RP Ahmad Mujahid Ansori**	**17.307**
02	**Dr. KH. Kholilurrahman, S.H. M.Si.- H.Sukriyanto**	**291.246**
03	**Muhammad Baqir Aminatullah- Taufadi, S.H.I**	**263.740**

113) Bahwa berdasarkan seluruh paparan dan uraian tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* telah membuktikan bahwasanya dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya adalah tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan 2024, tanggal 5 Desember Tahun 2024 Pukul 01.00 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN PAMEKASAN UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Dr. Ir. Fattah Jasin, MS - RP Ahmad Mujahid Ansori	17.307 Suara
02	Dr. KH. Kholilurrahman, S.H. M.Si. - H.Sukriyanto	291.246 Suara
03	**Muhammad Baqir Aminatullah - Taufadi, S.H.I (Pemohon)**	**263.740 Suara**
Total Suara Sah		**572.293 Suara**

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-28 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Prihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor: 841 Tahun 2024 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pamekasan dalam Penyelenggraaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA tanggal 5 Desember 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 115/PL.01.2- BA/3528/2024 Rekapitulasi Pemetaan TPS Data Pemilihan Hasil Sinkronisasi Tingkat Kabupaten pamekasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun tanggal 30 Mei 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor: 826 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara (DPS) Kabupaten Pamekasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 tanggal 11 Agustus 2024.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 146/PL.02.1-BA/3528/2024 Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara Tingkat Kabupaten Pamekasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Penguguman Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kelurahan/Desa di Kabupaten Pamekasan.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Belum Meninggal atas nama Lima tanggal 13 Januari 2025.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. HASIL KWK-BUPATI Pada Desa-desa di Kecamatan Pegantenan tanggal 27 November 2024 sebagai berikut:
    1. TPS 4 Desa Desa Pasanggar;
    2. TPS 5 Desa Pasanggar;
    3. TPS 6 Desa Desa Palesanggar;
    4. TPS 8 Desa Desa Palesanggar;
    5. TPS 13 Desa Desa Palesanggar;
    6. TPS 3 Desa Tebul Timur;
    7. TPS 2 Desa Bulangan Barat;
    8. TPS 1 Desa Bulangan Timur;
    9. TPS 15 Desa Tanjung.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Pegantenan pada Kabupaten Pamekasan tanggal 29 November 2024.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Model C. HASIL KWK-BUPATI tanggal 27 November 2024 Kabupaten Pamekasan.
    1. TPS 1 Desa Mapper Kecamatan Proppo;
    2. TPS 14 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan;
    3. TPS 1, TPS 4, TPS 6 Desa Dasok Kecamatan Pademawu;
    4. TPS 1 Desa Lesong Laok Kecamatan Batumarmar;
    5. TPS 3 Desa Pataon Laok Kecamatan Palengaan.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Bukti Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 Desa Mapper Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Proppo Pada Kabupaten Pamekasan tanggal 29 November 2024.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Palengaan Pada Kabupaten Pamekasan tanggal 29 November 2024.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Pademawu Pada Kabupaten Pamekasan tanggal 29 November 2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan tanggal 29 November 2024.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. HASIL-KWK-BUPATI tanggal 27 November 2024 Kabupaten Pamekasan
    1. TPS 4 Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan;
    2. TPS 8 Desa Waru Timur Kecamatan Waru;
    3. TPS 5 Desa Panaan Kecamatan Palengaan;
    4. TPS 7 Desa Blaban Kecamatan Batumarmar.
17. Bukti T-17 : Kumpulan Model C. HASIL-KWK-BUPATI tanggal 27 November 2024 Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:
    1. TPS 1 Desa Prekbun;
    2. TPS 1 Desa Lesong Laok;
    3. TPS 6 Desa Dasok.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.00 WIB.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat pernyataan Kepala Dusun Dadak Timur Desa Palesanggar tanggal 14 Januari 2025.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat pernyataan Kepala Dusun Dadak barat Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-BUPATI tanggal 27 November 2024 Kabupaten Pamekasan Kecamatan Pegantenan Desa Palesanggar TPS 006.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Daftar Surat Masuk KPU Kabupaten Pamekasan.
24. Bukti T-24 : Kumpulan Dokumen Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024:
    1. Model BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON. KWK Calon Bupati atas nama KH. Kholilulrahman tertanggal 27 Agustus 2024;
    2. Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Nomor 289 atas nama KH. Kholilulrahman tertanggal 12 Mei 1981;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

3. Surat Keterangan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Malang Nomor: B-702/Ma.13.25.01/PP.01.1/08/2024 tertanggal 12 Agustus 2024;
4. Model BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON. KWK Calon Wakil Bupati atas nama Sukriyanto tertanggal 27 Agustus 2024;
5. Model BA.KLARIFIKASI.KWK Berita Acara nomor 185/PL.02.2-BA/3528/2024 Tanggal 05 September 5 2024.

25. Bukti T-25 : Kumpulan Model C.HASIL.KWK BUPATI:
    1. TPS 001 Lesong Laok, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
    2. TPS 002 Lesong Laok, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
    3. TPS 003 Lesong Laok, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
    4. TPS 004 Lesong Laok, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
    5. TPS 009 Pasanggar, Kecamatan Pegantenan tanggal 27 November 2024;
    6. TPS 001 Lesong Daja, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
    7. TPS 017 Plakpak, Kecamatan Pegantenan tanggal 27 November 2024;
    8. TPS 002 Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024.
26. Bukti T-26 : Kumpulan Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK:
    1. TPS 009 Desa Blaban Kecamatan Batumarmar;
    2. TPS 010 Desa Bujur Timur Kecamatan Batumarmar;
    3. TPS 002 Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar;
    4. TPS 009 Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar.
27. Bukti T-27 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi:
    - Kecamatan Batumarmar.
    - Kecamatan Pegantenan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

28. Bukti T-28 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. HASIL.KWK BUPATI:

1. TPS 001 Bangsereh, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
2. TPS 001 Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
3. TPS 010 Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
4. TPS 004 Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
5. TPS 005 Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
6. TPS 006 Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
7. TPS 007 Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
8. TPS 009 Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
9. TPS 001 Blaban, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
10. TPS 002 Blaban, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
11. TPS 004 Blaban, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
12. TPS 005 Blaban, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
13. TPS 006 Blaban, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
14. TPS 007 Blaban, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
15. TPS 009 Blaban, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
16. TPS 002 Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
17. TPS 003 Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

18. TPS 004 Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
19. TPS 005 Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
20. TPS 006 Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
21. TPS 007 Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
22. TPS 009 Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
23. TPS 010 Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
24. TPS 011 Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
25. TPS 012 Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
26. TPS 013 Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
27. TPS 014 Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar tanggal 27 November 2024;
28. TPS 003 Tanjung, Kecamatan Pademawu tanggal 27 November 2024;
29. TPS 004 Tanjung, Kecamatan Pademawu tanggal 27 November 2024;
30. TPS 006 Tanjung, Kecamatan Pademawu tanggal 27 November 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 10 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Moh. Syahid Hasbullah

- Saksi merupakan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di Kecamatan Pegantenan.
- Saksi menerangkan bahwa Kecamatan Pegantenan memiliki 113 TPS.

- Saksi menerangkan bahwa semua saksi mandat pasangan calon di TPS telah menandatangani rekapitulasi tanpa catatan khusus.
- Saksi menerangkan bahwa pada tingkat kecamatan, saksi dari Pasangan Calon Nomor 1 dan Pasangan Calon Nomor 2 menandatangani rekapitulasi, sedangkan saksi dari Pasangan Calon Nomor 3 menolak menandatangani tanpa alasan yang jelas, hanya menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan perintah dari tim.
- Saksi menerangkan bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor 3 (Haderi) tidak mengisi formulir D.Keberatan-KWK dan langsung meninggalkan tempat setelah proses rekapitulasi selesai.
- Saksi menerangkan bahwa pelaksanaan Pemilukada berlangsung kondusif tanpa adanya kejadian luar biasa.
- Saksi menerangkan bahwa pemilih di TPS hadir dengan membawa Model C.Undangan dan KTP sebagai syarat untuk memberikan suara.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ditemukan kasus pemilih yang menggunakan Model C.Undangan lebih dari satu kali untuk mencoblos.
- Saksi menerangkan hasil perolehan suara sebagai berikut:

  TPS 4, Dusun Tacuk, Desa Palesanggar (TPS tempat saksi memilih):

  - Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 1 suara.
  - Pasangan Calon Nomor 2 memperoleh 146 suara.
  - Pasangan Calon Nomor 3 memperoleh 240 suara dan menjadi pemenang di TPS ini.

  Hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pegantenan:

  - Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 485 suara.
  - Pasangan Calon Nomor 2 memperoleh 27.402 suara dan menjadi pemenang di kecamatan ini.
  - Pasangan Calon Nomor 3 memperoleh 22.912 suara.
  - Jumlah suara tidak sah sebanyak 682 suara.

2. Hasan Basri

- Saksi merupakan PPK di Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
- Saksi menerangkan bahwa jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Batumarmar sebanyak 109 TPS.

- Saksi menerangkan bahwa dirinya memberikan suara di TPS 3, Desa Pangereman.
- Saksi menerangkan bahwa pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak di TPS 3 dan keseluruhan Desa Pangereman adalah Paslon 03.
- Saksi menerangkan bahwa pada tingkat TPS, semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi tanpa ada keberatan atau kejadian khusus.
- Saksi menerangkan bahwa pada tingkat kecamatan, saksi dari Paslon 03 menolak menandatangani hasil rekapitulasi.
- Saksi menerangkan bahwa alasan penolakan tersebut disebabkan oleh adanya beberapa TPS dengan tingkat kehadiran pemilih mencapai 100%, meskipun sebelumnya tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Paslon 03 di TPS maupun di Panwas Kecamatan.
- Saksi menerangkan bahwa keberatan tersebut hanya diajukan di tingkat kecamatan tanpa menyebutkan secara spesifik TPS mana saja yang dimaksud.
- Saksi menerangkan bahwa keberatan tersebut telah dicatat dalam Formulir D.Kejadian Khusus.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada laporan atau keberatan resmi dari saksi pasangan calon 01, 02, dan 03, Panwas TPS, maupun Panwas Kecamatan terkait dugaan pelanggaran atau kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.
- Saksi menerangkan bahwa hasil akhir perolehan suara di Kecamatan Batumarmar adalah sebagai berikut:
  - Paslon 01 memperoleh 310 suara.
  - Paslon 02 memperoleh 32.923 suara dan menjadi pemenang di kecamatan ini.
  - Paslon 03 memperoleh 21.203 suara.

3. Mohammad Maftuh

- Saksi merupakan KPPS di TPS 6, Desa Palesanggar.
- Saksi menerangkan bahwa semua saksi pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi di TPS 6, serta tidak ada keberatan atau catatan khusus yang diajukan oleh saksi pasangan calon selama proses rekapitulasi.

- Saksi menerangkan bahwa terdapat permintaan dari saksi pasangan calon agar tanda tangan dilakukan sebelum pengisian dan pemeriksaan hasil rekapitulasi selesai. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh KPPS dengan alasan bahwa tanda tangan baru dapat dilakukan setelah seluruh proses rekapitulasi selesai.
- Saksi menerangkan bahwa jumlah pemilih terdaftar di TPS 6 sebanyak 557 orang.
- Saksi menerangkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di TPS 6 mencapai 100%, di mana seluruh pemilih yang terdaftar hadir untuk menggunakan hak suaranya.
- Saksi menerangkan bahwa seluruh pemilih yang hadir membawa C6 (undangan memilih) dan KTP sebagai syarat untuk memberikan suara.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ditemukan laporan atau indikasi adanya pemilih fiktif, seperti pemilih yang telah meninggal dunia atau merantau tetapi tetap tercatat memberikan suara.
- Saksi menerangkan bahwa dirinya memastikan bahwa semua pemilih dalam DPT masih hidup dan hadir secara langsung di TPS untuk menggunakan hak pilihnya.
- Saksi menerangkan bahwa dalam pemungutan suara di TPS 6 tidak ada penggunaan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) atau DPK (Daftar Pemilih Khusus).
- Saksi menerangkan bahwa hasil perolehan suara di TPS 6 adalah sebagai berikut:
  - Paslon 01 memperoleh 5 suara.
  - Paslon 02 memperoleh 406 suara dan menjadi pemenang di TPS ini.
  - Paslon 03 memperoleh 138 suara.

4. A. Tajul Arifin

- Saksi merupakan Anggota KPU, Divisi Teknis.
- Saksi menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menghapus sekitar 10.200 pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat lainnya.

- Saksi menerangkan bahwa setelah pemutakhiran, jumlah DPT mengalami perubahan dari 676.308 pemilih pada Pemilu menjadi 666.048 pemilih pada Pilkada.
- Saksi menerangkan bahwa penetapan DPT dilakukan pada 19 September dan dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon tanpa ada keberatan yang diajukan.
- Saksi menerangkan bahwa undangan memilih (C.6-KWK) telah terdistribusi kepada sekitar 87% pemilih.
- Saksi menerangkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Pamekasan mencapai 87%, sebagaimana dikonfirmasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon terkait penetapan DPT.
- Saksi menerangkan bahwa Kabupaten Pamekasan merupakan satu-satunya kabupaten di Madura yang tidak melaksanakan PSU, berbeda dengan Kabupaten Sumenep, Sampang, dan Bangkalan.
- Saksi menerangkan bahwa Paslon 03 menyampaikan keberatan sejak awal rekapitulasi tingkat kabupaten, dan keberatan tersebut telah dicatat dalam Formulir D.Kejadian Khusus Kabko.
- Saksi menerangkan bahwa alasan keberatan Paslon 03 adalah karena mereka telah melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu pada 29 November 2024, namun tidak mendapat tanggapan hingga rekapitulasi berlangsung.
- Saksi menerangkan bahwa KPU telah melakukan klarifikasi terhadap 55 TPS yang dianggap bermasalah dengan melakukan verifikasi melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- Saksi menerangkan bahwa alasan daftar hadir tidak mencapai 100% adalah karena banyak pemilih di Madura yang enggan menandatangani daftar hadir, sehingga panitia TPS hanya memberikan tanda centang pada daftar hadir sebagai pengganti tanda tangan.
- Saksi menerangkan bahwa KPU menegaskan bahwa seluruh proses ini terjadi dengan sepengetahuan saksi pasangan calon dan pengawas TPS.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

- Saksi menerangkan bahwa KPU hanya mewajibkan ijazah terakhir yang paling rendah adalah ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang menggantikan PKPU Nomor 8 Tahun 2017.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada kewajiban bagi calon kepala daerah untuk menyerahkan ijazah pendidikan tingkat dasar (SD atau SMP), sehingga ijazah yang diverifikasi oleh KPU hanya ijazah SMA dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) dinyatakan: *"Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan* ***mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan****"*.
2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan: *"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah*

perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

3) Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menegaskan bahwa perselisihan hasil Pemilihan berkaitan dengan penetapan perolehan suara Pemilihan yang signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka agar tidak semua hasil Pemilihan dapat diajukan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur ambang batas terhadap hasil Pemilihan yang dapat diajukan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk Pemilihan Bupati dan Walikota, terkait ambang batas akan dijelaskan Pihak Terkait pada Eksepsi Tentang Kedudukan Pemohon.

4) Bahwa ketentuan Pasal 156 dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan batas-batas kewenangan Mahkamah yang ditentukan oleh undang-undang dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan, meskipun Mahkamah memiliki kedudukan sebagai penguji undang-undang, namun dalam perkara *a quo* kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana undang-undang, maka Mahkamah tidak mungkin akan melanggar batas-batas kewenangan yang ditentukan undang-undang untuk "memaksa" memeriksa dan mengadili berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, antara lain:

   a. Pemilih yang sudah meninggal dunia dan terdaftar dalam DPT, namun digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan pencoblosan surat suara dalam pemungutan suara.
   b. Terjadinya pelanggaran money politic (politik uang) yang dilakukan oleh calon Wakil Bupati Nomor Urut 2.
   c. Pelanggaran netralitas oleh kepala desa.
   d. Pelanggaran berupa pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

e. Adanya kejadian nama pemilih yang menggunakan haknya berdasarkan DPT, ternyata sudah meninggal dunia sebelum tanggal 27 Nopember 2024.
f. Adanya pelanggaran berupa intimidasi dan pengusiran terhadap saksi paslon nomor urut 3 yang dilakukan oleh panitia.
g. Pemilih yang sudah merantau dan bekerja ke luar negeri yang terdaftar dalam DPT, namun digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan pencoblosan surat suara dalam pemungutan suara.
h. Tingkat kehadiran Pemilih 100% dan ada yang tidak tanda tangan serta tanda tangan di daftar hadir diduga dilakukan oleh satu orang, karena tandatangannya sama.

Bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas bukan objek perselisihan hasil pemilihan dan bukan dalam kualifikasi ruang lingkup kewenangan Mahkamah, tetapi merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan Sentra Gakkumdu sebagai pranata hukum yang diberikan kewenangan untuk menangani pelanggaran Pemilihan, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran tindak pidana pemilihan.

5) Bahwa setelah mencermati pokok permohonan Pemohon, tidak ada satu dalil posita pun yang mendalilkan terkait dengan penetapan perolehan hasil Pemilihan yang menjadi objek perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 (*vide* Bukti PT-7), namun hanya menarasikan pelanggaran-pelanggaran yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan perolehan suara, dan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut telah ditangani dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan sebagai pranata hukum yang memiliki kewenangan untuk menangani dan memproses pelanggaran pemilihan.
6) Bahwa terhadap pemeriksaan obyek perkara perselisihan hasil Pemilihan, Mahkamah masih tetap konsisten tidak memeriksa dan mengadili permohonan diluar perselisihan penetapan perolehan hasil

perolehan suara. Hal mana dapat dilihat dan dibaca sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 106/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 26 Januari 2016, halaman 75 yang berbunyi:

"...Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul nerupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain".

7) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, halaman 65 sampai dengan halaman 66 dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"*Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampai kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur,*

bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara yang demokratis (constitutional democratis state)".

8) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka dalil posita Pemohon terkait dengan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, sebagaimana tertuang pada angka 4 di atas, bukan merupakan kewenangan Mahkamah, tetapi merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan Sentra Gakkumdu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran Pemilihan, dan Mahkamah Konstitusi tidak mungkin akan memaksa dan mengambil alih kewenangan lembaga lain *in casu* Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan Sentra Gakkumdu.

   Bahwa berkenaan dengan penanganan pelanggaran dugaan politik uang, merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pemekasan bersama Sentra Gakkumdu. Dan fakta telah membuktikan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dalam kualifikasi politik uang sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) *jo* Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Maka sesungguhnya terhadap dalil permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili adanya dugaan politik uang, selain itu secara substansi pokok permohonan Pemohon tidak ada relevansinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka oleh karenanya tidak ada kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*. Sekalipun Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai penguji undang-undang, namun dalam perkara *a quo* Mahkamah berkedudukan sebagai pelaksana undang-undang.

9) Bahwa pokok permohonan Pemohon mendalilkan terhadap hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah, dan hanya mengangkat permasalahan yang bersifat *rubbish in election*, yang tidak dalam kualifikasi permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan, karena sesungguhnya permasalahan itu telah disediakan

prosedur dan mekanisme untuk menyelesaikannya serta telah disedikan pranata hukum yang memiliki kewenangan untuk itu. Pengujian kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* bukan dalam persidangan Mahkamah, namun sudah ada pranata hukum yang telah disediakan untuk menyelesaikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.

10) Bahwa secara hukum dari substansi posita permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan obyek perkara perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo,* dan selanjutnya Mahkamah menyatakan permohonan *a quo* ditolak seluruhnya.
11) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.2 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan: *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon"*.
2) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pemekasan Nomor 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 dan diumumkan oleh Termohon pada Hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 01.00 WIB (*vide* Bukti PT-7). Dengan demikian, batas akhir untuk mengajukan permohonan adalah pada Hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 00.00 WIB.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

3) Bahwa Pemohon mendalilkan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.34 WIB, maka dalil permohonan Pemohon salah atau tidak sinkron terkait dengan mencantumkan tanggal dan waktu penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, karena KPU Kabupaten Pamekasan tidak pernah menerbitkan keputusan tentang hasil penetapan pada tanggal 6 Desember 2024, tetapi Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 Tahun 2024 pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 01.00 WIB, dan bukan tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.34 WIB.
4) Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 3, halaman 3 dalam dalil Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan didalilkan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024. Fakta telah membuktikan bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan Keputusan Nomor 1209 Tahun 2024 tersebut.

   Bahwa berkenaan dengan penetapan hasil pemilihan, Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemekasan Tahun 2024, sedangkan Termohon tidak pernah menerbitkan Keputusan Nomor 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024. Maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon salah dan keliru serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
5) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 185/PAN.MK/e-AP3/12/2024, dan Keputusan Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 20.53 WIB.
6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon didasarkan pada keputusan Termohon yang tidak benar dan tidak berdasar, maka berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan hasil pemilihan, sehingga setidak-tidaknya tenggang waktu pengajuan permohonan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

1.3 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON *(LEGAL STANDING)*

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, dengan alasan:

1) Bahwa sebelum Pihak Terkait memberikan keterangan terkait dengan *legal standing* Pemohon, maka Pihak Terkait akan memberikan keterangan sebagai berikut:
   a. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 10 dalam dalil Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon mendalilkan dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.34 WIB.
   b. Bahwa fakta telah membuktikan, Termohon tidak pernah menerbitkan keputusan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka dalil permohonan Pemohon adalah salah dan tidak berdasar dan menyesatkan.
   c. Bahwa terkait dengan objek perselisihan hasil pemilihan, Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB. Jadi, Termohon tidak pernah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.34 WIB.
   d. Bahwa oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon terkait dengan kedudukan hukum Pemohon yang didasarkan pada objek perselisihan hasil pemilihan yang salah dan keliru, maka secara hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

2) Bahwa selanjutnya untuk menentukan Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam perkara *a quo*, maka harus memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai syarat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon.
3) Bahwa berkenaan dengan objek perselisihan hasil pemilihan, maka Termohon telah menerbitkan Keputusan Kabupaten Pamekasan Nomor Nomor 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB. (*vide* Bukti PT-7).
4) Bahwa berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagaimana Surat Nomor 470/1610/432.311/2024, Perihal: Data Penduduk Kabupaten Pamekasan, tanggal 12 Desember 2024, jumlah pendudukan Kabupaten Pamekasan sejumlah 889.798 jiwa (*vide* Bukti PT-8), maka persentase selisih perolehan suara sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa: *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota"*.
5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 (*vide* Bukti PT-7), telah ditetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. RB Fattah Yasin - RP. Mujahid Ansori	17.307 suara
2	KH. Kholilurrahman - Sukriyanto	291.246 suara

3	KH. Muhammad Baqir Aminatullah - Taufadi	263.740 suara
	Jumlah perolehan suara seluruhnya	**572.293 suara**

6) Bahwa jumlah perbedaan selisih perolehan suara yang menjadi ambang batas untuk dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah paling banyak sebesar 1 % dari seluruh perolehan suara sah pasangan calon. Jadi, syarat ambang batas untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan adalah 1% x 572.293 suara (total suara sah) = 5.722,93 suara (5.723 suara). Maka dengan demikian, selisih perolehan suara sebagai syarat ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 5.723 suara.
7) Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 263.740 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 291.246 suara, sehingga perbedaan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 291.246 suara - 263.740 suara = 27.506 suara suara atau sama dengan 4,81%. Dengan demikian perbedaan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan. Maka, oleh karena permohonan perselisihan hasil Pemilihan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga sudah beralasan menurut hukum permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
8) Bahwa berdasarkan penjelasan syarat formil pengajuan perselisihan hasil Pemilihan di atas, maka secara hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* dalam mengajukan perselisihan hasil Pemilihan *a quo*, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan didasarkan pada objek perselisihan hasil pemilihan yang salah *in casu* Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 1209 Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.34 WIB, sebab Termohon tidak pernah menerbitkan keputusan dimaksud.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

9) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka sudah beralasan menurut hukum, apabila permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS *(OBSCUUR LIBEL)*

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas *(obscuur libel)* dengan alasan:

1) Bahwa posita pokok permohonan harus disusun secara sistematis, sehingga dapat menjelaskan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar permohonan atau *fundamentum petendi* atau sebagai *grondslag van de lis* yang dijadikan dasar dan ruang lingkup pemeriksaan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Mahkamah. Maka, paling tidak dalam merumuskan *fundamentum petendi* terdapat 2 (dua) unsur yang menyertai dalam perumusan pokok permohonan, pertama bagian yang menguraikan tentang peristiwa yang terjadi *(feitelijke gronden)*, kedua bagian yang menguraikan tentang hukumnya atau hubungan hukum antara obyek perselisihan dengan pemohon sebagai dasar yuridis untuk petitum yang dimohonkan *(rechtelijke gronden)*. Berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak menemukan adanya hubungan hukum antara *feitelijke gronden* dengan dengan kedudukan Pemohon berkaitan dengan obyek perkara mengenai penetapan perolehan suara, sehingga pokok permohonan Pemohon tidak layak untuk dipertimbangkan menjadi sebuah pokok permohonan yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan dan kewenangan Mahkamah.
2) Bahwa setelah membaca pokok permohonan, maka menurut Pihak Terkait pokok permohonan tidak memenuhi kualifikasi *fundamentum petendi*, karena Pemohon tidak menguraikan peristiwa konkritanya *(feitelijke gronden)* dan tidak menguraikan tentang hukum atau regulasinya *(rechtelijke gronden)*, sehingga pokok permohonan Pemohon lebih bersifat narasi, asumsi dan opini, tanpa menguraikan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

fakta dan fakta hukum serta dasar hukumnya untuk dijelaskan dan diuraikan dalam *fundamentum petendi* posita permohonan Pemoho. Maka terlihat jelas bahwa pokok permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur *(obscuur libel)* yang akan diuraikan di bawah ini.

3) Bahwa Pemohon dalam mengajukan pembatalan objek perselisihan hasil pemilihan didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.34 WIB.

   Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon tidak pernah menerbitkan Keputusan Nomor 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.34 WIB. Maka dengan demikian, seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon didasarkan pada objek perselisihan hasil pemilihan yang tidak berdasar *in casu* Keputusan Termohon Nomor 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.34 WIB, maka sudah beralasan menurut hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

4) Bahwa meskipun pokok permohonan *a quo* didasarkan pada objek perselisihan hasil pemilihan yang salah dan tidak mendasar, namun Pihak Terkait akan memberikan keterangan dalam eksepsi disesuaikan antara dalil posita permohonan Pemohon dengan fakta dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, yang akan dijelaskan dan diuraikan di bawah ini.

5) Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada huruf A, halaman 8 sampai dengan 22 tidak menjelaskan dan menguraikan terkait dengan data Pemilih yang melakukan pencoblosan atas nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, karena dalam posita permohonan Pemohon hanya mendalilkan Pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak sinkron dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

selaras antara dalil permohonan dengan uraian dalam posita permohonan.

6) Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada huruf B, halaman 23 terkait dengan terjadinya pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, Pemohon berupaya mengaburkan fakta yang sebenarnya, karena Pemohon tidak menjelaskan pelanggaran itu dilakukan oleh siapa, terjadi dimana, apakah dalam jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan apakah yang melakukan terdaftar sebagai tim kampanye di KPU Kabupaten Pamekasan.

   Bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan, namun Pemohon tidak menjelaskan bentuk penerusan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, karena fakta telah membuktikan laporan pelanggaran yang didalilkan Pemohon telah dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu dan laporan pelanggaran tersebut bukan dalam kualifikasi pelanggaran politik uang.

7) Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada huruf C, halaman 23 terkait dengan pelanggaran netralitas kepala desa, Pemohon tidak menguraikan seperti apa bentuk pelanggaran netralitas kepala desa sebelum dan setelah penetapan pasangan calon, siapa nama kepala desanya, terjadi dimana, kapan, dan bentuk tindakan seperti apa netralitas kepala desa yang didalilkan Pemohon, apakah dalam masa kampanye atau tidak, sehingga dalil permohonan tersebut tidak jelas dan kabur.

   Bahwa Pemohon telah melaporkan terkait dengan netralitas kepala desa kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan, dan telah dilakukan kajian pelanggaran netralitas kepala desa dan telah diputuskan bahwa pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran netralitas kepala desa.

8) Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada huruf D, halaman 24 terkait dengan pelanggaran berupa Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan siapa

Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali tersebut dan terjadi di wilayah kecamatan apa, serta tidak dijelaskan jenis pemilihannya apa, apakah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan hanya asumsi, opini, dan persepsi Pemohon, karena fakta telah membuktikan bahwa seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan tidak ada saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon yang mengajukan keberatan dan menuangkan dalam Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati. Selain itu, dalam pelaksanaan pemungutan suara tidak ada temuan Pengawas TPS atau Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) atau Panwas Kecamatan terkait dengan dalil permohonan Pemohon, serta tidak ada rekomendasi Panwas Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

9) Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada huruf E, halaman 25 sampai dengan halaman 44 terkait dengan adanya kejadian nama Pemilih yang menggunakan haknya berdasarkan DPT, ternyata sudah meninggal dunia sebelum tanggal 27 Nopember 2024. Dalil permohonan Pemohon *a quo* hanya bersifat mengulang dalil yang sudah tertuang dalam dalil huruf A sebelumnya.

Bahwa urian dalil posita permohonan Pemohon hanya mendalilkan Pemilih yang meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, dan tidak menjelaskan dan menguraikan Pemilih yang didalilkan meninggal dunia digunakan untuk memilih. Jadi menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tersebut tidak sinkron dan selaras antara dalil pokok permohonan dengan urian posita permohonan.

Bahwa Pemohon dalam mendalilkan tidak menyebutkan siapa Pemilih yang meninggal dunia dan siapa yang menggunakan hak pilih atas nama Pemilih yang sudah meninggal dunia berdasarkan DPT, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon hanya pengulangan

dalil yang telah tertuang dalam huruf A, halaman 8 sampai dengan halaman 22, sehingga dalil permohonan tidak jelas apa maksud dan tujuan Pemohon dengan mengulang-ulang dalil yang secara substansi adalah sama.

Bahwa ketidakjelasan dalil permohonan Pemohon dapat dibuktikan bahwa di satu sisi Pemohon mendalilkan Pemilih yang sudah meninggal dunia digunakan untuk memilih, namun di sisi yang lain Pemohon hanya menguraikan dan menjelaskan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pamekasan. Maka menurut Pihak Terkait, sebenarnya Pemohon mau mendalilkan apa, apakah hanya berkaitan dengan Pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT ataukah Pemilih yang sudah meninggal dunia digunakan untuk memilih. Sebab jika hanya mendalilkan Pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT, tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan masing-masing pasangan calon, kecuali Pemilih yang sudah meninggal dunia digunakan untuk memilih. Namun, dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, saksi Pemohon dan saksi pasangan calon yang lain semua menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada keberatan saksi Pemohon yang dituangkan dalam Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi, serta tidak ada temuan bahkan rekomendasi dari Panwas Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan surat suara ulang atau rekapitulasi ulang.

10) Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada huruf F, halaman 44 dan halaman 45 terkait dengan adanya pelanggaran berupa intimidasi dan pengusiran terhadap saksi Paslon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh Panitia, namun Pemohon tidak menjelaskan secara rinci bentuk intimidasinya seperti apa, dilakukan oleh siapa, apakah KPPS atau Pengawas TPS atau Linmas, sehingga dalil Pemohon dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka jika dalil permohonan Pemohon hanya mendalilkan adanya intimidasi dan pengusiran oleh

Panitia, menurut Pihak Terkait dalil permohonan tersebut hanya bersifat asumsi dan opini yang tidak berdasar, karena fakta telah membuktikan seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, sehingga jika terjadi pengusiran saksi dapat dipastikan saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon tidak menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.

11) Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada huruf G, halaman 45 dan halaman 46 terkait dengan Pemilih yang sudah merantau dan bekerja ke luar negeri yang terdaftar dalam DPT, namun digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan pencoblosan surat suara dalam pemungutan suara, namun Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan siapa Pemilih yang melakukan pencoblosan surat suara dan terjadi di TPS mana saja, dan apakah terdapat Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati yang dibuat saksi Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dalil Pemohon hanya menjelaskan dan menguraikan adanya Pemilih yang sudah merantau atau bekerja di luar negeri saja, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon *a quo* hanya bersifat asumsi dan opini yang tidak layak untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.

    Bahwa daftar hadir merupakan turunan dari Salinan DPT, dan saksi Pemohon telah mendapatkan salinan DPT, maka saksi Pemohon dapat melakukan penelitian dan pengecekan terhadap Pemilih yang hadir di TPS, maka saksi Pemohon dapat melihat dan menandai Pemilih yang sudah hadir di TPS, dan apabila terdapat Pemilih yang meninggal dunia digunakan untuk memilih, seharusnya saksi Pemohon tahu, karena saksi Pemohon memegang DPT yang dijabarkan dalam daftar hadir.

12) Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada huruf H, halaman 46 dan halaman 48, Pemohon mendalilkan Pemilih yang sudah merantau dan bekerja ke luar negeri yang terdaftar dalam DPT, namun digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan pencoblosan surat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

suara dalam pemungutan suara, sedangkan dalam uraian posita permohonan Pemohon tidak mendalilkan sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo*, tetapi Pemohon mendalilkan terkait dengan kehadiran pemilih 100 % yang tidak ada tanda tangannya, dan di daftar hadir diduga ditandatangani oleh satu orang karena tanda tangannya sama semua, sehingga antara dalil permohonan dengan uraian posita permohonan tidak sinkron dan selaras, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur, yang dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Pemohon tidak menjelaskan peristiwa kejadiannya di wilayah kecamatan apa dan tingkat kehadiran pemilih 100% tersebut tidak disertai dengan penjelasan sebab dan akibat tingkat kehadiran Pemilih 100% dan tidak didukung data yang menjelaskan berapa jumlah Pemilih yang hadir di TPS-TPS untuk membuktikan tingkat kehadiran Pemilih 100%, berapa perolehan suara Pemohon dan perolehan suara masing-masing pasangan calon, karena jika Pemohon hanya mendalilkan tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak ada pelanggaran terkait dengan itu, apa salahnya tingkat kehadiran Pemilih 100% di TPS.
- Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan siapa saja Pemilih yang tidak ada tanda tangannya dan berapa jumlahnya, serta siapa saja Pemilih yang ditandatangani oleh satu orang dan berapa jumlahnya.
- Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah Pemilih yang melebihi jumlah DPT di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, terjadi di TPS mana saja, dan disebabkan karena apa sehingga Pemilih melebihi jumlah DPT, apakah ada Pemilih pindahan atau Pemilih tambahan yang melakukan pencoblosan di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon ataukah seperti apa peristiwa konkritnya.
- Pemohon tidak menjelaskan relevansinya antara tingkat kehadiran Pemilih 100% dengan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang lain, karena perlu Pemohon pahami bahwa dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan hanya berkenaan dengan penetapan perolehan suara, dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

jika dalil permohonan Pemohon hanya mendalilkan tingkat kehadiran Pemilih 100%, maka menurut Pihak Terkait tidak ada relevansinya dalam mempengarui perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara pasangan calon yang lain.

- Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak sinkron dengan dokumen Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, karena saksi Pemohon telah menandatangani formulir tersebut dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK.

Bahwa oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon *a quo* merupakan dalil yang bersifat asumsi dan opini, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, karena faktanya saksi Pemohon dan saksi pasangan calon yang lain telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon maupun saksi pasangan calon yang lain.

13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah membuktikan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, dan hanya mendalilkan posita permohonan bersifat asumsi, opini, imajinasi serta menyesatkan, karena tidak disertai dengan uraian dalil posita permohonan yang faktual, namun hanya sekedar menyajikan narasi dan cerita serta bukan menguraikan dan menjelaskan konstruksi kejadian konkritnya yang disandarkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak layak untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dalil posita permohonan Pemohon sebagai *fundamentum petendi* akan dijadikan dasar dan ruang lingkup pemeriksaan Mahkamah sepanjang yang mempengaruhi perolehan suara. Oleh karenanya, menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon hanya bersifat asumsi, opini dan persepsi tanpa diuraikan fakta hukumnya dan dapat dibuktikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon lain, maka dalil-dalil permohonan Pemohon menunjukkan dan membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu merumuskan *fundamentum petendi* pokok permohonan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

14) Bahwa menurut Pihak Terkait dalil-dalil permohonan Pemohon hanya bersifat *de gustibus non est disputandum,* maka tidak layak untuk dipertimbangkan Mahkamah dalam perkara *a quo*, karena terkait materi permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa: *"Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan",* dan berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa: *"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"*.

15) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu merumuskan *fundamentum petendi* yang konstruktif peristiwa konkritnya sebagaimana materi obyek perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah dan memastikan dalil permohonan secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon yang lain. Jika mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan Sentra Gakkumdu sebagai pranata hukum yang memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran pemilihan. Maka dengan demikian, Pemohon berupaya dan berusaha ingin "menghasut" dan "memaksa" Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili obyek perkara yang bukan menjadi obyek perselisihan hasil pemilihan. Kedudukan Mahkamah dalam perselisihan hasil pemilihan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara, sedangkan dalil-dalil permohonan bukan dalam kualifikasi objek permohonan perselisihan hasil pemilihan. Dalil permohonan Pemohon terkait dengan Pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT, dugaan pelanggaran politik uang, netralitas kepala desa, pemilih yang meninggal dunia digunakan untuk memilih, seharusnya

diselesaikan dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan bersama Sentra Gakkumdu sebagai pranata hukum yang memiliki kewenangan untuk itu, dan bukan “melempar dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar” kepada Mahkamah, sehingga menjadi beban Mahkamah untuk menyelesaikan. Mahkamah tidak dalam kualifikasi memeriksa, mengadili dan memutus permohonan perselisihan hasil pemilihan yang bersifat *rubbish in election,* karena sejak tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada permasalahan dan saksi Pemohon dan seluruh saksi pasangan calon lain telah menandatangi Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, namun setelah mengetahui kalah dalam perolehan suara, maka Pemohon “menciptakan” pelanggaran-pelanggaran sedemikian rupa, yang seolah-olah benar untuk “memaksa” Mahkamah agar yakin atas kreasi dari asum dan opini yang diciptakan dan didesign untuk disusun dan diangkat derajatnya menjadi dalil permohonan *a quo*.

16) Bahwa dalam semua bentuk pemilihan semua pasangan calon, termasuk Pemohon, ingin memperoleh suara terbanyak di TPS adalah sebuah keharusan dan bukan sekedar harapan, tetapi membutuhkan perjuangan, dan suara pemilih merupakan kehendak Pemilih yang telah diekspresikan di surat suara secara konstitusional dalam menentukan pilihannya, dan itu harus dihargai dan dihormati ketika pemilih sudah menentukan kepada siapa pilihannya dijatuhkan. Jadi pilihan masyarakat (Pemilih) bergantung pada hati nuraninya, karena siapapun tidak akan pernah tahu pilihan Pemilih, karena pilihan pemilih bersifat rahasia sebagaimana asas penyelenggaraan pemilihan, luber dan jurdil.
17) Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap TPS dimenangkan oleh pasangan calon tertentu tidak ada yang salah dari penyelenggaraan pemilihan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pamekasan beserta jajarannya. Jika terdapat perolehan suara yang dimenangkan oleh salah satu pasangan calon adalah merupakan fakta bahwa kehendak pemilih telah menentukan pilihannya. Perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon telah melalui proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil

penghitungan suara sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang hasilnya telah dituangkan dalam Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati, dan Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Model D. Hasil KAB/KO-KWK-Bupati, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1763 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektrionik Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

18) Bahwa selama penyelenggaran tahapan pemilihan telah diawasi secara ketat oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan beserta jajarannya, dan jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, maka pelanggaran itu menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan jajarannya selaku pranata hukum yang telah disediakan oleh undang-undang untuk menangani pelanggaran pemilihan. Maka menurut Pihak Terkait, dalam perkara *a quo* Pemohon ingin “memaksa” Mahkamah untuk melanggar bata-batas kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya bukan memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon, karena pelanggaran tersebut merupakan kewenangan absolut Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan Sentra Gakkumdu, sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung RI,

Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

19) Bahwa selama proses penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS Kabupaten Pamekasan tidak ada dokumen yang dapat membuktikan telah terjadi kejadian khusus/keberatan dari saksi Pemohon yang dituangkan dalam Model C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK, dan seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. Maka dengan demikian, fakta dan bukti dokumen telah membuktikan bahwa selama pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS tidak terjadi pelanggaran apapun sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

20) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

1.5 PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM KUALIFIKASI PENGAJUAN PERMOHONAN BARU.

1) Bahwa setelah 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, Pemohon telah mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang disusun sebanyak 29 halaman, namun dalam perbaikan permohonan Pemohon pada tanggal 11 Desember 2024 disusun menjadi sebanyak 52 halaman atau hampir 2 (dua) kali lipat dari permohonan awal.

2) Bahwa secara hukum dalam perbaikan permohonan tidak boleh mengubah atau menambah pokok permohonan dan perbaikan permohonan tidak boleh dirubah dan ditambah sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara.

3) Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati perbaikan permohonan, maka ditemukan bahwa perbaikan permohonan Pemohon merubah substansi permohonan dan bahkan menambah dalil permohonan baru, yang dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut:
   1. Bahwa berdasarkan perbaikan permohonan tertanggal 11 Desember 2024, Pemohon telah menambah dalil baru yang tertuang pada halaman 25 sampai dengan halaman 44 terkait dengan dalil “adanya kejadian nama pemilih yang menggunakan haknya berdasarkan DPT, ternyata sudah meninggal dunia sebelum tanggal 27 Nopember 2027, sehingga perbaikan permohonan pemohon merubah substansi pokok permohonan awal tertanggal 8 Desember 2024.
   2. Bahwa berdasarkan perbaikan permohonan tertanggal 11 Desember 2024, Pemohon telah menambah dalil baru yang tertuang pada halaman 44 sampai dengan halaman 45 terkait dengan dalil “adanya pelanggaran berupa intimidasi dan pengusiran terhadap saksi paslon nomor urut 3 yang dilakukan oleh panitia”, sehingga perbaikan permohonan pemohon merubah substansi pokok permohonan awal tertanggal 8 Desember 2024.
   3. Bahwa berdasarkan perbaikan permohonan tertanggal 11 Desember 2024, Pemohon telah manambah dalil baru yang tertuang pada halaman 45 sampai dengan halaman 46 terkait dengan “Pemilih yang sudah merantau dan bekerja ke luar negeri yang terdaftar dalam DPT, namun digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan pencoblosan surat suara dalam pemungutan suara”, sehingga perbaikan permohonan Pemohon telah merubah substansi pokok permohonan awal tertanggal 8 Desember 2024.
   4. Bahwa berdasarkan perbaikan permohonan tertanggal 11 Desember 2024, Pemohon telah manambah dalil baru yang tertuang pada halaman 46 sampai dengan halaman 48 terkait dengan “Pemilih yang sudah merantau dan bekerja ke luar negeri yang terdaftar dalam DPT, namun digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan pencoblosan surat suara dalam pemungutan suara”, tetapi Pemohon dalam menguraikan posita permohonan tidak sama dengan dalil

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

pokok permohonan yang terkait dengan “tingkat kehadiran Pemilih 100%, padahal di daftar hadir pemilih tetap ada yang tidak tandatangan dan tanda tangannya diduga dilakukan oleh satu orang, karena tanda tangannya sama semua”, sehingga perbaikan permohonan Pemohon telah merubah substansi pokok permohonan awal tertanggal 8 Desember 2024.

5. Bahwa berdasarkan perbaikan permohonan tertanggal 11 Desember 2024, Pemohon telah manambah dalil baru yang tertuang pada halaman 48 terkait dengan “kehadiran melebihi jumlah DPT dan ada yang tidak hadir dan kehadiran 100% DPT dan tidak ada yang tanda tangan daftar hadir tidak ditandatangani”, sehingga perbaikan permohonan Pemohon telah merubah substansi pokok permohonan awal tertanggal 8 Desember 2024.

4) Bahwa selain itu, setelah dicermati perbaikan pokok permohonan, Pemohon telah menghilangkan dalil posita permohonan awal pada hamanan 20 sampai dengan halaman 22, yang termuat dalam Tabel perolehan masing-masing pasangan calon yang menunjukkan bahwa Pemohon juga telah mendominasi perolehan suara hampir 100 %. Namun oleh karena tabel perolehan suara yang didalilkan Pemohon tidak menguntungkan atau merugikan Pemohon, maka Tabel tersebut dihilangkan oleh Pemohon dari permohonan, agar tidak dapat terlihat bahwa di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon perolehan suara dimenangkan Pemohon dan perolehan suara didominiasi oleh Pemohon.

5) Bahwa oleh karenanya, Pihak Terkait sangat keberatan terhadap perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2024, dan sudah sepatutnya perbaikan permohnan dinyatakan tidak dapat diterima, dan Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan Pemohon yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan persidangan Mahkamah didasarkan pada permohonan awal Pemohon yang diajukan pada tanggal 9 Desember 2024, sebagaimana tertuang dalam AP3 Elektronik Nomor 185/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 842 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 (*vide* Bukti PT-4) sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI PENGUSUL
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1.	**DR. Ir. FATTAH JASIN, MS**	**Drs. RP. AHMAD MUJAHID ANSORI**	Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Bulan Bintang, Partai Gerakan Indonesia Raya.
2.	**DR. KH. KHOLILURRAHMAN, S.H., M.Si.**	**H. SUKRIYANTO**	Partai Amanat Nasional, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Demokrat, Partai NasDem
3.	**MUHAMMAD BAQIR AMINATULLAH**	**TAUFADI, S.H.I**	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Persatuan Pembangunan.

Bahwa Termohon telah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 843 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 (*vide* Bukti PT-5) sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI PENGUSUNG
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1	**DR. Ir. FATTAH JASIN, MS**	**Drs. AHMAD MUJAHID ANSORI**	1. Partai Keadilan Sejahtera. 2. Partai Kebangkitan Bangsa. 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Bulan Bintang 5. Partai Gerakan Indonesia Raya.

2	**DR. KH. KHOLILURRAHMAN, SH, Msi**	**H. SUKRIYANTO**	1. Partai Amanat Nasional. 2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. 3. Partai Demokrat. 4. Partai NasDem
3	**MUHAMMAD BAQIR AMINATULLAH**	**TAUFADI, S.H.I**	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Partai Perindo. 3. Partai Hati Nurani Rakyat. 4. Partai Persatuan Pembangunan.

Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada tanggal 5 Desember 2024 yang tertuang dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK (*vide* Bukti PT-6) dan diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Pamekasan yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (*vide* Bukti PT-7) sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	17.307 SUARA
2.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	291.246 SUARA
3.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 3	263.740 SUARA
TOTAL SUARA SAH		**572.293 SUARA**

Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang juga melaksanakan undang-undang, maka segala batas-batas kewenangan juga telah diatur oleh undang-undang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan undang-undang juga memiliki kewenangan yang terbatas dan bukan kewenangan yang tak terbatas, dan bukan karena alasan menegakkan “keadilan substantif” tetapi melanggar batas-batas kewenangan yang telah ditentukan undang-undang. Kewenangan Mahkamah telah jelas dan tegas hanya memiliki kewenangan terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, dan Mahkamah tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili

surat atau keputusan Termohon dalam kualifikasi KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara), yang merupakan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara.

Bahwa hasil perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 291.246 suara merupakan kehendak rakyat yang telah direkspresikan dalam menentukan pilihan pemimpinnya, dan kehendak rakyat tersebut telah memutuskan dan menentukan pilihannya kepada Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Nomor Urut 2. Maka, kehendak rakyat yang dikonversi menjadi suara oleh Termohon, tidak boleh seorang pun yang menghilangkan suara kehendak rakyat hanya dengan dalih pelanggaran-pelanggaran, yang secara fakta dalih tersebut tidak pernah ada, dan jika toh pun ada, sudah ditangani dan diporses oleh Pengawas Pemilihan, yaitu Bawaslu Kabupaten Pamekasan beserta jajarannya.

Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon telah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat PPK yang didasarkan pada Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dari seluruh TPS di Kabupaten Pamekasan dan telah tertuang dalam Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, dan tidak ada perubahan, baik penambahan atau pengurangan suara masing-masing pasangan calon, sehingga terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada permasalahan, yang hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dituangkan dalam Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, sebagai berikut:

1. Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Pamekasan, yang ditandatangani saksi Pemohon yang bernama **JUNAIDI**. (*vide* Bukti PT-9).
2. Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Batumarmar, sak. (*vide* Bukti PT-10).
3. Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Galis, saksi Pemohon menandatangani Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, tetapi tidak menulis namanya. (*vide* Bukti PT-11)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

4. Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Kadur. (*vide* Bukti PT-12)
5. Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Larangan. (*vide* Bukti PT-13)
6. Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Pademawu. (*vide* Bukti PT-14)
7. Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di TPS tingkat PPK Kecamatan Pakong, saksi Pemohon menandatangani Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, tetapi tidak menulis namanya. (*vide* Bukti PT-15)
8. Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Pasean. (*vide* Bukti PT-16)
9. Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Palenggaan. (*vide* Bukti PT-17)
10. Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Pagantenan. (*vide* Bukti PT-18)
11. Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Proppo, saksi Pemohon menandatangani Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, tetapi tidak menulis namanya. (*vide* Bukti PT-19)
12. Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-21)
13. Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Tlanakan. (*vide* Bukti PT-22)
14. Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Waru. (*vide* Bukti PT-23)

Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK di atas, Termohon telah melakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Pamekasan dan tertuang dalam Model D.Hasil-KAB/KO-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-6)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Bahwa setelah Pemohon mengetahui perolehan suaranya kalah, maka Pemohon mencari-cari masalah yang secara substansi telah selesai dan tidak ada persoalan terkait dengan perolehan suara, namun masalah-masalah itu dibunyikan sebagaimana dalil pokok permohonan. Permasalahan yang diangkat menjadi dalil pokok permohonan diluar perolehan suara yang seolah-olah masalah itu berkaitan dengan perolehan suara, maka Pemohon mengambil tindakan tidak menandatangani Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, kecuali di 4 (empat) kecamatan, dan saksi Pemohon tidak menandatangani Model D.Hasil-KAB/KO-KWK-Bupati.

Bahwa dengan tidak ditandatanganinya Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati dan Model D.Hasil-KAB/KO-KWK-Bupati tidak menjadikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menjadi tidak sah dan tidak menggugurkan hak pilih yang telah digunakan secara konstitusional.

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan menyampaikan Keterangan Pihak Terkait atas pokok permohonan Pemohon, yang selengkapnya sebagai berikut:

A. PEMILIH YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA DAN TERDAFTAR DALAM DPT, NAMUN DIGUNAKAN OLEH OKNUM TERTENTU UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA.

1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon pada huruf A di atas, halaman 8 sampai dengan halaman 22, karena faktanya tidak ada Pemilih yang meninggal dunia digunkan oleh Pemilih yang lain untuk melakukan pencoblosan surat suara.
2) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pihak Terkait akan memberikan keterangan atas dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan Pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT, sebagai berikut:
   a. Bahwa berkenaan dengan Pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT, maka Pihak Terkait perlu memberikan pemahaman kepada Pemohon agar Pemohon dalam mendalilkan permohonan Pemohon tidak hanya sekedar menarasikan peristiwa tanpa didasarkan pada fakta dan fakta hukum yang mendasarinya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

b. Bahwa Termohon tidak serta menetapkan DPT, namun sebelum DPT ditetapkan oleh Termohon telah melalui proses yang panjang, maka untuk memastikan pemilih yang sudah meninggal dunia, sehingga dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, KPU Termohon tidak serta merta dapat memasukkan dan mengeluarkan Pemilih dari daftar Pemilih, tetapi untuk mengeluarkan Pemilih dari daftar pemilih harus dibuktikan secara *de jure* yang diterbitkan dari Dispendukcapil untuk memasukkan atau mengeluarkan seseorang dari daftar pemilih di TPS, karena sumber input data pemilih untuk dijadikan data Termohon dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih berasal dan bersumber dari Dispendukcapil. Maka, segala perubahan biodata penduduk (Pemilih) harus didukung dokumen yang diterbitkan oleh Dispendukcapil, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 yang menyatakan: *"Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan"*.

   Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 menyatakan: *"Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami"*.

   Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap Pemilih yang sudah meninggal dunia atau perubahan status biodata Pemilih, maka harus dibuktikan secara *de jure* dari Dispendukcapil *in casu* kutipan akta kematian bagi Pemilih yang sudah meninggal dunia.

c. Bahwa Pemilih yang sudah meninggal setelah ditetapkan DPT dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat saja terjadi, maka KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara, bagi Pemilih yang sudah meninggal diberi tanda dalam daftar hadir dan Salinan DPT bahwa Pemilih tersebut sudah meninggal dunia.

d. Bahwa bagi pemilih yang sudah meninggal dunia sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak akan menerima Model

C.Pemberitahuan-KWK, sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, halaman 12 pada huruf A, Kegiatan Persiapan, huruf b - Pelaporan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi, pada ayat (1) dinyatakan: *"Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih karena pemilih:*

a) meninggal dunia.
b) pindah alamat domisili.
c) pindah memilih.
d) tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut).
e) berubah status, atau
f) tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki contact person yang bersangkutan, ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi".

e. Bahwa bagi Pemilih yang meninggal dunia saat pemutakhiran data pemilih dan sebelum penetapan DPT oleh Termohon pada tanggal 19 September 2024, maka PPS akan mencoret dari data pemilih, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf h Peraturan KPU (selanjutnya disebut PKPU) Nomor 7 Tahun 2024, yang berbunyi: *"Pantarlih dalam melaksanakan kegiatan coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan sebagai berikut: mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya"*.

f. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terkait dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sudah diatur tata cara, mekanisme dan prosedur terkait dengan Pemilih yang sudah meninggal, baik pada

tahapan pemutkahiran data pemilih maupun sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. Jadi, dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan Pemilih yang sudah meninggal tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, karena Pemilih yang sudah meninggal masih terdaftar dalam DPT pada saat pelaksanaan pemungutan suara diberi tanda oleh KPPS, sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan tidak digunakan untuk memilih.

g. Bahwa Pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT tidak dapat dianggap atau diasumsikan digunakan untuk memilih, karena KPU telah memiliki mekanisme dan prosedur bagi Pemilih yang meninggal pada saat pelaksanaan pemungutan suara akan diberi tanda bahwa Pemilih tersebut telah meninggal dunia.

h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 menyatkan: *"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan.*
- *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan, dan*
- *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan"*.

3) Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan orang yang meninggal dunia dan terdaftar di DPT, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1) KECAMATAN PEGANTENAN

a. Bahwa Pemohon mendalilkan orang yang sudah meninggal dunia terdaftar di DPT, di Kecamatan Pegantenan, sebagai berikut:

DESA	NOMOR TPS	KETERANGAN
PESANGGAR	4	Terdapat 6 (enam) orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT, berdasarkan surat keterangan kematian, tertanggal 5 Desember 2024.

	5	Terdapat 6 (enam) orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT berdasarkan surat keterangan kematian, tertanggal 5 Desember 2024.
PALESANGGAR	6	Terdapat 11 (enam) orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT, dan 20 (dua puluh) orang menjadai TPK. Namun dalam Tabel hanya disebut 15 orang yang meningga dunia, berdasarkan surat keterangan kematian, tertanggal 4 Desember 2024, dan berdasarkan keterangan saksi.
	8	Terdapat 33 (tiga puluh tiga) orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT berdasarkan surat keterangan kematian, tertanggal 4 Desember 2024.
	13	Terdapat 3 (tiga) orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT, namun di Tabel hanya disebut 2 orang saja, berdasarkan surat keterangan kematian, tertanggal 4 Desember 2024.
TEBUL TIMUR	3	Terdapat 3 (tiga) orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT, berdasarkan surat pernyataan dari anak Pemilih yang bersangkutan.
BULANGAN BARAT	2	Terdapat 5 (lima) orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Bulangan Barat, tanggal 7 Desember 2024.
BULANGAN TIMUR	1	Terdapat 5 (lima) orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT berdasarkan surat pernyataan dari saudara ipar, tetangga, keponakan dan dari saudara Pemilih yang meninggal.

TANJUNG	15	Terdapat 3 (tiga) orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT berdasarkan surat pernyataan kematian dari adik ipar, cucu dan saudara dari Pemilih yang meningga.

b. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas hanya mendalilkan terkait dengan Pemilih yang sudah meninggal dunia sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, dan Pemohon tidak mendalilkan data Pemilih yang sudah meninggal dunia dan terdaftar dalam DPT digunakan untuk melakukan pencoblosan surat suara dalam pemungutan suara atau tidak, maka secara hukum dalil demikian tidak ada permasalahan dan tidak ada yang salah serta bukan dalam kualifikasi pelanggaran, sepanjang tidak digunakan untuk memilih.

c. Bahwa terkait dengan dugaan Pemilih yang sudah meninggal dunia, kemudian Pemohon membuat surat keterangan secara bersamaan pada tanggal 5 Desember 2024, setelah 7 (tujuh) hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan setalah Pemohon mengetahui perolehan suaranya kalah.

d. Bahwa pembuktian pemilih yang sudah meninggal dunia tidak dapat hanya dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa, tetapi harus dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil, karena dasar penyusunan daftar pemilih didasarkan dan bersumber dari data Dispendukcapil, dan bukan dari data kepala desa, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 yang menyatakan: *"Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan"*.

   Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 menyatakan: *"Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap,*

serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami".

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka segala bentuk perubahan data Pemilih harus dibuktikan secara *de jure* oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan *in casu* Dispendukcapil, sehingga tidak bisa pembuktian perubahan data *in casu* Pemilih yang sudah meninggal dunia hanya dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa atau oleh anggota keluarga Pemilih, kakak, anak, cucu, tetangga, keponakan yang sudah meninggal.

e. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan bisa saja orang yang sudah meninggal dunia masuk dan terdaftar di DPT, maka terhadap pemilih yang meninggal dunia pada saat pemungutan suara, petugas KPPS akan memberikan tanda dalam daftar hadir bagi Pemilih yang sudah meninggal dunia untuk menunjukkan bahwa Pemilih yang bersangkutan sudah meninggal dunia, dan tidak digunakan untuk memilih (mencoblos).
f. Bahwa terhadap pemilih yang sudah meninggal, maka KPPS atau PPS tidak akan mendistribukan Model C.Pemberitahuan kepada Pemilih yang sudah meninggal dunia, sehingga Pemilih yang sudah meninggal dunia dapat dipastikan tidak menerima Model C.Pemberitahuan-KWK, sehingga tidak mungkin memberikan hak pilihnya (mencolos), karena sudah meninggal dunia.
g. Bahwa jika terdapat Pemilih yang sudah meninggal dunia digunakan untuk memilih dapat dipastikan Pemilih yang menggunakan hak pilih atas nama Pemilih yang meninggal dunia akan menerima 4 (empat) jenis surat suara, yaitu 2 (dua) surat suara untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 2 (dua) surat suara untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan hal itu sangat tidak memungkinkan, dan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, karena selama pelaksanaan pemungutan suara di TPS diawasi oleh Pengawas TPS, saksi masing-masing pasangan calon dan

pemantau pemilihan, serta warga masyarakat yang melihat jalannya pemungutan dan penghitungan suara.

h. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemilih sudah meninggal dunia terjadi di Kecamatan Pegantenan, maka Pihak Terkait akan memberikan keterangan sebagai berikut:

- TPS 4, Desa Pesanggar, Kecamatan Pegantenan, terdapat 6 (enam) orang yang sudah meninggal dunia. Maka Pihak Terkait melakukan penelitian dan pencocokan dengan mendatangi Pemilih atau tempat Pemilih sebagaimana yang didalilkan sudah meninggal dunia, dan faktanya Pemilih yang bersangkutan masih hidup, yang dapat dibuktikan sebagai berikut:

	DATA PEMOHON				DATA PIHAK TERKAIT	
NO	**DESA**	**TPS**	**NAMA**	**DALIL PEMOHON**	**KETERANGAN (FAKTA)**	**BUKTI**
1.	PASANGGAR	4	Jumaidah	Meninggal dunia	Masih hidup tidak mau membuat surat pernyataan, karena takut.	
2.		4	Lukat	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat Penyataan dari Lukat, tanggal 7 Januari 2025.	PT-22

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar dan menyesatkan, karena yang didalilkan Pemohon Pemilih yang sudah meninggal dunia, faktanya masih hidup sebagaimana bukti-bukti di atas, maka dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

Bahwa fakta telah membuktikan setelah selesai dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, TPS 4, Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, yang ditandatangani oleh MASLIM (*vide* Bukti PT-23), dan berdasarkan Model

C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati membuktikan bahwa data jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, sehingga dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat Pemilih di TPS 4, Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan meninggal dunia adalah tidak berdasar dan menyesatkan.

Maka dengan ditandatanganinya Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4, Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan.

- TPS 6, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan terdapat 15 (lima belas) orang yang sudah meninggal dunia. Maka Pihak Terkait melakukan penelitian dan pencocokan dengan mendatangi Pemilih atau tempat Pemilih sebagaimana yang didalilkan sudah meninggal dunia, dan faktanya Pemilih yang bersangkutan masih hidup, yang dapat dibuktikan sebagai berikut:

No.	DESA	TPS	NAMA	DALIL PEMOHON	DATA PIHAK TERKAIT	BUKTI
1.	PALESANGGAR	6	Bukasah	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat Pernyataan dari Bukasah, tanggal 5 Januari 2025, dan bukti e-KTP.	PT-24
2.		6	Saprae	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat Pernyataan dari Saprae, tanggal 10 Januari 2025, dan bukti eKTP serta bukti video.	PT-25
3.		6	Moh. Samsul	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan Surat	PT-26

					Pernyataan dari Moh. Samsul, tanggal 6 Januari 2025, dan bukti e-KTP serta bukti video.	
4.		6	Misjati	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Misjati, tanggal 10 Januari 2025, dan bukti e-KTP.	PT-27
5.		6	Minsiyah	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Minsiyah, tanggal 10 Januari 2025, dan bukti e-KTP.	PT-28

Bahwa fakta telah membuktikan setelah selesai dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 6, Desa Palesangar, Kecamatan Pegantenan, yang ditandatangani oleh SUBAIDI (*vide* Bukti PT-29), dan berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati membuktikan bahwa data jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, sehingga dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat Pemilih di TPS 6, Desa Palesangar, Kecamatan Pegantenan meninggal dunia adalah tidak berdasar dan menyesatkan.

Maka dengan ditandatanganinya Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6, Desa Palesangar, Kecamatan Pegantenan.

- TPS 8, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan terdapat 33 (tiga puluh tiga) orang yang sudah meninggal dunia. Maka Pihak Terkait melakukan penelitian dan pencocokan dengan mendatangi Pemilih atau tempat Pemilih sebagaimana yang didalilkan sudah meninggal dunia, dan faktanya Pemilih yang bersangkutan masih hidup, yang dapat dibuktikan sebagai berikut:

NO	DESA	TPS	NAMA	DALIL PEMOHON	DATA PIHAK TERKAIT	BUKTI
1.		8	Misturah	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Misturah, tanggal 8 Januari 2025 dan bukti video	PT-30
2.		8	Moh. Suli	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Moh. Suli, tanggal 7 Januari 2025 dan bukti video	PT-31
3.		8	Patni	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Patni, tanggal 5 Januari 2025, dan bukti video	PT-32
4.		8	Samiuddin	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Samiuddin,	PT-33

					tanggal 6 Januari 2025dan bukti video	
5.		8	Sihah	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Sihah, tanggal 9 Januari 2025 dan bukti video	PT-34
6.		8	Sinami	Meninggal duni	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Sinami, tanggal 7 Januari 2025 dan bukti video	PT-35
7.		8	Artali	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Artali, tanggal 6 Januari 2025, serta bukti video	PT-36
8.		8	Bu Sinab	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Bu Sinab, tanggal 5 Januari 2025, serta bukti video	PT-37

9.		8	Kembar	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Kembar, tanggal 6 Januari 2025 dan bukti video	PT-38
10.		8	Lastani	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Lastani, tanggal 8 Januari 2025 dan bukti video	PT-39
11.		8	Lima	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Lima, tanggal 9 Januari 2025 dan bukti video	PT-40
12.		8	Markati	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Markati, tanggal 8 Januari 2025 dan bukti video	PT-41
13.		8	Marlani	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Marlani, tanggal 6 Januari 2025	PT-42

14.		8	Martilem	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Martilem, tanggal 6 Januari 2025 dan bukti video	PT-43
15.		8	Mat Dimin	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Mat Dimin, tanggal 9 Januari 2025 dan bukti video	PT-44
16.		8	Mat Heri	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Mat Heri, tanggal 8 Januari 2025 dan bukti video	PT-45
17.		8	Misjanten	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Misjanten, tanggal 5 Januari 2025 dan bukti video	PT-46

Bahwa fakta telah membuktikan setelah selesai dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 8, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, yang ditandatangani oleh ABD.KARIM (*vide* Bukti PT-47). dan berdasarkan Model

C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati membuktikan bahwa data jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, sehingga dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat Pemilih di TPS 8, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan meninggal dunia adalah tidak berdasar dan menyesatkan.

Maka dengan ditandatanganinya Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8, Desa Palesangar, Kecamatan Pegantenan.

- TPS 13, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan terdapat 3 (tiga) orang yang sudah meninggal dunia, tetapi dalam tabel Pemohon disebutkan hanya 2 (dua) orang saja. Maka Pihak Terkait melakukan penelitian dan pencocokan dengan mendatangi Pemilih atau tempat Pemilih sebagaimana yang didalilkan sudah meninggal dunia, dan faktanya Pemilih yang bersangkutan masih hidup, yang dapat dibuktikan sebagai berikut:

NO	DESA	TPS	NAMA	DALIL PEMOHON	DATA PIHAK TERKAIT	BUKTI
1.	PALESANGGAR	13	Misnadin	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Misnadin, tanggal 7 Januari 2025, dan bukti video	PT-48

Bahwa fakta telah membuktikan setelah selesai dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 13, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani tanpa menyebutkan nama saksi Pemohon (*vide* Bukti PT-49), dan berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati membuktikan bahwa data jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat

suara yang digunakan, sehingga dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat Pemilih di TPS 13, Desa Palesangar, Kecamatan Pegantenan meninggal dunia adalah tidak berdasar dan menyesatkan.

Maka dengan ditandatanganinya Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 13, Desa Palesangar, Kecamatan Pegantenan.

- TPS 3, Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan terdapat 3 (tiga) orang yang sudah meninggal dunia atas nama . Maka Pihak Terkait melakukan penelitian dan pencocokan dengan mendatangi Pemilih atau tempat Pemilih sebagaimana yang didalilkan sudah meninggal dunia, dan faktanya Pemilih yang bersangkutan tidak ada dan tidak terdaftar dalam DPT di TPS 3, Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan.

  Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 6, halaman 15 dan halaman 16, yang mendalilkan di TPS 3, Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan bahwa SAFRAJI, MIATI dan NURHOLIS, telah meninggal dunia. Maka terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait melakukan penelitian dan pengecekan secara langsung dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 3, Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, dan diperoleh fakta sebagai berikut:

NO	DESA	TPS	NAMA	KETERANGAN
1.	Tebul Timur	3	SAFRAJI	Tidak ada dan tidak terdaftar dalam DPT
2.	Tebul Timur	3	NURHOLIS	Tidak ada dan tidak terdaftar dalam DPT

  Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan menyesatkan, karena faktanya nama SAFRAJI dan NURHOLIS tidak ada dan tidak terdaftar dalam DPT, di TPS 3, Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, berdasarkan bukti DPT, TPS 3, Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan (*vide* Bukti PT-50), tetapi Pemohon

mendalilkan SAFRAJI dan NURHOLIS terdaftar dalam DPT dan didalilkan nama-nama tersebut telah meninggal dunia.

Bahwa fakta telah membuktikan setelah selesai dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 3, Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh SADDRIMU (*vide* Bukti PT-51), dan berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati membuktikan bahwa data jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, sehingga dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat Pemilih di TPS 3, Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan meninggal dunia adalah tidak berdasar dan menyesatkan.

Maka dengan ditandatanganinya Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3, Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan.

- TPS 2, Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan terdapat 5 (lima) orang yang sudah meninggal dunia. Maka Pihak Terkait melakukan penelitian dan pencocokan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 2, Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan dan diperoleh fakta bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, dan setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS, saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati yang ditandatangani oleh HAYAT (*vide* Bukti PT-52).

  Maka dengan ditandatanganinya Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2, Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan.

- TPS 1, Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan terdapat 5 (lima) orang yang sudah meninggal dunia. Maka Pihak Terkait melakukan penelitian dan pencocokan dengan mendatangi Pemilih atau tempat Pemilih sebagaimana yang didalilkan sudah meninggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

dunia, dan faktanya Pemilih yang bersangkutan masih hidup, yang dapat dibuktikan sebagai berikut:

NO	DESA	TPS	NAMA	DALIL PEMOHON	DATA PIHAK TERKAIT	BUKTI
1.	BULANGAN TIMUR	1	Misjati	Meninggal dunia	Masih hidup berdasarkan surat pernyataan dari Misjati, tanggal 7 Januari 2025.	PT-53
2.		1	Mistar	Meninggal dunia	Masih hidup dan mencoblos di TPS 1, Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, dan saat ini yang bersangkutan menjadi TKI di Malaysia mulai tanggal 16 Desember 2024, berdasarkan keterangan dari Kepala Dusun Utara, Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan.	

Bahwa fakta telah membuktikan setelah selesai dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 1, Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh SAPANDI (*vide* Bukti PT-54), dan berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati membuktikan bahwa data jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, sehingga dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat

Pemilih di TPS 1, Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan meninggal dunia adalah tidak berdasar dan menyesatkan.

Maka dengan ditandatanganinya Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan.

Bahwa selain itu Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 8, halaman 17, yang mendalilkan di TPS 1, Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, Pemilih atas nama MOH. SAKI didalilkan telah meninggal dunia. Maka Pihak Terkait melakukan penelitian dan pengecekan secara langsung dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1, Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, diperoleh fakta sebagai berikut:

NO	DESA	TPS	NAMA	KETERANGAN (FAKTA)
1.	Bulangan Timur	1	MOH. SAKI	Tidak ada dan tidak terdaftar dalam DPT

Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan menyesatkan, karena nama MOH. SAKI faktanya tidak ada dan tidak terdaftar dalam DPT, di TPS 1, Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, berdasarkan bukti DPT, TPS 1, Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan (*vide* Bukti PT-55), tetapi Pemohon mendalilkan MOH. SAKI terdaftar dalam DPT dan didalilkan sudah meninggal dunia.

Bahwa fakta telah membuktikan setelah selesai dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 1, Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, yang ditandatangani oleh SAPANDI (*vide* Bukti PT-54).

- TPS 15, Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan terdapat 3 (tiga) orang yang sudah meninggal dunia. Maka Pihak Terkait melakukan penelitian dan pencocokan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan diperoleh fakta bahwa jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 530 dan

jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 528 Pemilih, serta jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Maka terhadap dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar dan menyesatkan, karena berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 15, Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan tercatat jumlah Pemilih dalam DPT dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PEMILIH
TANJUNG	15	530 Pemilih	528 Pemilih

Bahwa berdasarkan data dan fakta telah membuktikan dalil permohonan Pemohon terkait dengan Pemilih yang sudah meninggal dunia adalah tidak berdasar dan menyesatkan, karena setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS, saksi Pemohon yang bernama MISLAWI telah menandatangi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 15, Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan (*vide* Bukti PT-56), maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan pemberian mandat kepada Saksi MISLAWI.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak berdasar dan menyesatkan, karena fakta telah membuktikan bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Pemilih yang sudah meninggal dunia, faktanya masih hidup sebagaimana yang dibuktikan Pihak Terkait di atas, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

2) KECAMATAN PROPPO

a. Bahwa Pemohon mendalilkan tingkat kehadiran 100% berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT, di TPS 1, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, sebagai berikut:

DESA	NOMOR TPS	KETERANGAN
MAPPER	1	Terdapat 2 (dua) orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT berdasarkan surat pernyataan kematian dari keluarga dan kakak almarhum.

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo,* Pihak Terkait melakukan penelitian dan pencocokan Model C.Hasil-Salinan-KWK, dan diperoleh fakta bahwa jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 543, sedangkan jumlah pengguna hak pilih sejumlah 411, sehingga tingkat kehadiran Pemilih tidak 100% di TPS 1, Desa Mapper, Kecamatan Proppo sebagaimana dalil permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil permohonan Pemilih yang sudah meninggal dunia, Pemohon hanya membuktikan dengan surat pernyataan dari keluarga dan kakak Pemilih yang meninggal dunia, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 yang menyatakan:

"Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan".

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 menyatakan:

"Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami".

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka segala perubahan data penduduk (Pemilih) harus dibuktikan secara *de jure* oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan *in casu* Dispendukcapil dalam bentuk akta kematian, sehingga tidak bisa pembuktian perubahan biodata penduduk (Pemilih) yang sudah meninggal dunia hanya dibuktikan dengan surat pernyataan dari

anggota keluarga Pemilih, kakak, anak, cucu, tetangga, keponakan yang sudah meninggal.

Bahwa Termohon dapat mengeluarkan data Pemilih apabila Pemilih yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, misalnya perubahan status dari sipil menjadi TNI/Polri atau sebaliknya, orang yang sudah meinggal dunia atau orang yang sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dapat dibuktikan dengan akta kematian dari Dispendukcapil. Maka dengan demikian, Termohon dapat dengan serta merta mengeluarkan pemilih yang tidak memuhi syarat sebagai Pemilih tanpa dibuktikan secara *de jure*.

Bahwa fakta telah membuktikan setelah selesai dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, saksi Pemohon atas nama MARSUKAH telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 1, Desa Mapper, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-57), maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, Desa Mapper, Kecamatan Proppo.

b. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

3) KECAMATAN PALENGAAN

Bahwa Pemohon mendalilkan orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT, di TPS 14, Banyupelle, Kecamatan Palenggaan dan TPS 3, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, sebagai berikut:

DESA	NOMOR TPS	KETERANGAN
BANYUPELLE	14	Terdapat 1 (satu) orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT berdasarkan surat pernyataan kematian dari anak Pemilih yang meninggal dunia.
POTOAN LAOK	3	Terdapat 4 (empat) orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT berdasarkan surat pernyataan kematian dari sepupu, keponakan, anak Pemilih yang meninggal dunia.

Bahwa Pemohon telah mendalilkan di TPS 3, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, Pemilih yang sudah meninggal dunia sejumlah 1 orang, tetapi dalam tabelnya, Pemohon menyebutkan 4 (orang) yang sudah meninggal dunia, maka dalil mana yang benar, apakah yang meninggal dunia 1 orang atau 4 orang, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak selaras antara dalil permohonan dengan tabel Pemohon.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon hanya membuktikan dengan surat pernyataan dari anak Pemilih yang meninggal dunia, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 yang menyatakan: *"Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan"*.

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 menyatakan: *"Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 menyatakan: *"Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan".*

b. Bahwa berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati telah membuktikan bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 3, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan memperoleh suara terbanyak daripada Pihak Terkait, dengan perolehan suara Pemohon sejumlah 255 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sejumlah 236. Maka jika Pemohon mempersoalkan di TPS 3, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, sehingga dalil permohonan *a quo* kontradiktif dengan mempersoalkan di TPS yang faktanya Pemohon memperoleh suara terbanyak.
c. Bahwa setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan saura di TPS 3, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, saksi Pemohon yang bernama MOH. AL BASORI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-58), dan saksi Pemohon yang bernama SYASUL ARIFIN juga telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 14, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-59). Maka dengan ditandatanganinya Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati oleh saksi Pemohon, secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3, Desa Potoan Laok dan TPS 14, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan.
d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024, dan uraian di atas, maka segala perubahan data Pemilih harus dibuktikan secara *de jure* oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan *in casu* Dispendukcapil, sehingga tidak bisa pembuktian perubahan data *in casu* Pemilih meninggal dunia hanya dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa atau oleh anggota keluarga Pemilih, kakak, anak, cucu, tetangga, keponakan yang sudah meninggal.

Maka dengan demikian, menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

4) KECAMATAN PADEMAWU

1. Bahwa Pemohon medalilkan orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT, di TPS 1, TPS 4, dan TPS 6, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, sebagai berikut:

DESA	NOMOR TPS	KETERANGAN
DASOK	1	Terdapat 1 (satu) orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT berdasarkan surat keterangan kematian dari kepala desa Dasok, tanggal 4 Desember 2024.
	4	Terdapat 2 (dua) orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT berdasarkan surat keterangan kematian dari kepala desa Dasok, tanggal 4 Desember 2024.
	6	Terdapat 2 (dua) orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT berdasarkan surat keterangan kematian dari kepala desa Dasok, tanggal 4 Desember 2024.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon hanya membuktikan dengan surat keterangan kematian dari kepala desa, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 yang menyatakan: *"Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan"*.

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 menyatakan: *"Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka segala perubahan data Pemilih harus dibuktikan secara *de jure* oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan *in casu* Dispendukcapil, sehingga tidak bisa pembuktian perubahan data *in casu* Pemilih yang sudah meninggal dunia hanya dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa atau oleh anggota keluarga Pemilih, kakak, anak, cucu, tetangga, keponakan yang sudah meninggal.

Bahwa fakta telah membuktikan setelah selesai dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, TPS 1, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, namun saksi Pemohon tidak menuliskan namanya di Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-60).

Bahwa fakta telah membuktikan setelah selesai dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, saksi Pemohon atas nama MOH NOR H telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, TPS 4, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu. (*vide* Bukti PT-61).

Bahwa fakta telah membuktikan setelah selesai dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, saksi Pemohon atas nama MULYADI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, TPS 6, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu. (*vide* Bukti PT-62).

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 2.2, halaman 20, yang mendalilkan di TPS 4, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, nama FATIMUS ZAHRAH didalilkan telah meninggal dunia. Maka Pihak Terkait melakukan penelitian dan pengecekan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, diperoleh fakta sebagai berikut:

NO	DESA	TPS	NAMA	KETERANGAN
1.	Dasok	4	Fatimus Zahrah	Tidak ada dan tidak terdaftar dalam DPT

Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan menyesatkan, karena fakta telah membuktikan nama FATIMUS ZAHRAH tidak ada dan tidak terdaftar dalam DPT, TPS 4, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, berdasarkan bukti DPT, TPS 4, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu (*vide* Bukti PT-63), yang didalilkan oleh Pemohon Pemilih yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan menyesatkan, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

5) KECAMATAN BATUMARMAR

1. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 2.4, halaman 21 terkait dengan orang yang meninggal dunia terdaftar d dalam DPT, di TPS 1, Desa Lesong laok, Kecamatan Batumamar, sebagai berikut:

DESA	NOMOR TPS	KETERANGAN
LESONG LAOK	1	Terdapat 1 (satu) orang yang meninggal dunia terdaftar di DPT berdasarkan surat keterangan kematian dari kepala desa Lesong Laok, tanggal 4 Desember 2024.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon hanya membuktikan dengan surat keterangan kepala desa, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 yang menyatakan: *"Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan"*.

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 menyatakan: *"Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 menyatakan: *"Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan".*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka segala perubahan data Pemilih harus dibuktikan secara *de jure* oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan *in casu* Dispendukcapil, sehingga tidak bisa pembuktian perubahan data *in casu* Pemilih meninggal dunia hanya dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa atau oleh anggota keluarga Pemilih, kakak, anak, cucu, tetangga, keponakan yang sudah meninggal.

2. Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan *inzage* diperoleh fakta bahwa Bukti P-123, P-124 dan P-125 tidak bersesuaian dengan yang didalilkan Pemohon, karena isi dari Bukti P-123 adalah surat pernyataan kematian yang dibuat oleh Wahyudi keponakan dari BARDI yang menerangkan bahwa yang meninggal dunia adalah BARDI dan Bukti P-124 isinya adalah surat pernyataan kematian yang dibuat oleh MOHAMMAD BAKIRUDIN anak dari HADALI yang menerangkan bahwa yang meninggal adalah HADALI, serta Bukti P-125 isinya adalah surat pernyataan kematian yang dibuat oleh ABDUL MUKTI keponakan dari JUANA yang menerangkan bahwa yang meninggal dunia adalah JUANA. Sedangkan Pemohon mendalilkan Pemilih yang meninggal dunia adalah RAMBESI, dan berdasarkan Bukti P-123, P-124 dan P-125 telah membuktikan bahwa yang meninggal dunia bukan RAMBESI sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
3. Bahwa fakta telah membuktikan setelah selesai dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, TPS 1, Desa Lesong Laok, Kecamatan Batumarmar, tetapi saksi Pemohon tidak menuliskan namanya di Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-64).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

6) Bahwa selain dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pemohon juga mendalilkan TINGKAT KEHADIRAN HAMPIR 100% BERDASARKAN MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon di atas. Maka terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo,* Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
   a. Bahwa dalil permohoan Pemohon tingkat kehadiran 100% tidak seluruhnya benar, karena faktanya ada kehadiran Pemilih yang tidak 100% sebagai pengguna hak pilih, dan dari tingkat kehadiran 100% tersebut juga tidak 100% menggunakan hak pilihnya sesuai dengan jumlah Pemilih di DPT di TPS-TPS yang dialilkan Pemohon, maka dalil permohonan Pemohon tidak seluruhnya benar, maka harus dibuktikan dengan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara *in casu* Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.
   b. Bahwa perlu diketahui oleh Pemohon, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara pemilihan, pemerintah, partai politik, dan peserta pemilihan, dan justru KPU sebagai penyelenggara pemilihan menargetkan tingkat partisipasi Pemilih meningkat tinggi, maka apa yang salah jika tingkat partisipasi meningkat dan tinggi dalam menggunakan hak pilih di TPS, dan apa relevansinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Maka dengan tingkat kehadiran Pemilih meningkat tinggi merupakan keberhasilan KPU Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pemilihan dan berpengaruh pada indeks demokrasi di Kabupaten Pamekasan. Jadi, tingkat partispasi meningkat tinggi tidak dapat diasumsikan merupakan pelanggaran, karena Bawaslu Kabupaten Pamekasan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

beserta jajarannya telah mengawasi secara ketat dalam pelaksanaan pemungutan suara, dan tidak ditemukan pelanggaran terkait dengan tingkat partisipasi Pemilih meningkat tinggi yang disebabkan karena pelanggaran.

c. Bahwa tingkat kehadiran Pemilih tinggi tidak ada relevansinya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait atau KPU Kabupaten Pamekasan, karena kehadiran Pemilih tinggi dan meningkat di TPS merupakan hasil dari proses pilihan rakyat yang secara konstitusional telah digunakan untuk memilih pasangan calon sesuai dengan kehendak Pemilih dalam menjatuhkan pilihannya. Maka dengan suara pemilih yang sudah diekspresikan sesuai dengan kehendak politiknya, sehingga tidak boleh seorang pun yang tidak mengakui pilihan rakyat, sebagaimana Pendapat filosof Romawi Kuno, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), yang menyatakan: “suara rakyat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara, dan pilihan rakyat adalah pelaksanaan hukum tertinggi. Siapapun yang mencoba untuk tidak mengakui hasil-hasil pemilihan, berarti berusaha untuk merusak hukum tertinggi, *vox populi suprema lex est de tema”*.
d. Bahwa apapun hasil pemilihan merupakan kehendak Pemilih yang telah digunakan untuk memilih pemimpinnya, maka semua pihak harus menghormati hak Pemilih yang telah menentukan hak politiknya secara konstitusional secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta tidak ada tekanan dan intimidasi, baik dari Pemohon atau Pihak Terkait.
e. Bahwa oleh karenanya tingkat kehadiran Pemilih meningkat tinggi tidak serta merta diasumsikan merupakan pelanggaran, maka semuanya dapat diuji melalui pranata hukum yang telah disediakan, dan jika masing-masing peserta pemilihan tidak menggunakan pranata hukum itu, maka dianggap tidak menggunakan haknya, maka secara hukum Pemohon telah mengakui bahwa tingkat kehadiran Pemilih yang meningkat tinggi hampir 100% tidak ada pelanggaran. Semua proses dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan dapat diuji, mulai dari peroses dan hasil pemungutan dan

penghitungan suara di TPS dapat diuji hasilnya dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, karena selama pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara telah diberikan kesempatan bagi seluruh saksi pasangan calon atau Panwas Kecamatan untuk mengajukan keberatan untuk melakukan perbaikan apabila dalam pelaksanaan rekapitulasi yang tidak sesusai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya telah terjadi kesalahan penulisan atau penjumlahan atau terdapat perubahan perolehan suara pasangan calon, maka dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan, dan jika terdapat perbedaan perolehan suara saksi dapat mengajukan keberatan untuk perbaikan terhadap perbedaan perolehan suara dimaksud. Dalam forum rapat pleno di tingkat PPK maupun tingkat KPU Kabupaten Pamekasan, saksi pasangan calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan, maka PPK maupun KPU Kabupaten Pamekasan memberikan penjelasan terkait dengan keberatan yang diajukan saksi, maka jika saksi masih tidak puas atas penjelasan PPK maupun KPU Kabupaten Pamekasan, maka dapat meminta pendapat dari Panwas Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Pamekasan, yang pendapatnya bisa dalam bentuk saran perbaikan atau dalam bentuk rekomendasi, dan PPK maupun KPU Kabupaten Pamekasan harus menindaklanjuti atas rekomendasi dimaksud.

f. Bahwa dalam dalil permohonan *a quo*, Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan konstruksi hukum peristiwa konkritnya terkait dengan tingkat kehadiran 100% disebabkan oleh keadaan dan peristiwa apa dan apa akibatnya terhadap tingkat kehadiran meningkat tinggi. Sebab, tingkat partisipasi pemilih 100% di beberapa TPS dalam pemilu dan pemilihan dapat saja terjadi, disebabkan karena jenis pemilihan serentak tahun 2024, terdapat 2 (dua) jenis pemilihan, yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemekasan yang bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2024. Maka tingkat kehadiran pemilih menjadi tinggi, sangat mungkin dipengaruhi oleh salah satu

atau kedua jenis pemilihan, apakah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atau keduanya jenis pemilihan tersebut mempengaruhi tingkat kehadiran pemilih menjadi tinggi. Jadi, dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak relevan jika hanya mendalilkan tingkat kehadiran hampir 100% saja tanpa tidak diikuti oleh penjelasan dan uraian kenapa hal itu terjadi, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas.

g. Bahwa dalam mendalilkan pokok permohonan Pemohon juga tidak fair, karena berdasarkan pokok permohonan awal, Pemohon telah membuktikan sendiri bahwa tingkat kehadiran hampir 100% di TPS-TPS perolehan suara Pemohon mendominasi di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon sebagaimana tertuang pada halaman 20 sampai dengan halaman 22. Sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon hanya bersifat narasi yang sebenarnya tingkat kehadiran Pemilih hampir 100% tidak dipengaruhi oleh suatu sebab pengkondisian atau pelanggaran, namun Pemilih benar-benar hadir di TPS hanya untuk menyatakan kehendak hak konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2024, buktinya perolehan suara Pemohon mendominasi di TPS-TPS yang didalilkan tingkat kehadiran Pemilih 100%.
h. Bahwa tingkat kehadiran yang tinggi bukan merupakan pelanggaran, karena KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta pemerintah berusaha secara maksimal agar tingkat partisipasi meningkat dan tinggi. Kemudian Pemohon melihat partisipasi pemilih tinggi yang menggunakan hak konstitusionalnya, Pemohon mempersoalkan dan mendalilkan itu seolah-olah merupakan pelanggaran, lalu dimana letak pelanggarannya dan apa dasar hukumnya partisipasi Pemilih merupakan pelanggaran.
i. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 3, halaman 22, yang terkait dengan keberatan saksi Pemohon pada

saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Pamekasan yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi merupakan hak Pemohon setelah Pemohon mengetahui kalah dalam perolehan suara. Regulasi telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada peserta pemilihan untuk melakukan keberatan, koreksi dan perbaikan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan. Tentu keberatan dan perbaikan dilakukan pada saat pelaksanaan tahapan berlangsung, dan bukan dilakukan setelah tahapan selesai dilaksanakan. Seharusnya keberatan, koreksi dan perbaikan yang disampaikan oleh peserta pemilih sesuai dengan waktu dan pada tempatnya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas terkait dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, keberatan yang diajukan atau disampaikan Pemohon setelah tahapan selesai dilakukan oleh Termohon, maka keberatan yang disampaikan Pemohon tersebut bukan dalam kualifikasi melakukan koreksi atau perbaikan terhadap (khususnya) tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, karena pada saat tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berlangsung, Pemohon tidak pernah melakukan atau mengajukan keberatan, koreksi dan perbaikan, tetapi setelah diketahui Pemohon kalah dalam perolehan suara, justru Pemohon “mencari-cari” kesalahan Termohon atau Pihak Terkait untuk dijadikan dalil permohonan. Perlu dicatat oleh Pemohon bahwa Mahkamah bukan sebagai tempat untuk menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan yang sudah selesai dilakukan, karena kewenangan Mahkamah dalam perkara perselisihan hanya terbatas pada penetapan hasil perolehan suara, dan Mahkamah tidak dapat “dipaksa” untuk memeriksa keberatan Pemohon yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah, sebab dalil permohonan Pemohon yang tidak menerima hasil pemilihan diajukan kepada Mahkamah, tentu dalil-dalil permohonan Pemohon telah “dikemas” dan “dikreasi” dalam bentuk dalil-dalil permohonan yang tentu telah mengalami distorsi atas originalitas pelaksanaan tahapan yang sudah selesai dilakukan oleh

Termohon dan telah diawasi secara ketat oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan, bahkan dalil-dalil permohonan telah memutarbalikan fakta yang sebenarnya. Maka oleh karenanya, seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan hanya bersifat asumsi, opini, narasi dan menyesatkan, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

B. TERJADINYA PELANGGARAN MONEY POLITIC (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN OLEH PASLON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon huruf B pada halaman 23 yang mendalilkan terjadinya pelanggaran money politik (politik uang) yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, maka Pihak Terkait akan menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan *"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih"*.
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".*
c. Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan: *"Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah".*

d. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka penerapan ketentuan di atas dapat diterapkan ketika masa kampanye dan tidak di luar masa kampanye atau harus sesuai dengan jadwal kampanye peserta pemilihan (pasangan calon).
e. Bahwa Pemohon telah melaporkan dugaan politik uang kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan sebagaimana Register Laporan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/16.28/X/2024, dan Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah melakukan penanganan bersama Sentra Gakkumdu, serta telah diputsukan bahwa laporan tersebut bukan merupakan kualifikasi pelanggaran politik uang.
f. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah menyatakan bahwa telah ditetapkan 1 (satu) tersangka merupakan dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan, karena berdasarkan fakta dan bukti telah membuktikan bahwa tidak ada yang ditetapkan sebagai tersangka, dan bahkan telah dihentikan oleh Kepolisian dengan alasan tidak ada kejadian politik uang sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal mana akan disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan dalam persidangan Mahkamah.
g. Bahwa berkenaan dengan pelanggaran politik uang dalam kualifikasi pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif telah diatur dalam ketentuan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan: *"Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif*".

   Bahwa ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur terkait dengan norma

larangan *“menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.* Jadi, norma ketentuan Pasal 135A tersebut berkaitan dengan politik uang dan bukan terkait dengan pelanggaran yang lain.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menjelaskan terkait dengan terstruktur, sistematis dan massif, yaitu:

Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Massif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

h. Bahwa jelas kiranya, pelanggaran yang bersifat TSM (terstruktur, sistematis dan massif) hanya diberlakukan terhadap pelanggaran politik uang sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) *jo* Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan tidak dapat diberlakukan selain pelanggaran memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan an/atau Pemilih.

i. Bahwa fakta telah membuktikan tidak ada pelanggaran yang bersifat TSM yang ditangani dan diproses oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan pelanggaran politik uang yang terjadi di Kabupaten Pamekasan. (*vide* Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Maka dengan demikian, Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/16.28/X/2024, hanya berkaitan dengan politik uang dalam perspektif tindak pidana pemilihan (*vide* Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) dan bukan dalam perspektif pelanggaran administrasi yang terjadi secara TSM sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

j. Bahwa terhadap Laporan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/16-28/X/2024 telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan bersama Sentra

Gakkumdu dan laporan dimaksud telah dihentikan dan bukan dalam kualifikasi pelanggaran politik uang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Jadi dengan dihentikannya laporan dimaksud, maka pernyataan kuasa hukum Pemohon di persidangan Mahkamah yang menyatakan telah ditetapkan 1 (satu) tersangka adalah tidak benar dan tidak berdasar.

k. Bahwa berdasarkan urian di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

C. PELANGGARAN NETRALITAS OLEH KEPALA DESA.

1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon pada huruf C, halaman 23 terkait dengan netralitas kepala desa, karena faktanya tidak terjadi pelanggaran netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan tahun 2024.
2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf g dan huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menyatakan: *"Kepala Desa dilarang:*
   huruf g: "menjadi pengurus partai politik".
   huruf j: "ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah".
3) Bahwa ketentuan Pasal 29 huruf g dan huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, telah mengatur norma terkait dengan kedudukan dan tindakan kepala desa dalam pemilu dan pemilihan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan di atas.
4) Bahwa Pemohon tidak dapat mengkontruksikan dalil-dalil permohonan terkait dengan netralitas kepala desa, karena Pemohon tidak mendalilkan siapa kepala desa yang mendukung pasangan calon, bagaimana bentuk dukungannya, caranya bagaimana, dimana dan kapan dukungan itu dilakukan, dan apakah terdapat relevansinya dengan perolehan suara Pihak Terkait. Maka konstruksi peristiwa konkritnya harus dijelaskan dan

diuraikan dengan jelas dan terang, agar dapat diperoleh fakta bahwa netralitas kepala desa yang didalilkan Pemohon memiliki relevansinya dengan perolehan suara Pihak Terkait, karena perkara perselisihan hasil pemilihan *a quo* berkaitan dengan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.

5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan: *"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon terdapat larangan bagi kepala desa"*.

   Bahwa larangan bagi kepala desa adalah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, dalam bentuk tertulis, maka yang dilarang adalah membuat keputusan secara tertulis. Jika pelanggaran itu terjadi, maka dalam kualifikasi tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

6) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terdapat 2 (dua) norma terkait dengan larangan bagi kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan, yaitu pelanggaran yang bersifat administrasi dan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Jika kepala desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan, maka termasuk dalam kualifikasi pelanggaran administrasi, sedangkan terhadap pelanggaran membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka termasuk dalam kualifikasi pelanggaran tindak pidana pemilihan.

7) Bahwa norma yang tertuang dalam ketentuan Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye, maka ketentuan tersebut bermakna aktif, artinya kepala desa secara aktif ikut dalam kegiatan kampanye pasangan calon. Namun, jika diluar kegiatan kampanye dan tidak ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan dan sepanjang tidak membuat keputusan tertulis (vide Pasal

71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), tidak ada larangan bagi kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan.

8) Bahwa Pemohon telah melaporkan kepala desa yang diduga mendukung pasangan calon kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan, maka Bawaslu Kabupaten Pamekasan dalam memproses laporan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, apakah laporan terssbut dalam kualifikasi pelanggaran administrasi ataukah pelanggaran tindak pidana pemilihan. Jika laporan tersebut dalam kualifikasi pelanggaran administrasi, maka diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan: *"Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis"*. Namun jika pelanggarannya dalam kualifikasi tindak pidana pemilihan, maka diterapkan ketentuan Pasal Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan: *"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)"*.

9) Bahwa laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan terkait dengan dukungan kepala desa telah diproses dan ditangani Bawaslu Kabupaten Pamekasan, dan hasil kajiannya tidak ada pelanggaran netralitas kepala desa, baik sebelum maupun setelah penetapan pasangan calon.

10) Bahwa fakta telah membuktikan tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang dilimpahkan atau diteruskan kepada Bupati, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, maka dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

D. PELANGGARAN BERUPA PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI SATU KALI

1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada huruf D, halaman 24 dan halaman 25 terkait dengan pelanggaran berupa pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, karena faktanya di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon tidak terjadi dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
2) Bahwa dalil permohonan Pemohon hanya bersifat asumsi, karena sangat kecil kemungkinan Pemilih mencoblos lebih dari satu kali, karena dalam proses pelaksanaan pemungutan suara diawasi oleh Pengawas TPS, saksi pasangan calon dan pemantau pemilihan dan warga masyarakat di TPS. Maka jika ada Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, maka dapat dipastikan akan diketahui dengan mudah, karena Pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali akan ketahuan dengan dibuktikan dengan salah satu jari Pemilih sudah ada tinta pemilihan, dan tidak mungkin Pemilih akan mendapatkan lebih dari satu surat suara dalam satu jenis pemilihan. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, dalam halaman 21, pada angka 4 huruf a dinyatakan: *Anggota KPPS Keempat bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara: (a) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memastikan bahwa belum terdapat tanda khusus berupa tinta yang tersedia di TPS pada seluruh jari tangan Pemilih atau pada bagian tubuh lainnya bagi Pemilih disabilitas fisik".* Jadai, Pemilih yang akan memberikan suara, diperiksa terlebih dahulu jari Pemilih untuk memastikan bahwa terdapat tanda khusus berupa tinta di jari Pemilih, dan jika jari Pemilih sudah ada tinta, maka Pemilih dapat dipastikan sudah pernah menggunakan hak pilihnya, dan mungkin KPPS akan memberikan surat suara bagi Pemilih yang jarinya sudah ada tintanya.
3) Bahwa apabila terdapat Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, maka Pengawas TPS akan menyampaikan hasil pengawasannya kepada PKD atau Panwas Kecamatan, dan oleh Panwas Kecamatan akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan dan jika itu benar, akan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

direkomendasikan pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan: *"Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: (d) lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda"*.

4) Bahwa fakta telah membuktikan, tidak ada hasil pengawasan Pengawas TPS, PKD. Panwas Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang menemukan Pemilih mencoblos lebih dari satu kali sebagaimana yang didalilkan Pemohon *a quo*, dan tidak rekomendasi dari Panwas Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang merekomendasikan pemungutan suara ulang terhadap TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon.
5) Bahwa di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon terdapat saksi pasangan calon, maka jika terjadi Pemilih mencoblos lebih dari satu kali, saksi pasangan calon dapat mengajukan keberatan yang disampaikan secara langsung dan atas kejadian tersebut saksi mengisi Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati, sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menyatakan: *"Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketua KPPS dibantu anggota KPPS: mengisi pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK"*.
6) Bahwa di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon *a quo,* seluruh saksi pasangan calon menandatangi Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, maka jika kejadian Pemilih mencoblos lebih dari satu kali, saksi pasangan calon tidak akan menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menyatakan: *"Dalam hal terdapat Saksi yang hadir*

tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KWK".

7) Bahwa dengan ditandatanganinya seluruh Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati oleh saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon, maka secara hukum Pemohon mengakui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4, Desa Tebul Timur, TPS 8 Desa Waru Timur, TPS 5, Desa Panaan dan TPS 7, Desa Blaban, karena Pemohon memberikan kepada saksi mandat untuk mengikuti dan mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan sekaligus menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.
8) Bahwa dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2024, Yang Mulai Hakim Mahkamah menyampaikan bahwa bukti P-108, bukti P-109, bukti P-110 dan bukti P-111, yang tertuang dalam *flashdisk* tidak sesuai dengan isinya, maka bukti-bukti tersebut setidak-tidaknya tidak dapat dijadikan bukti dalam persidangan Mahkamah.
9) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

E. ADANYA KEJADIAN NAMA PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAKNYA BERDASARKAN DPT, TERNYATA SUDAH MENINGGAL DUNIA SEBELUM TANGGAL 27 NOPEMBER 2024.

1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada huruf E, halaman 25 sampai dengan halaman 44, karena dalil Pemohon hanya bersifat mengulang dalil permohonan pada huruf A, halaman 8 sampai dengan halaman 22, sehingga yang didalilkan adalah dalil yang sama berkaitan dengan Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dengan demikian membuktikan dalil permohonan Pemohon tidak ada dalil yang baru.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

2) Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 1, halaman 25, mengulang dalil permohonan pada dalil huruf A, angka 2.4, halaman 21, maka Pihak Terkait tetap pada keterangan yang terdahulu secara *mutatis mutandis* menjawab dalil permohonan Pemohon *a quo*, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.
3) Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 2, halaman 25 dan halaman 26, mengulang dalil permohonan pada huruf A, angka 2.5, halaman 22, maka Pihak Terkait tetap pada keterangan yang terdahulu secara *mutatis mutandis* untuk menjawab dalil permohonan *a quo,* sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.
4) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 8 sampai dengan angka 90, halaman 29 sampai dengan halaman 44 dalam permohonan *a quo,* merupakan yang tidak jelas dan kabur, karena Pemohon tidak menjelaskan siapa nama Pemilih yang meninggal dunia. Pemohon hanya mendalilkan Pemilih yang sudah meninggal dunia dan tidak mendalilkan Pemilih yang sudah meninggal dunia digunakan untuk memilih, maka terkait dengan dalil permohonan *a quo*, tidak ada permasalahan dan bukan merupakan pelanggaran, karena KPPS saat pemungutan suara di TPS sudah memberikan tanda untuk Pemilih yang sudah meninggal dunia. Maka selanjutnya Pihak Terkait akan memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut:
    1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 8, halaman 29, di TPS 10, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
        - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
        - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak dan tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak ada

yang salah serta tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru peningkatan partisipasi Pemilih menjadi taget Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaran Pemilihan.

- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MOH GAFUR telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 10, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-65).

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalm DPT sudah meninggal dunia, pada angka 9, halaman 29, di TPS 11, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
   - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
   - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak dan tingkat kahadiran hampir 100% tidak ada yang salah serta tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru peningkatan partisipasi Pemilih menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
   - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama GAZALI AZIZI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 11, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-66).
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalm DPT

sudah meninggal dunia, pada angka 10, halaman 29, di TPS 04, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, tingkat kehadiran Pemilih tidak 100%, yang dapat dibuktikan jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 561 Pemilih, sedangkan jumlah pengguna hak pilih sejumlah 435 Pemilih.
- Tingkat partisipasi meningkat tidak ada yang salah dan tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru peningkatan partisipasi Pemilih menjadi target Pemohon dan Pemerintah dalam penyelanggaraan Pemilihan.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama HERRY PURNOMO telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 4, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-67).

4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalm DPT sudah meninggal dunia, pada angka 11, halaman 30, di TPS 7, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
   - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.

- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak dan tidak ada yang salah serta tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru peningkatan partisipasi Pemilih menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama SITI AISYAH telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 7, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-68).

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalm DPT sudah meninggal dunia, pada angka 12, halaman 30, di TPS 2, Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
   - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
   - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak dan tidak ada yang salah serta tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru peningkatan partisipasi Pemilu menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaran Pemilihan.
   - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama ILYAS telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 2, Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2, Desa Panaan, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-69).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalm DPT sudah meninggal dunia, pada angka 13, halaman 30, di TPS 3, Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
   - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
   - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak dan tidak ada yang salah serta tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru peningkatan partisipasi Pemilih, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
   - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama A. ZAIM telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 3, Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3, Desa Panaan, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-70).
7. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalm DPT sudah meninggal dunia, pada angka 14, halaman 30, di TPS 1, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
   - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
   - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak dan tidak ada yang salah serta tidak dalam

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

kualifikasi pelanggaran, justru peningkatan partisipasi Pemilih menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.

- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 1, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, namun saksi Pemohon tidak menuliskan nama di Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-71).

8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalm DPT sudah meninggal dunia, pada angka 15, halaman 30, di TPS 1, Desa Campor, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
   - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
   - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak dan tidak ada yang salah serta tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru peningkatan partisipasi Pemilih menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
   - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 3, Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, tetapi tidak menuliskan namanya di Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, Desa Campor, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-72).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

9. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalm DPT sudah meninggal dunia, pada angka 16, halaman 31, di TPS 3, Desa Campor, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
   - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
   - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah dan tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justri peningkatan partisipasi Pemilih menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
   - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 3, Desa Campor, Kecamatan Proppo, tetapi saksi Pemohon tidak menulis namanya di Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3, Desa Campor, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-73).
10. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalm DPT sudah meninggal dunia, pada angka 17, halaman 31, di TPS 6, Desa Campor, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
   - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
   - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru peningkatan partisipasi Pemilih menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.

- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama AINUL KORI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 6, Desa Campor, Kecamatan Proppo, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6, Desa Campor, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-74).

11. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalm DPT sudah meninggal dunia, pada angka 18, halaman 31, di TPS 7 Desa Campor, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru peningkatan partisipasi Pemilih menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama FAUZAN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 7, Desa Campor, Kecamatan Proppo, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7, Desa Campor, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-75).
12. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar

dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalm DPT sudah meninggal dunia, pada angka 19, halaman 31, di TPS 2, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran partisipasi Pemilih hampir 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MOH. HUDDIN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 2, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2, Desa Mapper, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-76).

13. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalm DPT sudah meninggal dunia, pada angka 20, halaman 31, di TPS 3, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah tingkat kehadiran partisipasi Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.

- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon tidak hadir, maka tidak menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 3, Desa Mapper, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-77).

14. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalm DPT sudah meninggal dunia, pada angka 21, halaman 31, di TPS 4, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran pastisipasi Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Fakta telah membuktikan bahwa semua saksi pasangan calon tidak hadir, maka tidak menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 4, Desa Mapper, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-78).
15. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalm DPT sudah meninggal dunia, pada angka 22, halaman 32, di TPS 1, Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 1, Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, tetapi saksi Pemohon namanya tidak terbaca, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-79).

16. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 23, halaman 32, di TPS 5, Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama WUKUF telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 5, Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5, Desa Panaguan, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-80).

17. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 24, halaman 32, di TPS 3, Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MUAMMAR telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 3, Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3, Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan. (*vide* Bukti PT-81).
18. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 25, halaman 32, di TPS 4, Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama ABD. RORIS telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 4, Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4, Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan. (*vide* Bukti PT-82).

19. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 26, halaman 32, di TPS 6, Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama HASAN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 6, Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6, Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan. (*vide* Bukti PT-83).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

20. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 27, halaman 33, di TPS 2, Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Berdasarkan Model C.Hasil.Salinan-KWK-Bupati di TPS 2, Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan tingkat kehadiran Pemilih tidak 100%, karena jumlah Pemilih dalam DPT 402, sedangkan jumlah penggunaan hak pilih sejumlah 348.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MUSTAIN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 2, Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2, Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan. (*vide* Bukti PT-84).
21. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 28, halaman 32, di TPS 6, Desa Panglengur, Kecamatan Tlanakan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

- Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MOH FUJARUL MAULIDI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 6, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan. (*vide* Bukti PT-85).

22. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 29, halaman 32, di TPS 1, Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama ABDUS SALAM telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 1, Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu,

maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu. (*vide* Bukti PT-86).

23. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 30, halaman 32, di TPS 1, Desa Sopa'ah, Kecamatan Pademawu, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Perolehan suara di TPS 1, Desa Sopa'ah, Kecamatan Pademawu, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 251 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 176 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 1 dimaksud.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama ILHAM WAHYUDI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 1, Desa Sopa'ah, Kecamatan Pademawu, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, Desa Sopa'ah, Kecamatan Pademawu. (*vide* Bukti PT-87).
24. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 31, halaman 33, di TPS 1, Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu, merupakan pengulangan dalil

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

pada angka 29, halaman 33, maka keterangan Pihak Terkait tetap pada keterangan pada angka 29, halaman 33 secara mutatis mutandis menjawab dalil pada angka 31, halaman 33.

25. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 32, halaman 33, di TPS 2, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pademawu, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Kabupaten Pamekasan tidak ada Desa Sana Tengah, Kecamatan Pademawu, yang ada adalah Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean.
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Perolehan suara di TPS 2, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 331 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 260 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 2 dimaksud.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MOH YASIN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 2, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean. (*vide* Bukti PT-88).
26. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar

dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 33, halaman 34, di TPS 1, Desa Bangreseh, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama TOHARI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 1, Desa Bangreseh, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, Desa Bangreseh, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-89).

27. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 34, halaman 34, di TPS 1, Desa Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru

menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.

- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama ANDRI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 1, Desa Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, Desa Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-90).

28. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 35, halaman 34, di TPS 10, Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama PUNARDI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 10, Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-91).
29. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 36, halaman 34, di TPS 4, Desa

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Perolehan suara di TPS 4, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 371 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 51 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 4 dimaksud.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 4, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, tetapi saksi Pemohon tidak menulis namanya di Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-92).

30. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 37, halaman 34, di TPS 5, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumaramar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna

hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.

- Perolehan suara di TPS 5, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 324 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 210 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 5 dimaksud.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama ALI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 5, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-93).

31. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 38, halaman 35, di TPS 6, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Perolehan suara di TPS 6, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 457 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 125 suara,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 6 dimaksud jika perolehan suara didominasi oleh Pemohon.

- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama SOMAD telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 6, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-94).

32. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 39, halaman 35, di TPS 7, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Perolehan suara di TPS 7, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 227 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 137 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 7 dimaksud jika perolehan suaranya didominasi oleh Pemohon.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama BABUN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 7, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-95).

33. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 40, halaman 35, di TPS 9, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 9, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, tetapi saksi Pemohon tidak menulis namanya di Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-96).
34. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 41, halaman 35, di TPS 1, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MOH RASUL H. telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 1, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-97).

35. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 42, halaman 35, di TPS 2, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MARSUKI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 2, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean. (*vide* Bukti PT-98).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

36. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 43, halaman 35, di TPS 4, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama SUPRIONO telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 4, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-99).
37. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 44, halaman 36, di TPS 5, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.

- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama LUKMAN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 5, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-100).

38. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 45, halaman 36, di TPS 6, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama TOTOK HARTONO telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 6, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-101).
39. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

sudah meninggal dunia, pada angka 46, halaman 36, di TPS 7, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama JUNAIDI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 7, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-102).

40. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 47, halaman 36, di TPS 9, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.

- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MOHAMMAD IMAM WAHYUDI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 9, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-103).

41. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 48, halaman 36, di TPS 2, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama JUNAIDI HAMAS telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 2, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-104).
42. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 49, halaman 37, di TPS 3, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

- Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Perolehan suara di TPS 3, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 334 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 249 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 3 dimaksud.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama SAED telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 3, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-105).

43. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 50, halaman 37, di TPS 2, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar merupakan pengulangan dalil pada angka 48, halaman 36, maka Pihak Terkait tetap pada keterangan angka 48, halaman 36 secara mutatis mutandis untuk menjawab dalil angka 50, halaman 37.
44. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 51, halaman 37, di TPS 4, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

- Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Perolehan suara di TPS 4, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 288 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 292 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 4 dimaksud.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama KADIR telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 4, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-106).

45. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 52, halaman 37, di TPS 5, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru

menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.

- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama ACHMAD WESITURRAHMAN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 5, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5, Desa BujurTengah, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-107).

46. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 53, halaman 37, di TPS 6, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani tanpa menyebutkan nama saksi pemohon di Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 6, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-108).
47. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 54, halaman 37, di TPS 7, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani tanpa menyebutkan nama saksi pemohon di Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 7, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-109).

48. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 55, halaman 38, di TPS 9, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru

menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.

- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MISKAN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 9, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-110).

49. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 56, halaman 38, di TPS 10, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Perolehan suara di TPS 10, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 247 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 263 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 10 dimaksud.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama ACH SYAMSUL telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 10, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-111).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

50. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 57, halaman 38, di TPS 11, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Perolehan suara di TPS 11, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 301 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 227 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 11 dimaksud.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon tanpa menyebutkan nama saksi pemohon di Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 11, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-112).
51. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 58, halaman 38, di TPS 12, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Perolehan suara di TPS 12, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 241 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 237 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 12 dimaksud.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama ACH. MASYHUR telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 12, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-113).

52. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 59, halaman 38, di TPS 13, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MOH JAILANI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-

Bupati di TPS 13, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 13, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-114).

53. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 60, halaman 39, di TPS 14, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama ZAINUDDIN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 14, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar. (*vide* Bukti PT-115).
54. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 61, halaman 39, di TPS 2, Desa Campor, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

- Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Perolehan suara di TPS 2, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 407 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 186 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 2 dimaksud.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MANSUR telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 2, Desa Campor, Kecamatan Proppo, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2, Desa Campor, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-116).

55. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 62, halaman 39, di TPS 4, Desa Campor, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru

menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.

- Perolehan suara di TPS 4, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 338 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 259 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 4 dimaksud.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama KARDI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 4, Desa Campor, Kecamatan Proppo, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4, Desa Campor, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-117).

56. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 63, halaman 39, di TPS 5, Desa Campor, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Perolehan suara di TPS 5, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 330 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 260 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 5 dimaksud.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MAKKI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

di TPS 5, Desa Campor, Kecamatan Proppo, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5, Desa Campor, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-118).

57. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 64, halaman 39, di TPS 8, Desa Campor, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Perolehan suara di TPS 8, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 315 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 253 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 8 dimaksud.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama LUKMAN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 8, Desa Campor, Kecamatan Proppo, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8, Desa Campor, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-119).
58. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 65, halaman 39, di TPS 11,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Desa Campor, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Perolehan suara di TPS 11, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 528 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 21 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 11 dimaksud.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama ABD ROHMAN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 11, Desa Campor, Kecamatan Proppo, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11, Desa Campor, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-120).

59. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 66, halaman 40, di TPS 4, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat

kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.

- Perolehan suara di TPS 4, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 302 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 262 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 4 dimaksud, sedangkan perolehan suara Pemohon memperoleh suara terbanyak.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MOH. FARHAN WILDANI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 4 Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-121).

60. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 67, halaman 40, di TPS 8, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Perolehan suara di TPS 8, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 296 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 186 suara, maka apa

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

maksud Pemohon mendalilkan TPS 8 dimaksud, sedangkan perolehan suara Pemohon memperoleh suara terbanyak.

- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama ST FAJRIYAH NOER telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 8, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-122).

61. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 68, halaman 40, di TPS 1, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama RIFATUN NABILA telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 1, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-123).
62. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

sudah meninggal dunia, pada angka 69, halaman 40, di TPS 8, Desa Rekkerrek Tengah, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Perolehan suara di TPS 8, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 272 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 136 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 8 dimaksud, sedangkan perolehan suara Pemohon memperoleh suara terbanyak.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama RAHMAN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 8, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-124).

63. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 70, halaman 40, di TPS 12, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Perolehan suara di TPS 12, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 279 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 169 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 12 dimaksud, sedangkan perolehan suara Pemohon memperoleh suara terbanyak.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama ABD HAMID telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 12, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-125).

64. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 71, halaman 41, di TPS 13, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.

- Perolehan suara di TPS 13, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 400 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 185 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 13 dimaksud, sedangkan perolehan suara Pemohon memperoleh suara terbanyak.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MAHRUM telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 13, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 13, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-126).

65. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 72, halaman 41, di TPS 14, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan Akta Kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Perolehan suara di TPS 14, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 310 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 250 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 14 dimaksud, sedangkan perolehan suara Pemohon memperoleh suara terbanyak.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama NASIR telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 14, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14, Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-127).

66. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 73, halaman 41, di TPS 1, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Perolehan suara di TPS 1, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 488 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 49 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 1 dimaksud, sedangkan perolehan suara Pemohon memperoleh suara terbanyak.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama AIRUZ telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 1, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-128).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

67. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 74, halaman 41, di TPS 3, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Perolehan suara di TPS 3, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 365 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 139 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 3 dimaksud, sedangkan perolehan suara Pemohon memperoleh suara terbanyak.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MISTIYAH telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 3, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-129).
68. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 75, halaman 41, di TPS 5, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

- Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta Kematian dari Dispendukcapil.
- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Perolehan suara di TPS 5, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 303 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 207 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 5 dimaksud, sedangkan perolehan suara Pemohon memperoleh suara terbanyak.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 5, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, tetapi saksi Pemohon tidak menulis namanyadi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-130).

69. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 76, halaman 41, di TPS 6, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat

kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.

- Perolehan suara di TPS 6, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 346 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 173 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 6 dimaksud, sedangkan perolehan suara Pemohon memperoleh suara terbanyak.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 6, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, tetapi saksi Pemohon tidak menulis namanyadi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-131).

70. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 77, halaman 42, di TPS 9, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama ABD MUKMIN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 9, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, maka

secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-132).

71. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 78, halaman 42, di TPS 13, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Perolehan suara di TPS 13, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 287 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 207 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 13 dimaksud, sedangkan perolehan suara Pemohon memperoleh suara terbanyak.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MUNAWWAR telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 13, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 13, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-133).
72. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

sudah meninggal dunia, pada angka 79, halaman 42, di TPS 4, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Di Kabupaten Pamekasan tidak ada Desa Totoan Laok, yang ada adalah Desa Potoan Laok.
- Dalil permohonan *a quo* merupakan pengulangan dalil pada angka 4, halaman 27.
- Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian dari Dispendukcapil.
- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama ABD KARIM telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 4, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4, Desa Potoan, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-134).

73. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 80, halaman 42, di TPS 2, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Di Kabupaten Pamekasan tidak ada Desa Totoan Laok, yang ada adalah Desa Potoan Laok.
    - Dalil permohonan *a quo* merupakan pengulangan dalil pada angka 3, halaman 26.

- Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian dari Dispendukcapil.
- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama HOLILI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 2, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-135).

74. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 81, halaman 42, di TPS 3, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Di Kabupaten Pamekasan tidak ada Desa Totoan Laok, yang ada adalah Desa Potoan Laok.
    - Dalil permohonan *a quo* merupakan pengulangan dalil pada angka 2.5 halaman 22, dan angka 2, halaman 25.
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

- Perolehan suara di TPS 3, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 255 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 236 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 3 dimaksud, sedangkan hasil perolehan suara Pemohon memperoleh suara terbanyak.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MOH BADAR AL BASORI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 3, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-58).

75. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 82, halaman 43, di TPS 1, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Perolehan suara di TPS 1, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 350 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 233 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 1 dimaksud, sedangkan perolehan suara Pemohon memperoleh suara terbanyak.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama ARSADIN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 1, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-136).

76. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 83, halaman 43, di TPS 5, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Perolehan suara di TPS 5, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 447 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 138 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 5 dimaksud, sedangkan perolehan suara pemohon memperoleh suara terbanyak.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 5, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, tetapi saksi pemohon tidak menulis nama di Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-137).

77. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 84, halaman 43, di TPS 6, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Perolehan suara di TPS 6, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 379 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 196 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 6 dimaksud, sedangkan suara perolehan pemohon memperoleh suara terbanyak.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama RIZAL telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 6, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-138).
78. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 85, halaman 43, di TPS 8, Desa

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Banyupelle, Kecamatan Palengaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil.
- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Perolehan suara di TPS 8, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 299 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 283 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 8 dimaksud, sedangkan perolehan suara pemohon memperoleh suara terbanyak.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama HASIP telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 8, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan. (*vide* Bukti PT-139).

79. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 86, halaman 43, di TPS 3, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian dari Dispendukcapil.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama FATHOR ROSI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 3, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean. (*vide* Bukti PT-140).

80. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 87, halaman 43, di TPS 18, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 13 Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan tingkat kehadiran pemilih tidak 100% karena jumlah pemilih dalam DPT sejumlah 559, sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 487.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama IMAM telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

18, Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 18, Desa Plakpak, Kecamatan Pegntenan. (*vide* Bukti PT-141).

81. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 88, halaman 44, di TPS 1, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
    - Dalil permohonan *a quo* merupakan pengulangan dalil pada angka 1, halaman 18.
    - Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian dari Dispendukcapil.
    - Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
    - Berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati tingkat kehadiran pemilih tidak 100% karena jumlah pemilih dalam DPT sejumlah 543 pemilih sedangkan jumlah pengguna hak pilih sejumlah 411 pemilih.
    - Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama MARSUKAH telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 1, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, Desa Mapper, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-57).
82. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar

dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 89, halaman 44, di TPS 4, Desa Rangperang Daya, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian dari Dispendukcapil.
- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati tingkat kehadiran pemilih tidak 100% karena jumlah pemilih dalam DPT sejumlah 351 pemilih sedangkan jumlah pengguna hak pilih sejumlah 322 pemilih.
- Perolehan suara di TPS 4, Desa Rangperang Daya, Kecamatan Proppo, Pemohon memperoleh suara terbanyak sejumlah 218 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 90 suara, maka apa maksud Pemohon mendalilkan TPS 4 dimaksud, sedangkan perolehan suara Pemohon memperoleh suara terbanyak.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama ABDUL RAHMAN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 4, Desa Rangperang Daya, Kecamatan Proppo, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4, Desa Rangperang Daya, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-142).

83. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%, dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, pada angka 90, halaman 44, di TPS 5, Desa

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Panaguan, Kecamatan Proppo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Dalil permohonan *a quo* merupakan pengulangan dalil pada angka 23, halaman 32.
- Pemohon tidak menjelaskan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, maka dalil permohonan *a quo* tidak jelas, tanpa dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian dari Dispendukcapil.
- Tingkat kehadiran Pemilih 100%, tidak dijelaskan dan diuraikan apakah Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagai pengguna hak pilih atau tidak, dan tidak ada yang salah serta tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- Fakta telah membuktikan bahwa saksi Pemohon atas nama WUKUF telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 5, Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5, Desa Panaguan, Kecamatan Proppo. (*vide* Bukti PT-80).

5) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti di atas, menurut Pihak Terkait dalil permohonan *a quo* tidak berdasarkan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa tingkat kehadiran Pemilih 100% sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak seluruhnya benar, karena di beberapa TPS tingkat kehadiran Pemilih tidak 100%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, tingkat kehadiran Pemilih 100% tidak ada yang salah dan tidak dalam kualifikasi pelanggaran, justru tingkat kehadiran partispasi Pemilih menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan.

b. Bahwa Pemilih yang didalilkan sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT tidak dibuktikan siapa Pemilih yang meninggal dunia dan tidak dibuktikan dengan kutipan akta kematian yang diterbitkan oleh

Dispendukcapil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024, karena Termohon sebagai penyelenggara pemilih tidak dapat dengan serta mengeluarkan Pemilih yang sudah meninggal dunia setelah penetapan DPT pada tanggal 19 September 2024, dan jika sudah meninggal dunia sebelum penetapan DPT, maka Pantarlih menocoret Pemilih yang sudah meninggal dunia sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf h Peraturan KPU (selanjutnya disebut PKPU) Nomor 7 Tahun 2024.

c. Bahwa TPS-TPS yang didalilkan Pemohon di atas, justru perolehan suaranya didominasi oleh Pemohon.

Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak berdasar, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

6) Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut di atas secara substansi hanya mendalilkan Pemilih terhadap yang meninggal dunia saja, tanpa menjelaskan dan menguraikan siapa Pemilih yang meninggal dunia digunakan untuk memilih, dan siapa Pemilih yang menggunakan hak pilih atas nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, serta Pemohon tidak membuktikan secara de jure akta kematian yang diterbitkan oleh Dispendukcapil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024. Jadi menurut Pihak Terkait dalil permohonan tersebut tidak dalam kualifikasi pelanggaran atau yang dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, karena tidak ada relevansinya antara Pemilih yang sudah meninggal dunia dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebab dalil permohonan *a quo* hanya bersifat asumsi dan opini Pemohon.

7) Bahwa dalam menyusun *fundamentum petendi* harus jelas, terang dan lengkap serta dibuktikan dengan alat bukti yang sah, maka tidak bisa dengan serta merta mengasumsikan terdapat beberapa Pemilih yang sudah meninggal dunia tercatat dalam DPT, tanpa dibuktikan secara *de jure* bahwa Pemilih yang sudah meninggal dunia dibuktikan dengan akta kematian yang diterbitkan oleh Dispendukcapil, dan harsu dibuktikan juga Pemilih yang sudah meninggal dunia digunakan untuk memilih.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

8) Bahwa dalil permohonan Pemohon mencampuradukan antara Pemilih yang sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan dengan tingkat kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 100%. Jadi, tidak ada relevansinya antara Pemilih yang meninggal dunia dengan tingkat kehadiran Pemilih mencapai 100%, karena Pemohon mengasumsikan tingkat kehadiran Pemilih mencapai 100%, dan terdapat Pemilih yang sudah meninggal dunia, tanpa dibuktikan dengan alat bukti yang sah, yaitu akta kematian dari Dispendukcapil.
9) Bahwa Termohon menetapkan DPT pada tanggal 19 September 2024, maka jika terdapat Pemilih yang meninggal dunia setelah penetapan DPT, Termohon tidak dapat menghapus atau mengeluarkan Pemilih yang sudah meninggal dunia dari DPT. Terhadap kondisi seperti itu, maka Termohon memberi tanda pada Pemilih yang sudah meninggal dunia pada saat pemungutan suara. Jika, Pemilih yang sudah meninggal dunia sebelum penetapan DPT, maka Termohon dapat mengeluarkan Pemilih yang bersangkutan dari daftar Pemilih yang dibuktikan dengan akta kematian yang diterbitkan oleh Dispendukcapil, karena semua data pemilih yang digunakan oleh Termohon untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, menetapkan DPS, DPSHP dan DPT bersumber dari Dispendukcapil.
10) Bahwa pembuktian pemilih yang sudah meninggal dunia tidak dapat hanya dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa atau surat pernyataan dari keluarga Pemilih yang meninggal dunia, tetapi harus surat keterangan dari Dispendukcapil sebagai instansi yang berwenang untuk menerbitkan perubahan biodata penduduk, karena dasar penyusunan daftar pemilih didasarkan dan bersumber dari data Dispendukcapil, dan bukan dari data kepala desa, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 yang menyatakan: *"Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan"*.

11) Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 menyatakan: *"Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami"*.
12) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka segala perubahan data penduduk dan Pemilih harus dibuktikan secara *de jure* oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan *in casu* Dispendukcapil, sehingga tidak bisa pembuktian perubahan biodata penduduk *in casu* Pemilih yang sudah meninggal dunia hanya dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa atau oleh anggota keluarga Pemilih, kakak, anak, cucu, tetangga, keponakan dari Pemilih yang sudah meninggal dunia.
13) Bahwa setelah ditetapkan DPT bisa saja terjadi Pemilih yang terdaftar dalam DPT meninggal dunia, maka terhadap pemilih yang sudah meninggal dunia pada saat pemungutan suara, petugas KPPS akan memberikan tanda dalam daftar hadir bagi Pemilih yang sudah meninggal untuk menunjukkan bahwa Pemilih yang bersangkutan sudah meninggal dunia, dan KPPS atau PPS tidak akan mendistribukan Model C.Pemberitahuan kepada Pemilih yang sudah meninggal dunia, sehingga Pemilih yang sudah meninggal dunia dapat dipastikan tidak menerima Model C.Pemberitahuan-KWK, sehingga tidak mungkin memberikan hak pilihnya.
14) Bahwa jika terdapat Pemilih yang sudah meninggal dunia digunakan untuk memilih dapat dipastikan Pemilih yang menggunakan hak pilih atas nama Pemilih yang sudah meninggal dunia akan mendapatkan atau menerima 4 (empat) surat suara, yaitu 2 (dua) surat suara untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 2 (dua) surat suara untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan hal itu sangat tidak memungkinkan, karena dalam dalam pelaksanaan pemungutan suara diawasi secara langsung oleh Pengawas TPS dan saksi masing-masing pasangan calon.

15) Bahwa terhadap Pemilih yang sudah meninggal dunia digunakan untuk memilih, maka Pengawas TPS atau saksi dapat mengajukan keberatan secara langsung terhadap Pemilih yang menggunakan hak pilih atas nama Pemilih yang sudah meninggal dunia, dan tidak perlu menunggu setelah mengetahui perolehan suaranya kalah baru mengajukan keberatan, dan jika terdapat kejadian seperti itu, maka saksi pasangan calon menuangkan dalam Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK.
16) Bahwa terhadap TPS-TPS yang didalilkan Pemohon terkait dengan Pemilih yang sudah meninggal dunia digunakan untuk memilih, tidak ada temuan hasil pengawasan Pengawas TPS, PKD, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan Pemilih yang sudah meninggal dunia digunakan untuk memilih, karena jika ditemukan kejadian tersebut, maka Panwas Kecamaatan atau Bawaslu Kabupaten Pamekasan akan melakukan penelitian dan pemeriksaan dan (jika benar) dapat direkomendasikan pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam kualifikasi lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
17) Bahwa fakta telah membuktikan seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, sebagai bentuk pengakuan dan persetujuan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon sebagaimana mandat yang telah diberikan kepada saksi Pemohon di TPS. Saksi Pemohon dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara merupakan representatif Pemohon yang telah memberikan mandat kepada saksi, maka secara hukum apapun tindakan dan keputusan yang diambil oleh saksi merupakan tindakan dan keputusan Pemohon, sehingga dengan keputusan saksi menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati merupakan tindakan dan keputusan Pemohon sebagai bentuk pengakuan dan persetujuan Pemohon atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Maka menjadi tidak

relevan ketika saksi Pemohon telah mendatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, kemudian diingkari oleh Pemohon dengan tidak menandatangai rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK maupun di tingkat KPU Kabupaten Pamekasan, setelah mengetahui perolehan suaranya kalah. Tindakan tersebut menunjukkan sikap tidak fair dan kesatria dalam menerima kekalahan dalam sebuah kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan tahun 2024.

18) Bahwa hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK maupun KPU Kabupaten Pamekasan telah dilakukan oleh Termohon secara konsisten, dan tidak ada perubahan atau penambahan perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta dibuktikan antara pengguna hak pilih dnegan surat suara yang digunakan tetap sama sampai hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, sehingga hal itu membuktikan bahwa Termohon dan jajarannya telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas penyelenggaraan pemilihan.

19) Bahwa penolakan Pemohon terhadap hasil rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Pamekasan merupakan hak Pemohon, namun jangan lupa bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Pamekasan merupakan hasil sebuah proses konstitusional penghitungan perolehan suara yang direkap mulai dari penghitungan suara di TPS yang telah diuji melalui pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan beserta jajaran, saksi pasangan calon, pemantau pemilih dan masyarakat. Maka, penolakan Pemohon terhadap hasil pemilihan merupakan pengingkaran terhadap kehendak warga masyarakat (Pemilih) yang telah diekspresikan secara konstitusional untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan maupun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Timur tahun 2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

20) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya dalil permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

F. ADANYA PELANGGARAN BERUPA INTIMIDASI DAN PENGUSIRAN TERHADAP SAKSI PASLON NOMOR URUT 3 YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA.

1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon *a quo* pada huruf F, halaman 44 dan halaman 45, karena fakta telah membuktikan tidak ada intimidasi dan pengusiran saksi pasangan calon nomor urut 3, hal mana dapat dibuktikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di 33 (tiga puluh tiga) TPS sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan Pemohon. Maka bagaimana mungkin saksi Pemohon dilakukan pengusiran akan menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, maka dalil permohonan Pemohon *a quo* bersifat asumsi dan opini yang menyesatkan.
2) Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak dijelaskan siapa yang melakukan intimidasi atau pengusiran, apakah KPPS atau Pengawas TPS atau Linmas, karena dalil permohonan Pemohon hanya menyebutkan pengusiran saksi Pemohon dilakukan oleh Panitia, dan tidak disebutkan panitia itu siapa.
3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 dinyatakan: *"Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS"*.
4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 2 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 dinyatakan: *"Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memenuhi ketentuan sebagai berikut: harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh: Pasangan Calon*

tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota".

5) Bahwa saksi pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan di atas, maka saksi dapat menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan KPPS tidak boleh menolak kehadiran saksi pasangan calon sepanjang telah memenuhi syarat sebagai saksi.
6) Bahwa dalil permohonan Pemohon terkait dengan adanya intimidasi, Pemohon tidak menjelaskan bentuk dan cara intimidasi seprti apa serta dilakukan oleh siapa, apakah KPPS atau Pengawas TPS atau Linmas.
7) Bahwa fakta telah membuktikan selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada intimidasi kepada saksi Pemohon di 33 (tiga puluh tiga) TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon, dan jikalau itu benar, maka Pengawas TPS atau PKD akan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya selaku pengawas untuk memberikan masukan dan peringatan kepada KPPS jika terjadi intimidasi yang dilakukan KPPS.

   Bahwa di 33 (tiga puluh tiga) TPS yang didalilkan Pemohon tidak ada catatan kejadian khusus/keberatan saksi Pemohon yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK, maka dengan demikian tidak secara hukum saksi Pemohon telah menerima dan mengakui hasil pemungutan dan penghitungan suara di 33 (tiga puluh tiga) TPS.

   Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon adanya pelanggaran berupa intimidasi dan pengusiran terhadap saksi Pemohon di 33 TPS, maka Pihak Terkait akan membuktikan bahwa saksi Pemohon tidak ada tindakan intimidasi dan pengusiran serta saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai bentuk pengakuan dan persetujuan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara di 33 TPS dari Pemohon atas mandat yang diberikan kepada saksi, sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

1. TPS 1, Desa Bangsereh, saksi Pemohon yang bernama SUFAN ASSAURI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-173).
2. TPS 9, Desa Bujur Barat, saksi Pemohon yang bernama SYAFIUDDIN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-96).
3. TPS 5, Desa Bujur Tengah, saksi Pemohon yang bernama ACHMAD WESITURRAHMAN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-107).
4. TPS 6, Desa Bujur Tengah, saksi Pemohon yang bernama M. SHOLAHUDDIN AL AYUBI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-108).
5. TPS 7, Desa Bujut Tengah, saksi Pemohon yang bernama RUDI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-109).
6. TPS 10, Desa Bujur Tengah, saksi Pemohon yang bernama ACH. SYAMSUL telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-111).
7. TPS 4, Desa Bujur Tengah, saksi Pemohon yang bernama ABDUL KADIR telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-106).
8. TPS 6, Desa Dasok, saksi Pemohon yang bernama MULYADI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-62).
9. TPS 4, Desa Dasok, saksi Pemohon yang bernama MOH NURHAMIDI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-61).
10. TPS 7, Desa Larangan Badung, saksi Pemohon yang bernama SITI AISYAH telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan dibuktikan Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait yang bernama ABDUL WALID sebagai saksi Pihak Terkait, yang menyatakan di TPS 7, Desa Larangan Badung tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon. (*vide* Bukti PT-143 dan Bukti PT-68).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

11. TPS 4, Desa Larangan Badung, saksi Pemohon yang bernama HERRY PURNOMO telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan dibuktikan Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait yang bernama SAIQUL KHOIRI sebagai saksi Pihak Terkait, yang menyatakan di TPS 4, Desa Larangan Badung tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon. (*vide* Bukti PT-144 dan Bukti PT-67).
12. TPS 2, Desa Potoan Laok, saksi Pemohon yang bernama HOLILI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan dibuktikan Surat Pernyatan saksi Pihak Terkait yang bernama MOHAMMAD RAI sebagai saksi Pihak Terkait dan saksi Paslon Nomor Urut 1 yang bernama SHOFIATUL MUNAWAROH, yang menyatakan di TPS 2, Desa Potoan Laok tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon. (*vide* Bukti PT-145 dan Bukti PT-161).
13. TPS 1, Desa Potoan Laok, saksi Pemohon yang bernama AMIROSI SAKARI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan dibuktikan Surat Pernyatan saksi Pihak Terkait yang bernama ABD RAHMAN sebagai saksi Pihak Terkait, dan saksi Paslon Nomor Urut 1 yang bernama NUFRIANTO, yang menyatakan di TPS 1, Desa Potoan Laok tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon. (*vide* Bukti PT-146 dan Bukti PT-160).
14. TPS 3, Desa Sana Tengah, saksi Pemohon yang bernama FATHOR ROSI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan dibuktikan Surat Pernyatan saksi Pihak Terkait yang bernama SANIMAN sebagai Pihak Terkait, yang menyatakan di TPS 3, Desa Sana Tengah tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon. (*vide* Bukti PT-147 dan Bukti PT-140).
15. TPS 7, Desa Plakpak, saksi Pemohon yang bernama HARUPI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan dibuktikan Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait yang bernama AHMAD sebagai saksi Pihak Terkait, yang menyatakan di TPS 7, Desa Plakpak tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon. (*vide* Bukti PT-148 dan Bukti PT-165)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

16. TPS 1, Desa Bulangan Branta, saksi Pemohon yang bernama PUDIN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan dibuktikan Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait yang bernama YANTO sebagai saksi Pihak Terkait, yang menyatakan di TPS 1, Desa Bulangan Baranta tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon. (*vide* Bukti PT-149 dan Bukti PT-169).

    Bahwa Pemohon mendalilkan saksi Pemohon yang tanda tangan dalam Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di TPS 1, Desa Bulangan Branta adalah MUH ROFII, sedangkan di dokumen Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati saksi Pemohon tercatat bernama PUDIN.
17. TPS 1, Desa Bulangan Timur, saksi Pemohon yang bernama SAPANDI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan dibuktikan Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait yang bernama A. JEFRIADI sebagai saksi Pihak Terkait, yang menyatakan di TPS 1, Desa Bulengan Timur tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon. (*vide* Bukti PT-150).
18. TPS 6, Desa Palesanggar, saksi Pemohon yang bernama SUBAIDI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan dibuktikan Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait yang bernama SUBAIDI sebagai saksi Pihak Terkait, yang menyatakan di TPS 7, Desa Larangan Badung tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon. (*vide* Bukti PT-151 dan Bukti PT-29).
19. TPS 8, Desa Palesanggar, saksi Pemohon yang bernama ABD KARIM telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan dibuktikan Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait yang bernama MOH. ALI WAFA sebagai saksi Pihak Terkait, yang menyatakan di TPS 8, Desa Palesanggar tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon. (*vide* Bukti PT-152).
20. TPS 6, Desa Pasanggar, saksi Pemohon yang bernama HOSNAN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan dibuktikan Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait yang bernama MOHAMMAD ALI sebagai saksi Pihak Terkait dan saksi Pemohon yang bernama HOSNAN, yang menyatakan di TPS 6, Desa

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Pasanggar tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon. (*vide* Bukti PT-153 dan Bukti PT-163 dan Bukti PT-170).

21. TPS 4, Desa Pasanggar, saksi Pemohon yang bernama MUSLIM telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan dibuktikan Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait yang bernama ACH QUSYAIRI sebagai saksi Pihak Terkait, yang menyatakan di TPS 4, Desa Pasanggar tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon. (*vide* Bukti PT-154 dan Bukti PT-23).
22. TPS 9, Desa Pasanggar, saksi Pemohon yang bernama ABD AZIS telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan dibuktikan Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait yang bernama LUQMANUL HAKIM sebagai saksi Pihak Terkait, yang menyatakan di TPS 9, Desa Pasanggar tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon. (*vide* Bukti PT-155 dan Bukti PT-167).
23. TPS 7, Desa Pasanggar, saksi Pemohon yang bernama MOH HASAN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan dibuktikan Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait yang bernama GHOZALI sebagai saksi Pihak Terkait, yang menyatakan di TPS 7, Desa Pasanggar tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon. (*vide* Bukti PT-156 dan Bukti PT-166).
24. TPS 7, Desa Campor, saksi Pemohon yang bernama FAUSEN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-75).
25. TPS 6, Desa Camor, saksi Pemohon yang bernama AINUL KORI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-74).
26. TPS 3, Desa Campor, saksi Pemohon yang bernama KURDI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-73).
27. TPS 1, Desa Campor, saksi Pemohon yang bernama SUBEIDI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-72).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

28. TPS 3, Desa Jamberingin, saksi Pemohon yang bernama FAISAL telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-168)
29. TPS 2, Desa Kramat, saksi Pemohon yang bernama MUSTAIN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan dibuktikan Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait yang bernama ACH. MAHBUBI sebagai Pihak Terkait dan saksi Paslon Nomor Urut 1 yang bernama M. SUNARTO, yang menyatakan di TPS 2, Desa Kramat tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon. (*vide* Bukti PT-157, Bukti PT-162 dan Bukti PT-84).
30. TPS 1, Desa Sopa'ah, saksi Pemohon yang bernama ILHAM WAHYUDI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-87).
31. TPS 1, Desa Prekbun, saksi Pemohon yang bernama ABDUSSALAM telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. (*vide* Bukti PT-86).
32. TPS 6, Desa Panglegur, saksi Pemohon yang bernama MOH FAJARUL MAULIDI telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan dibuktikan Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait yang bernama ZAINURI sebagai saksi Pihak Terkait, yang menyatakan di TPS 6, Desa Panglegur tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon. (*vide* Bukti PT-158 dan Bukti PT-85).
33. TPS 17, Desa Plakpak, saksi Pemohon yang bernama ACH SAMIAN telah menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan dibuktikan Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait yang bernama BAIDAWI sebagai saksi Pihak Terkait, yang menyatakan di TPS 17, Desa Plakpak tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon. (*vide* Bukti PT-159 dan Bukti PT-164).

Bahwa berdasarkan fakta di atas telah membuktikan saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil.Salinan-KWK-Bupati, maka secara hukum Pemohon telah mengakui dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara di 33 (tiga puluh tiga) TPS tersebut di atas, dan di 33 (tiga puluh tiga) TPS dimaksud tidak ada kejadian khusus/keberatan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

saksi yang dituangkan dalam Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK, dan tidak ada temuan Pengawas TPS, PKD, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Pamekasan terkait dengan intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon oleh Panitia.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait memastikan di 33 TPS yang didalilkan Pemohon tidak pernah ada yang dapat dibuktikan dengan surat pernyataan saksi Pihak Terkait bahkan saksi dari Pemohon maupun saksi dari Paslon Nomor Urut 1. Maka dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

8) Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan terkait dengan saksi Pemohon tidak diberitahukan adanya orang yang meninggal dunia, sehingga para saksi menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, Dalil permohonan Pemohon *a quo* sangat mengada-ada dan menyesatkan, karena setiap saksi mendapatkan salinan DPT, sehingga dan kewajiban saksi menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga setiap Pemilih yang hadir di TPS untuk memberikan suaranya, saksi pasangan calon dapat melihat di Salinan DPT, apakah terdaftar dalam DPT dan apakah Pemilih membawa Model C.Pemberitahuan. Bagi Pemilih yang telah meninggal dunia tidak ada kewajiban KPPS untuk memberitahukan Pemilih yang meninggal dunia kepada para saksi pasangan calon, karena Pemilih yang meninggal dunia tidak mungkin akan memberikan hak pilihnya.

9) Bahwa tidak ada relevansinya antara tidak diberitahu adanya Pemilih yang meninggal dunia dengan saksi Pemohon 3 menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, karena jika dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggaraan pemilihan, maka dapat dijadikan dasar dan alasan saksi untuk tidak menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, dan bukan karena tidak diberitahu adanya Pemilih yang sudah meninggal dunia, lalu saksi menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. Saksi Pemohon telah mendapatkan

Salinan DPT, maka kewajiban saksi Pemohon untuk meminta informasi atau data kepada KPPS terkait dengan Pemilih yang sudah meninggal dunia, dan tugas saksi dalam pelaksanaan pemungutan suara melakukan pengawasan terhadap Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, dan jika terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilih atas nama Pemilih yang meninggal dunia dapat mengajukan keberatan kepada KPPS, dan Pengawas TPS juga akan mengajukan keberatan jika terdapat pelaksanaan pemungutan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggaraan pemilihan. Maka dalil Pemohon *a quo* hanya asumsi, karena dengan tidak diberitahu adanya Pemilih yang sudah meninggal dunia tidak dapat dijadikan alasan bagi saksi Pemohon untuk tidak menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.

10) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak.

G. PEMILIH YANG SUDAH MERANTAU DAN BEKERJA KE LUAR NEGERI YANG TERDAFTAR DALAM DPT, NAMUN DIGUNAKAN OLEH OKNUM TERTENTU UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA.

1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada huruf G, angka 1, halaman 45 sampai dengan halaman 46, namun Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan bentuk pelanggaran dengan modus Pemilih yang merantau digunakan oleh oknum tertentu untuk mencoblos surat suara. Dalil Pemohon *a quo* tidak jelas, siapa yang melakukan pencoblosan atas nama Pemilih yang merantau, serta terjadi di TPS mana saja. Maka menurut Pihak Terkait, dalil permohonan Pemohon *a quo* hanya bersifat asumsi dan opini, sehingga tidak jelas dan kabur.

   Bahwa demikian pula pokok permohonan Pemohon tidak disusun secara lengkap dan jelas dengan menjelaskan dan menguraikan apa yang didalilkan, siapa melalukan apa, dimana kejadinya, kapan terjadinya dan

bagaimana penyelesaiannya, baru setelah itu diajukan bukti untuk memperkuat dalil pokok permohonannya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak faktual dan hanya bersifat asumsi dan persepsi, maka dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

2) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 2, halaman 46, terkait dengan banyak orang yang sudah merantau atau kerja di luar negeri digunakan oleh orang lain untuk mencoblos.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak menguraikan dan menjelaskan tempat kejadiannya di TPS mana saja dan siapa Pemilih yang mencoblos atas nama Pemilih yang merantau atau kerja di luar negeri, dan apa yang dilakukan oleh Pemohon atau saksi Pemohon. Maka dengan demikian, menurut Pihak Terkiat dalil permohonan Pemohon hanya bersifat asumsi Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait melakukan penelitian dan pencocokan terhadap nama-nama yang didalilkan Pemohon di Desa Bujur Timur, Kecamatan Bartumarmar untuk memastikan Pemilih yang bersangkutan merantau atau kerja di luar negeri atau tidak, karena dalam pokok permohonan Pemohon tidak menjelaskan nama-nama yang didalilkan Pemohon tersebut berada di TPS mana saja, sehingga Pihak Terkait kesulitan dalam melakukan penelitian dan pencocokan. Maka dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga tidak layak untuk dijadikan fundamentum petendi sebagai dasar dan ruang lingkup pemeriksaan Mahkamah.

Bahwa apa yang menjadi bukti Pemohon terkait dengan dalil Pemilih yang merantau tersebut digunakan untuk memilih, karena untuk membuktikan Pemilih yang merantau digunakan untuk memilih oleh orang lain, tidak semudah mendalilkan, tetapi harus dibuktikan secara faktual dan dapat dibuktikan dalam daftar hadir apakah Pemilih yang sudah merantau digunakan untuk memilih, dan apakah ada keberatan

dari saksi Pemohon yang dituangkan dalam Model C.Kejadian Khusus/Keberatan dan apakah ada temuan Pengawas TPS atau PKD yang disampaikan kepada Panwas Kecamatan untuk dilakukan penelitian dan pemeriksaan, sehingga dapat dipastikan Pemilih yang merantau digunakan untuk memilih, karena Pemilih yang mencoblos atas nama Pemilih yang sudah merantau tersebut dalam kualifikasi Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan jika benar, maka direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

3) Bahwa fakta telah membuktikan, tidak ada temuan hasil pengawasan Pengawas TPS, PKD, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Pemekasan terkait dengan dalil permohonan Pemohon dan tidak ada rekomendasi Panwas Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Desa Bujur Timur, Keamatan Batumarmar. Jadi, menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon hanya asumsi yang seolah-olah telah terjadi Pemilih yang sudah merantu digunakan untuk memilih, padahal faktanya tidak pernah terjadi.
4) Bahwa berdasarkan Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, saksi Pemohon telah menandatangani dalam formulir tersebut dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon yang dituangkan dalam Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK.
5) Bahwa hasil pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Pamekasan perolehan suara masing-masing pasangan calon tetap konsisten dan tidak ada perubahan atau penambahan perolehan saura masing-masing pasangan calon, maka hal itu sebagai parameter KPU Kabupaten Pamekasan dan jajarannya telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggaraan pemilihan.
6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak jelas, karena tidak menyebutkan TPS mana

saja kejadian yang didalilkan Pemohon, maka dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

H. PEMILIH YANG SUDAH MERANTAU DAN BEKERJA KE LUAR NEGERI YANG TERDAFTAR DALAM DPT, NAMUN DIGUNAKAN OLEH OKNUM TERTENTU UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA.

1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, karena Pemohon dalam menguraikan dalil permohonan tersebut tidak sesuai dengan uraian posita permohonan, sebab yang diuraikan adalah terkait dengan kehadiran Pemilih 100% padahal di daftar pemilih tetap ada yang tidak tanda tangan, dan bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon terkait dengan Pemilih yang sudah merantau dan bekerja ke luar negeri yang terdaftar dalam DPT, namun digunakan okeh oknum tertentu untuk melakukan pencoblosan dalam pemungutan suara. Jadi, sesungguhnya Pemohon mau mendalilkan yang mana, sehingga dalil permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur.
2) Bahwa dalil permohonan Pemohon *a quo* hanya mengulang dalil permohonan pada huruf A terkait dengan tingkat kehadiran Pemilih hampir 100%.
3) Bahwa dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak benar dan hanya bersifat asumtif, karena faktanya jumlah pengguna hak pilih tetap sama dengan surat suara yang digunakan, dan dari surat suara yang digunakan terdapat surat suara yang dinyatakan tidak sah. Maka yang menjadi dasar dalam penghitungan surat suara di TPS adalah surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih dan jumlahnya harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih, sehingga jika surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih, hasilnya sama, maka hak pilih masyarakat sebagai Pemilih telah digunakan secara konstitusional sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

4) Bahwa terhadap Bukti P-286 sampai dengan P-327 telah membuktikan bahwa daftar hadir Pemilih telah ditandai oleh Petugas KPPS 4 untuk menunjukkan bahwa Pemilih telah hadir dan sesuai dengan daftar hadir. Maka terhadap seluruh Pemilih harus terfasilitasi dalam menggunakan hak pilihnya, baik Pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih pindahan (DPTb) dan Pemilih tambahan (DPK) sekalipun warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan e-KTP dan menggunakan hak pilihnya di TPS dimana Pemilih tersebut berdomisili dan penggunaan hak pilihnya 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara dinyatakan ditutup.
5) Bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara pemilihan, pemerintah, partai politik, peserta pemilihan dan warga masyarakat, dan justru KPU sebagai penyelenggara pemilihan menargetkan tingkat partisipasi Pemilih meningkat tinggi, maka tidak ada salahnya tingkat partisipasi meningkat dan tinggi, dimana salahnya dan apa relevansinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Maka dengan tingkat kehadiran Pemilih meningkat tinggi merupakan keberhasilan KPU Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pemilihan dan berpengaruh pada indeks demokrasi di Kabupaten Pamekasan.
6) Bahwa tingkat kehadiran Pemilih tinggi tidak dapat diasumsikan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait atau Pemohon atau KPU Kabupaten Pamekasan, karena kehadiran Pemilih tinggi dan meningkat di TPS merupakan hasil dari proses pilihan rakyat yang secara konstitusional telah digunakan untuk memilih pasangan calon sesuai dengan kehendak pemilih dalam menjatuhkan pilihannya. Maka dengan suara pemilih yang sudah diekspresikan sesuai dengan kehendak politiknya, maka tidak boleh seorang pun yang tidak mengakui pilihan rakyat, sebagaimana Pendapat filosof Romawi Kuno, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), yang menyatakan: “suara rakyat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara, dan pilihan rakyat adalah pelaksanaan hukum tertinggi. Siapapun yang mencoba untuk tidak

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

mengakui hasil-hasil pemilihan, berarti berusaha untuk merusak hukum tertinggi, *vox populi suprema lex est de tema"*.

7) Bahwa apapun hasil pemilihan merupakan hak pemilih dalam mengekspresi pilihannya yang telah digunakan untuk memilih pemimpinnya, maka semua pihak harus menghormati hak Pemilih dalam menentukan hak politiknya secara konstitusional, dan semua pihak tidak mengetahui kehendak Pemilih yang telah diekspresikan dalam bilik suara.
8) Bahwa oleh karenanya tingkat kehadiran Pemilih meningkat tinggi tidak serta diasumsikan merupakan pelanggaran, maka semuanya dapat diuji melalui pranata hukum yang telah disediakan, dan jika masing-masing pihak tidak menggunakan pranata hukum itu, maka dianggap tidak menggunakan haknya. Semua proses dalam penyelenggaraan pemilihan dapat diuji, mulai dari hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat diuji hasilnya dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, karena selain merekap hasil penghitungan suara, diberikan kesempatan bagi saksi pasangan calon atau Panwas Kecamatan untuk memperbaiki proses yang telah dilakukan di tingkat bawah (TPS) yang tidak sesusai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya telah terjadi kesalahan penulisan atau penjumlahan perolehan suara pasangan calon, maka dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan. Dalam forum rapat pleno di tingkat PPK maupun tingkat KPU Kabupaten Pamekasan jika saksi pasangan calon masih keberatan terhadap penjelasan dari PPK atau KPU Kabupaten Pamekasan, maka PPK dan KPU Kabupaten Pamekasan dapat meminta pendapat dari Panwas Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Pamekasan, yang pendapatnya bisa dalam bentuk rekomendasi, dan PPK maupun KPU Kabupaten Pamekasan harus menindaklanjuti atas rekomendasi dimaksud.
9) Bahwa sebuah kelaziman dalam setiap kontestasi pemilihan, selama dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan sengan aman, tertib, kondusif dan tidak ada permasalahan, namun ketika pasangan calon telah mengetahui hasil penghitungan

suaranya kalah, maka permasalahan akan bermunculan untuk diangkat dalam bentuk keberatan saat dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Pamekasan yang “seakan-akan” telah terjadi pelanggaran yang “dibunyikan atau diangkat” derajat permasalahannya menjadi posita dalil-dalil permohonan untuk diajukan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan. Maka sering disebut perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan “sampah pemilihan” *(rubbish in election)* yang sengaja diciptakan melalui dalil-dalil permohonan untuk “membius dan memaksa” Mahkamah untuk memeriksa dalil-dalil permohonan yang sesungguhnya tidak pernah terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan.

10) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon secara substansi hanya mengulang-ulang dalil permohonan sebelumnya, dan fakta telah membuktikan tingkat kehadiran tidak seluruhnya benar, dan tingkat partisipasi Pemilih meningkat dalam menggunakan hak pilih, bukan sesuatu yang salah dan tidak dalam kualifikasi pelanggaran, karena Pemilih yang hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya secara konstitusional merupakan hak Pemilih untuk menentukan pilihannya, tanpa dilakukan pengkondisian dan intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait, jusru peningkatan partisipasi Pemilih menjadi target Termohon dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan. Maka dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruh.
11) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon pada halaman 48 terkait dengan dalil “kehadiran melebihi jumlah DPT dan ada yang tidak hadir, maka Pihak Terkait akan memberikan keterangan sebagai berikut:
    a. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas berapa jumlah Pemilih dalam DPT, jumlah pengguna hak pilih, jumlah Pemilih Pindahan (DPTb) dan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur serta hanya bersifat asumsi, karena di TPS 1 Desa Plekbun terdapat 3 Pemilih

Tambahan (DPK), dan berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (*vide* Bukti PT-171), jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 416 dan jumlah pengguna hak pilih sejumlah 415. Maka dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

b. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas berapa jumlah Pemilih dalam DPT, jumlah pengguna hak pilih, jumlah Pemilih pindahan (DPTb) dan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur serta hanya bersifat asumsi, karena di TPS 1 Desa Lesong Laok terdapat 5 Pemilih Tambahan (DPK), dan berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (*vide* Bukti PT-64), jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 557 dan jumlah pengguna hak pilih sejumlah 562 setelah ditambah Pemilih DPK sejumlah 5 Pemilih. Maka dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

c. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas berapa jumlah Pemilih dalam DPT, jumlah pengguna hak pilih, jumlah Pemilih pindahan (DPTb) dan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur serta hanya bersifat asumsi, karena di TPS 6 Desa Dasok terdapat 1 Pemilih Tambahan (DPK), dan berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (*vide* Bukti PT-172), jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 560 dan jumlah pengguna hak pilih sejumlah 560 setelah ditambah 1 Pemilih Tambahan (DPK). Maka dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

12) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon pada halaman 48 terkait dengan “Kehadiran Pemilih DPT dan tidak ada yang tanda tangan daftar hadir tidak ditandatangani”, maka Pihak Terkait akan memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak berdasar, karena di TPS 11, Desa Bujur Tengah, Batumarmar, di dalam daftar hadir Petugas KPPS

4 telah memberikan tanda untuk menunjukkan bahwa Pemilih telah hadir di TPS sesuai dengan DPT. Berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati telah membuktikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani formulir dimaksud, dan tidak ada kejadian khusus/keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon dan dituangkan dalam Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK. (*vide* Bukti PT-112).

b. Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak berdasar, karena di TPS 6, Desa Bujur Tengah di dalam daftar hadir Petugas KPPS 4 telah memberikan tanda untuk menunjukkan bahwa Pemilih telah hadir di TPS sesuai dengan DPT. Berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati telah membuktikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani formulir dimaksud, dan tidak ada kejadian khusus/keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon dan dituangkan dalam Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK. (*vide* Bukti PT-108).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil permohonan a quo tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

13) Bahwa setelah mencermati PETITUM Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa Petitum Pemohon tidak disusun secara cermat, sehingga terdapat Petitum alternatif kedua pada angka 4, halaman 49 terdapat TPS yang diulang dalam satu Petitum, antara lain:
   - Petitum Nomor 54 sama dengan Petitum Nomor 52, yaitu TPS 2, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar.
   - Petitum Nomor 83 sama dengan Petitum Nomor 8, yaitu TPS 4, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, Petitum Nomor 84 sama dengan Petitum Nomor 7, yaitu TPS 2, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, dan Petitum Nomor 85 sama dengan Petitum Nomor 6, TPS 3, Desa Potoan Laok, Kecamaan Palengaan.

b. Bahwa terdapat Petitum Pemohon, namun tidak pernah didalilkan, yaitu Petitum Nomor 35, yaitu TPS 2, Desa Prekbun, Kecamatan

Pademawu dan Petitum Nomor 36, yaitu TPS 2, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pademawu.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait Petitum Pemohon tidak jelas dan cermat, sehingga Petitum Pemohon dalam kualifikasi *error in objekto,* maka Petitum Pemohon tidak dapat dijadikan dasar Mahkamah untuk memutus permohonan Pemohon *a quo*.

KESIMPULAN:

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dalam kualifikasi objek perselisihan hasil pemilihan yang menjadi wewenang Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan.
2. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, karena pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
3. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Pamekasan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggaraan pemilihan, dan selama proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah diawasi secara ketat oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan beserta jajarannya sesuai dengan tingkatan masing-masing, dan tidak ditemukan adanya pelanggaran.
4. Bahwa saksi Pemohon dan saksi pasangan calon lainnya telah menandatangani seluruh Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati tanpa ada pemaksaan dan intimidasi kepada saksi Pemohon maupun saksi pasangan calon yang lain.
5. Bahwa selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada intimidasi dan pengusiran saksi Paslon nomor 3 (Pemohon) oleh panitia di 33 TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
6. Bahwa selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada kejadian khusus/keberatan yang dituangkan dalam Model C.Kejadian Khusus/Keberatan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

7. Bahwa terhadap Pemilih yang sudah meninggal dunia sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan tidak ada yang digunakan untuk memilih.
8. Bahwa tingkat kehadiran pemilih yang tinggi atau hampir 100% merupakan kehendak Pemilih dalam mengekspresikan kehendak pemilihannya dalam penyelenggaraan Pemilihan, karena dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional diselenggarakan 2 (dua) jenis pemilihan, yang satu dengan yang lain saling berkaitan dalam meningkatkan kehadiran Pemilih di TPS.
9. Bahwa tidak ada temuan dan laporan pelanggaran selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan surat suara ulang atau rekapitulasi ulang di semua tingkatan.
10. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Pamekasan telah berjalan dengan aman, kondusif dan lancar serta kehendak Pemilih telah terfasilitasi oleh KPU Kabupaten Pamekasan dalam menggunakan hak pilihnya.
11. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dalam kualifikasi untuk dilakukan pemilihan ulang.
12. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dalam kualifikasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa oleh karenanya, terhadap dalil Pemohon yang telah tertuang dalam pokok permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan hasil penghitungan suara di seluruh TPS yang tertuang dalam Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati telah sesuai dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara, dan seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan, termasuk saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, serta hasil pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dengan hasil perolehan suara tetap konsisten secara berjenjang sesuai dengan tingkatan masing-masing.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Bahwa apabila pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Pamekasan saksi Pemohon tidak menandatangani Model D.Hasil-Salinan-Kecamatan-KWK-Bupati dan Model D.Hasil-Salinan-KAB/KO-KWK-Bupati dan keberatan terhadap hasil rekapitulasi hasil perolehan suara adalah tindakan yang wajar dan biasa terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, setelah Pasangan Calon mengetahui kalah dalam penghitungan suara di TPS, dan saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara, dan dengan tidak ditandatangani oleh saksi tidak menggugurkan dan tidak sahnya rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan tahun 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 yang menyatakan: *"Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK"*.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, secara substansi dalil-dalil pokok pemohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan, maka bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo,* maka permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* dalam permohonan *a quo*.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.00 WIB.
3. Menyatakan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	17.307 SUARA
2.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	291.246 SUARA
3.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 3	263.740 SUARA
TOTAL SUARA SAH		**572.293 SUARA**

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-248, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi KTP atas nama KH. Kholilurrahman sebagai Calon Bupati Pamekasan.
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi KTP atas nama Sukriyanto sebagai Calon Wakil Bupati Pamekasan.
3. Bukti PT - 3 : Fotokopi Model B.Pencalonan Parpol.KWK Tentang Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan.
4. Bukti PT - 4 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 842 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 843 Tahun 2024 Tentang Penetapan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024.

6. Bukti PT - 6 : Fotokopi Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024.
8. Bukti PT - 8 : Fotokopi surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Nomor 470/1610/432.311/2024, Perihal: Data Penduduk Kabupaten Pamekasan, tanggal 12 Desember 2024, Jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan sejumlah 889.798 jiwa.
9. Bukti PT - 9 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Pamekasan dan ditandatangani oleh saksi Pemohon yang Bernama JUNAIDI.
10. Bukti PT - 10 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Batumarmar.
11. Bukti PT - 11 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Galis dan ditandatangani oleh saksi Pemohon tetapi tidak menulis namanya.
12. Bukti PT - 12 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Kadur.
13. Bukti PT - 13 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Larangan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

14. Bukti PT - 14 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Pademawu.
15. Bukti PT - 15 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di TPS tingkat PPK Kecamatan Pakong dan ditandatangani oleh saksi Pemohon tetapi tidak menulis namanya.
16. Bukti PT - 16 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Pasean.
17. Bukti PT - 17 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Palengaan.
18. Bukti PT - 18 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Pagantenan.
19. Bukti PT - 19 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Proppo dan ditandatangani oleh saksi Pemohon tetapi tidak menulis namanya
20. Bukti PT - 20 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Tlanakan.
21. Bukti PT - 21 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di tingkat PPK Kecamatan Waru.
22. Bukti PT - 22 : Fotokopi Fotokopi Surat pernyataan dari LUKAT tanggal 7 Januari 2025, NIK: 3528070107520078, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan 01 Juli 1952, Alamat Dsn. Morlorong, Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

melaksanakan pencoblosan di TPS 4 Desa Pasanggar pada tanggal 27 November 2024.

23. Bukti PT - 23 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 4 Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MUSLIM.

24. Bukti PT - 24 : Fotokopi Fotokopi Surat pernyataan dari BUKASAH tanggal 5 Januari 2025, NIK: 3528070208800001, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 02 Agustus 1980, Alamat Dsn. Dadak Timur, Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 6 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024.

25. Bukti PT - 25 : Fotokopi Fotokopi Surat pernyataan dari SAPRAE tanggal 10 Januari 2025, NIK: 3528071111550001, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 11 November 1955, Alamat Dsn. Dadak Timur, Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 6 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024, dan bukti video.

26. Bukti PT - 26 : Fotokopi Fotokopi Surat pernyataan dari MOH SAMSUL (MATSAMSUL) tanggal 6 Januari 2025, NIK: 3528070805620001, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 08 Mei 1962, Alamat Dsn. Dadak Timur, Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 6 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024, dan bukti video.

27. Bukti PT - 27 : Fotokopi Fotokopi Surat pernyataan dari MISJATI tanggal 10 Januari 2025, NIK: 3528076210680002, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 22 Oktober 1968, Alamat Dsn. Dadak Timur, Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 6 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024.

28. Bukti PT - 28 : Fotokopi Fotokopi Surat pernyataan dari MINSIYAH tanggal 10 Januari 2025, NIK: 3509076012800001, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 20 Desember 1980, Alamat Dsn. Dadak Timur, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 6 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024.
29. Bukti PT - 29 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 6 Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama SUBAIDI.
30. Bukti PT - 30 : Fotokopi Fotokopi Surat pernyataan dari MISTURAH tanggal 8 Januari 2025, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 01 Juli 1973, Alamat Dsn. Dadak Barat, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 08 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024, dan bukti video.
31. Bukti PT - 31 : Fotokopi Fotokopi Surat pernyataan dari MOH. SULI tanggal 7 Januari 2025, NIK: 3528070107930404, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 12 Agustus 1994, Alamat Dsn. Dadak Barat, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 08 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024, dan bukti video
32. Bukti PT - 32 : Fotokopi Fotokopi Surat pernyataan dari PATNI tanggal 5 Januari 2025, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 01 Juli 1967, Alamat Dsn. Dadak Barat, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 08 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024, dan bukti video.

33. Bukti PT - 33 : Fotokopi Fotokopi Surat pernyataan dari SAMIUDDIN tanggal 6 Januari 2025, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 12 Mei 1990, Alamat Dsn. Dadak Barat, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 08 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024, dan bukti video.

34. Bukti PT - 34 : Fotokopi Fotokopi Surat pernyataan dari SIHAH (SIHAN) tanggal 9 Januari 2025, NIK: 3528074107700063, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 01 Juli 1970, Alamat Dsn. Dadak Barat, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 08 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024, dan bukti video.

35. Bukti PT - 35 : Fotokopi Fotokopi Surat pernyataan dari SINAMI tanggal 7 Januari 2025, NIK: 3528074107760155, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 01 Juli 1976, Alamat Dsn. Dadak Barat, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 08 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024 dan bukti video.

36. Bukti PT - 36 : Fotokopi Fotokopi Surat pernyataan dari ARTALI tanggal 6 Januari 2025, NIK: 3528070107590068, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 1 Juli 1959 Alamat Dsn. Dadak Barat, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 08 Desa

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Palesanggar pada tanggal 27 November 2024, dan bukti video.

37. Bukti PT - 37 : Fotokopi Fotokopi Surat pernyataan dari BU SINAB tanggal 5 Januari 2025, NIK: 3528074107530200, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 01 Juli 1953, Alamat Dsn. Dadak Barat, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 08 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024, dan bukti video.

38. Bukti PT - 38 : Fotokopi Fotokopi Surat pernyataan dari KEMBAR tanggal 6 Januari 2025, NIK: 3528070107650030, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 01 Juli 1965, Alamat Dsn. Dadak Barat, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 08 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024 dan bukti video.

39. Bukti PT - 39 : Fotokopi Fotokopi Surat pernyataan dari LASTANI tanggal 8 Januari 2025, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 01 Juli 1961, Alamat Dsn. Dadak Barat, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 08 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024, dan bukti video.

40. Bukti PT - 40 : Fotokopi Fotokopi Surat pernyataan dari LIMA tanggal 9 Januari 2025, NIK: 352807711270005, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 31 Desember 1970, Alamat Dsn. Dadak Barat, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 08 Desa

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Palesanggar pada tanggal 27 November 2024 dan bukti video.

41. Bukti PT - 41 : Fotokopi Fotokopi Surat pernyataan dari MARKATI tanggal 8 Januari 2025, NIK: 3528074107380032, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 01 Juli 1885, Alamat Dsn. Dadak Barat, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 08 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024 dan bukti video.

42. Bukti PT - 42 : Fotokopi Surat pernyataan dari MARLANI tanggal 6 Januari 2025, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 01 Juli 1961, Alamat Dsn. Dadak Barat, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 08 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024.

43. Bukti PT - 43 : Fotokopi Surat pernyataan dari MARTILEM tanggal 7 Januari 2025, NIK: 3528074107630299, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 01 Juli 1963, Alamat Dsn. Dadak Barat, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 08 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024 dan bukti video.

44. Bukti PT - 44 : Fotokopi Surat pernyataan dari MAT DIMIN (MOH. DIMIN) tanggal 9 Januari 2025, NIK: 3528070805550001, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 08 Mei 1955, Alamat Dsn. Dadak Barat, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 08

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024 dan bukti video.

45. Bukti PT - 45 : Fotokopi Surat pernyataan dari MATHERI tanggal 8 Januari 2025, NIK: 3528070107620020, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 01 Juli 1962, Alamat Dsn. Dadak Barat, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 08 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024, dan bukti video.

46. Bukti PT - 46 : Fotokopi Surat pernyataan dari MISJANTEN tanggal 5 Januari 2025, NIK: 3528074107700019, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 01 Juli 1958, Alamat Dsn. Dadak Barat, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 08 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024, dan bukti video.

47. Bukti PT - 47 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 8 Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ABD. KARIM.

48. Bukti PT - 48 : Fotokopi Surat pernyataan dari MISNADIN tanggal 7 Januari 2025, NIK: 3528070107650038, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 01 Juli 1965, Alamat Aeng Rasa Laok, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 13 Desa Palesanggar pada tanggal 27 November 2024 dan bukti video.

49. Bukti PT - 49 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 13 Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani tanpa menyebutkan nama Saksi Pemohon.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

50. Bukti PT - 50 : DPT di TPS 3 Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan.
51. Bukti PT - 51 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 3 Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh saksi Pemohon atas nama SADDRIMU.
52. Bukti PT - 52 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 2 Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama HAYAT.
53. Bukti PT - 53 : Fotokopi Surat pernyataan dari MISJATI tanggal 7 Januari 2025, NIK: 3528075403640001, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 14 Maret 1964, Alamat Dsn Utara, Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan menerangkan sekaligus klarifikasi bahwa yang bersangkutan MASIH HIDUP dan melaksanakan pencoblosan di TPS 01 Desa Bulangan Timur pada tanggal 27 November 2024.
54. Bukti PT - 54 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 1 Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama SAPANDI.
55. Bukti PT - 55 : DPT di TPS 1 Desa Bulangan Timur Kecamatan Pegantenan.
56. Bukti PT - 56 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 15 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MISLAWI.
57. Bukti PT - 57 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 1 Desa Mapper, Kecamatan Proppo yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MARSUKAH.
58. Bukti PT - 58 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 3 Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MOH BADAR AL BASORI.
59. Bukti PT - 59 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 14 Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama SYASUL ARIFIN.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

60. Bukti PT - 60 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 01 Desa Dasok , Kecamatan Pademawu yang ditandatangani tanpa menyebutkan nama Saksi Pemohon.
61. Bukti PT - 61 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 04 Desa Dasok , Kecamatan Pademawu yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MOH NUR HAMIDI.
62. Bukti PT - 62 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 06 Desa Dasok , Kecamatan Pademawu yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MULYADI.
63. Bukti PT - 63 : DPT di TPS 4 Desa Dasok Kecamatan Pademawu.
64. Bukti PT - 64 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 1 Desa Lesong Laok, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani tanpa menyebutkan nama Saksi Pemohon.
65. Bukti PT - 65 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 10 Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MOH GAFUR.
66. Bukti PT - 66 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 11 Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama GAZALI AZIZI.
67. Bukti PT - 67 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 4 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama HERRY PURNOMO.
68. Bukti PT - 68 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 7 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama SITI AISYAH.
69. Bukti PT - 69 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 2 Desa Panaan, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ILYAS.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

70. Bukti PT - 70 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 3 Desa Panaan, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama A. ZAIM.
71. Bukti PT - 71 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 1 Desa Patoan Laok, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani tanpa menyebutkan nama Saksi Pemohon.
72. Bukti PT - 72 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 1 Desa Campor, Kecamatan Proppo yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama
SUBEIDI.
73. Bukti PT - 73 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 3 Desa Campor, Kecamatan Proppo yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama KURDI.
74. Bukti PT - 74 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 6 Desa Campor, Kecamatan Proppo yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama AINUL KORI.
75. Bukti PT - 75 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 7 Desa Campor, Kecamatan Proppo yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama FAUZAN.
76. Bukti PT - 76 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 2 Desa Mapper, Kecamatan Proppo yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MOH. HUDDIN.
77. Bukti PT - 77 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 3 Desa Mapper, Kecamatan Proppo dan saksi Pemohon tidak hadir.
78. Bukti PT - 78 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 4 Desa Mapper, Kecamatan Proppo dan saksi Pemohon tidak hadir.
79. Bukti PT - 79 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 1 Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon namun nama saksi Pemohon tidak terbaca.
80. Bukti PT - 80 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 5 Desa Panaguan, Kecamatan Proppo yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama WUKUF.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

81. Bukti PT - 81 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 3 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MUAMMAR.
82. Bukti PT - 82 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 4 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ABD. RORIS.
83. Bukti PT - 83 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 6 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama HASAN.
84. Bukti PT - 84 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 2 Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MUSTAIN.
85. Bukti PT - 85 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 6 Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MOH. FAJARUL MAULIDI.
86. Bukti PT - 86 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 1 Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ABDUS SALAM.
87. Bukti PT - 87 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 1 Desa Sopa'ah, Kecamatan Pademawu yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ILHAM WAHYUDI.
88. Bukti PT - 88 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 2 Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MOH YASIN.
89. Bukti PT - 89 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 1 Desa Bangreseh, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama TOHARI.
90. Bukti PT - 90 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 1 Desa Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ANDRI.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

91. Bukti PT - 91 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 10 Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama PUNARDI.
92. Bukti PT - 92 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 4 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani tanpa menyebutkan nama Saksi Pemohon.
93. Bukti PT - 93 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 5 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ALI.
94. Bukti PT - 94 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 6 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama SOMAD.
95. Bukti PT - 95 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 7 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama BABUN.
96. Bukti PT - 96 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 9 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani tanpa menyebutkan nama Saksi Pemohon.
97. Bukti PT - 97 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 1 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MOH RASUL H.
98. Bukti PT - 98 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 2 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MARSUKI.
99. Bukti PT - 99 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 4 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama SUPRIONO.
100. Bukti PT - 100 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 5 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama LUKMAN.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

101. Bukti PT - 101 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 6 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama TOTOK HARTONO.
102. Bukti PT - 102 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 7 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama JUNAIDI.
103. Bukti PT - 103 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 9 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MOHAMMAD IMAM WAHYUDI.
104. Bukti PT - 104 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 4 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama JUNAIDI HAMAS.
105. Bukti PT - 105 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 3 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama SAED.
106. Bukti PT - 106 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 4 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama KADIR.
107. Bukti PT - 107 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 5 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ACHMAD WESITURRAHMAN.
108. Bukti PT - 108 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 6 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama M. SHOLAHUDDIN AL AYYUBI.
109. Bukti PT - 109 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 7 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama RUDI.
110. Bukti PT - 110 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 9 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MISKAN.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

111. Bukti PT - 111 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 10 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ACH. SYAMSUL.
112. Bukti PT - 112 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 11 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani tanpa menyebutkan nama Saksi Pemohon.
113. Bukti PT - 113 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 12 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ACH. MASYHUR.
114. Bukti PT - 114 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 13 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MOH. JAILANI.
115. Bukti PT - 115 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 14 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ZAINUDDIN.
116. Bukti PT - 116 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 2 Desa Campor, Kecamatan Proppo yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MANSUR.
117. Bukti PT - 117 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 4 Desa Campor, Kecamatan Proppo yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama KARDI.
118. Bukti PT - 118 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 5 Desa Campor, Kecamatan Proppo yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MAKKI.
119. Bukti PT - 119 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 8 Desa Campor, Kecamatan Proppo yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama LUKMAN.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

120. Bukti PT - 120 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 11 Desa Campor, Kecamatan Proppo yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ABD. ROHMAN.
121. Bukti PT - 121 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 4 Desa Jambringin, Kecamatan Proppo yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MOH FARHAN WILDANI.
122. Bukti PT - 122 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 8 Desa Jambringin, Kecamatan Proppo yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ST. FAJRIYAH NOER.
123. Bukti PT - 123 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 1 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama RIFATUN NABILA.
124. Bukti PT - 124 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 8 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama RAHMAN.
125. Bukti PT - 125 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 12 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ABD HAMID.
126. Bukti PT - 126 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 13 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MAHRUM.
127. Bukti PT - 127 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 14 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama NASIR
128. Bukti PT - 128 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 1 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama AIRUZ
129. Bukti PT - 129 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 3 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MISTIYAH

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

130. Bukti PT - 130 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 5 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani tanpa menyebutkan nama Saksi Pemohon.
131. Bukti PT - 131 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 6 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani tanpa menyebutkan nama Saksi Pemohon.
132. Bukti PT - 132 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 9 Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ABD. MUKMIN.
133. Bukti PT - 133 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 13 Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MUNAWWAR.
134. Bukti PT - 134 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 4 Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ABD. KARIM.
135. Bukti PT - 135 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 2 Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama HOLILI.
136. Bukti PT - 136 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 1 Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ARSADIN.
137. Bukti PT - 137 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 5 Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani tanpa menyebutkan nama Saksi Pemohon.
138. Bukti PT - 138 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 6 Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama RIZAH.
139. Bukti PT - 139 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 8 Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama HASIP.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

140. Bukti PT - 140 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 3 Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama FATHOR ROSI.
141. Bukti PT - 141 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 18 Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama IMAM.
142. Bukti PT - 142 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 4 Desa Rangperang Daya, Kecamatan Proppo yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ABDUL ROHMAN.
143. Bukti PT - 143 : Surat Pernyataan saksi pihak terkait yang bernama ABDUL WALID sebagai saksi Pihak Terkait yang menyatakan di TPS 7, Desa Larangan Badung tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.
144. Bukti PT - 144 : Surat Pernyataan saksi pihak terkait yang Bernama SAIQUL KHOIRI sebagai saksi Pihak Terkait yang menyatakan di TPS 4, Desa Larangan Badung tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.
145. Bukti PT - 145 : Surat Pernyataan saksi pihak terkait yang Bernama MOHAMMAD RAI sebagai saksi Pihak Terkait yang menyatakan di TPS 2, Desa Potoan Laok tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.
146. Bukti PT - 146 : Surat Pernyataan saksi pihak terkait yang Bernama ABD RAHMAN sebagai saksi Pihak Terkait yang menyatakan di TPS 1, Desa Potoan Laok tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.
147. Bukti PT - 147 : Surat Pernyataan saksi pihak terkait yang bernama SANIMAN sebagai saksi Pihak Terkait yang menyatakan di TPS 3, Desa Sana Tengah tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon .
148. Bukti PT - 148 : Surat Pernyataan saksi pihak terkait yang Bernama AHMAD yang menyatakan di TPS 7, Desa Plakpak tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

149. Bukti PT - 149 : Surat Pernyataan saksi pihak terkait yang Bernama YANTO sebagai saksi Pihak Terkait yang menyatakan di TPS 1, Desa Bulengan Branta tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.
150. Bukti PT - 150 : Surat Pernyataan saksi pihak terkait yang bernama A. JEFRIYADI yang menyatakan di TPS 1, Desa Bulengan Timur tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.
151. Bukti PT - 151 : Surat Pernyataan saksi pihak terkait yang bernama SUBAIDI yang menyatakan di TPS 6, Desa Palesanggar tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.
152. Bukti PT - 152 : Surat Pernyataan saksi pihak terkait yang bernama MOH. ALI WAFA yang menyatakan di TPS 8, Desa Palesanggar tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.
153. Bukti PT - 153 : Surat Pernyataan saksi pihak terkait yang bernama MOHAMMAD ALI yang menyatakan di TPS 6, Desa Pasanggar tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.
154. Bukti PT - 154 : Surat Pernyataan saksi pihak terkait yang bernama ACH. QUSYAIRI yang menyatakan di TPS 4, Desa Pasanggar tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.
155. Bukti PT - 155 : Surat Pernyataan saksi pihak terkait yang bernama LUQMANUL HAKIM yang menyatakan di TPS 9, Desa Pasanggar tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.
156. Bukti PT - 156 : Surat Pernyataan saksi pihak terkait yang Bernama GHOZALI yang menyatakan di TPS 7, Desa Pasanggar tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.
157. Bukti PT - 157 : Surat Pernyataan saksi pihak terkait yang bernama ACH. MAHBUBI yang menyatakan di TPS 2, Desa Kramat tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

158. Bukti PT - 158 : Surat Pernyataan saksi pihak terkait yang bernama ZAINURI yang menyatakan di TPS 6, Desa Panglegur tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.
159. Bukti PT - 159 : Surat Pernyataan saksi pihak terkait yang Bernama BAIDAWI yang menyatakan di TPS 17, Desa Plakpak tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.
160. Bukti PT - 160 : Surat Pernyataan saksi Paslon 1 yang bernama NUFRIYANTO yang menyatakan di TPS 1 Desa Potoan Laok tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.
161. Bukti PT - 161 : Surat Pernyataan saksi Paslon 1 yang bernama SHOFIATUL MUNAWAROH yang menyatakan di TPS 17, Desa Plakpak tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.
162. Bukti PT - 162 : Surat Pernyataan saksi paslon 1 yang BERNAMA M. SUNARTO yang menyatakan di TPS 2, Desa Kramat tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.
163. Bukti PT - 163 : Surat Pernyataan saksi paslon 3 yang bernama HOSNAN yang menyatakan di TPS 6, Desa Pasanggar tidak terjadi intimidasi dan pengusiran saksi Pemohon.
164. Bukti PT - 164 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 17 Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ACH. SAMIAN.
165. Bukti PT - 165 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 7 Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama HARUFI.
166. Bukti PT - 166 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 7 Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MOH. HASAN.
167. Bukti PT - 167 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 9 Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ABD. AZIZ.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

168. Bukti PT - 168 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 3 Desa Jambringin, Kecamatan Proppo yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama FAISAL.
169. Bukti PT - 169 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 1 Desa Bulangan Branta, Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama PUDIN.
170. Bukti PT - 170 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 6 Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama HOSNAN.
171. Bukti PT - 171 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 1 Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama ABDUS SALAM.
172. Bukti PT - 172 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 6 Desa Dasok, Kecamatan Pegantenan yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama MULYADI.
173. Bukti PT - 173 : Fotokopi model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati, di TPS 1 Desa Bangsereh, Kecamatan Batumarmar yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama TOHARI.
174. Bukti PT - 174 : Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu pada tanggal 12 Desember 2024 oleh pelapor ZAINI kepada Ketua KPPS pada 8 Kecamatan dengan Nomor Laporan 004/Reg/LP/PB/Kab/16.28/X/II/2024.
175. Bukti PT - 175 : Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu pada tanggal 10 November 2024 oleh pelapor MUHMMAD HOLIL kepada AMINATUL BAKIR dengan Nomor Laporan 002/Reg/LP/PB/Kab/16.28/X/II/2024, dengan status laporan Dihentikan.
176. Bukti PT - 176 : Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu pada tanggal 10 November 2024 oleh pelapor MUHMMAD HOLIL kepada Dr. Ir. Fattah Jasin dengan Nomor Laporan 001/Reg/LP/PB/Kab/16.28/X/II/2024, dengan status laporan Dihentikan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

177. Bukti PT - 177 : Fotokopi Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK Nomor 211/PL/02.2-BA/3528/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024.
178. Bukti PT - 178 : Dokumen Klarifikasi Data Kependudukan dari Dispendukcapil pada tanggal 3 Desember 2025 perihal permohonan Klarifikasi Register Kependudukan.
179. Bukti PT - 179 : Dokumen money politic pemberian uang 50.000 (Lima Puluh Ribu) anggota KPPS Desa Lancar yang berani ajak coblos Paslon Ra Baqir - Taufadi (03).
180. Bukti PT - 180 : Dokumen Kepala Desa yang memberikan surat keterangan meninggal untuk gugatan BERBAKTI ke MK.
181. Bukti PT - 181 : Fotokopi berita mediajatim.com, 27 November 2024 “Pilkada Pemekasan 2024 Kondusif, Pj. Bupati: Rakyat Sudah Dewasa Tentukan Pilihan!”
182. Bukti PT - 182 : Fotokopi berita Risalah, tanggal 5 Desember 2024 “Pilkada 2024 Berjalan Aman dan Kondusif, Wakil Ketua DPRD Pamekasan Apresiasi Semua Pihak”.
183. Bukti PT - 183 : Fotokopi berita yakusa.id, tanggal 26 Nopember 2024 “Tidak Diberi Model C Pemberitahuan, Kharisma Lawyer: Warga Pamekasan Tetap Bisa Nyoblos Pakai KTP”.
184. Bukti PT - 184 : Fotokopi berita Kompas.com, tanggal 24/11/2024 “Tepergok” Undang Tim Pemenangan Paslon, Ketua PPS di Pamekasan Mundur”.
185. Bukti PT - 185 : Fotokopi berita Risalah, tanggal 23 Nopember 2024 “KPU Pamekasan Didesak Berhentikan Ketua PPS Desa Bandaran”.
186. Bukti PT - 186 : Fotokopi berita Bangsaonline, tanggal 21 Nopember 2024 “KPU Pamekasan Pecat Belasan Anggota KPPS yang Melanggar Netralitas Pemilu”.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

187. Bukti PT - 187 : Fotokopi berita CNN Indonesai, tanggal 21 Nopember 2024 “KPU Pecat Puluhan Anggota KPPS di Pamekasan Usai Ikut Paslon”.

188. Bukti PT - 188 : Fotokopi berita di beritajatim, tanggal 25 Nopember 2025 “PPS Bandaran Dipecat, KPU Pamekasan Langsung Gelar PAW”.

189. Bukti PT - 189 : Fotokopi surat pernyataan Moh. Zaini, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 1, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

190. Bukti PT - 190 : Fotokopi surat pernyataan Moh. Romli, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 3, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

191. Bukti PT - 191 : Fotokopi surat pernyataan Ana Nailatul Himmah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 5, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

192. Bukti PT - 192 : Fotokopi surat pernyataan Hidayatullah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 6, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

193. Bukti PT - 193 : Fotokopi surat pernyataan Sohibuddin, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 1, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

194. Bukti PT - 194 : Fotokopi surat pernyataan Saiqul Khoiri, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 4, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

195. Bukti PT - 195 : Fotokopi surat pernyataan Abd. Rahman, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 1, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

196. Bukti PT - 196 : Fotokopi surat pernyataan Muhammad Rai, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 2, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

197. Bukti PT - 197 : Fotokopi surat pernyataan Ahmadi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 3, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

198. Bukti PT - 198 : Fotokopi surat pernyataan Sipul Bahri, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 4, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

199. Bukti PT - 199 : Fotokopi surat pernyataan Asnari, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 3, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

200. Bukti PT - 200 : Fotokopi surat pernyataan Moh. Sodik, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 5, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Bujur Tengah, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

201. Bukti PT - 201 : Fotokopi surat pernyataan Mahfid, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 6, DesaBujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

202. Bukti PT - 202 : Fotokopi surat pernyataan Abdullah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 7, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

203. Bukti PT - 203 : Fotokopi surat pernyataan Pukah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 8, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

204. Bukti PT - 204 : Fotokopi surat pernyataan Ach. Syarkawi Sholeh, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 9, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

205. Bukti PT - 205 : Fotokopi surat pernyataan Baihaki, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 12, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

206. Bukti PT - 206 : Fotokopi surat pernyataan Fathor Rahman, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 1, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

207. Bukti PT - 207 : Fotokopi surat pernyataan Abdurrahman, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 2, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

208. Bukti PT - 208 : Fotokopi surat pernyataan Ach. Fauzen, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 3, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

209. Bukti PT - 209 : Fotokopi surat pernyataan Ahmad Dahnan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 5, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

210. Bukti PT - 210 : Fotokopi surat pernyataan Samhari, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 7, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

211. Bukti PT - 211 : Fotokopi surat pernyataan Mohammad Habibi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 8, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

212. Bukti PT - 212 : Fotokopi surat pernyataan Saniman B, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 9, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

213. Bukti PT - 213 : Fotokopi surat pernyataan Atmo, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 1, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

214. Bukti PT - 214 : Fotokopi surat pernyataan Moh. Ra'i, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 2, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

215. Bukti PT - 215 : Fotokopi surat pernyataan Sulaiman, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 3, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

216. Bukti PT - 216 : Fotokopi surat pernyataan Ramli, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 4, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

217. Bukti PT - 217 : Fotokopi surat pernyataan Jumali, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 5, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

218. Bukti PT - 218 : Fotokopi surat pernyataan Sura'i, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 6, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

219. Bukti PT - 219 : Fotokopi surat pernyataan Nor Kholis, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 7, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

220. Bukti PT - 220 : Fotokopi surat pernyataan Imam Rofiqi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 9, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

221. Bukti PT - 221 : Fotokopi surat pernyataan Achmad Rofiqi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 8, Desa Bangsereh, Kecamatan Batumarmar, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

222. Bukti PT - 222 : Fotokopi surat pernyataan Moh. Gufron, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 4, Desa Rangperang, Kecamatan Proppo, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

223. Bukti PT - 223 : Fotokopi surat pernyataan Holik, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 5, Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

224. Bukti PT - 224 : Fotokopi surat pernyataan Sallim, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 1, Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

225. Bukti PT - 225 : Fotokopi surat pernyataan Taufikurrahman, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 1, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

226. Bukti PT - 226 : Fotokopi surat pernyataan Ahmad Taufiq, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 2, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

227. Bukti PT - 227 : Fotokopi surat pernyataan Tali Adikara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 3, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

228. Bukti PT - 228 : Fotokopi surat pernyataan Moh Hayatur Rohman, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 4, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

229. Bukti PT - 229 : Fotokopi surat pernyataan Moh Heri, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 8, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

230. Bukti PT - 230 : Fotokopi surat pernyataan Abdul Hamid, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 1, Desa Campor, Kecamatan Proppo, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

231. Bukti PT - 231 : Fotokopi surat pernyataan Rusdi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 2, Desa Campor, Kecamatan Proppo, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

232. Bukti PT - 232 : Fotokopi surat pernyataan Edi Sujarwo, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 3, Desa Campor, Kecamatan Proppo, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

233. Bukti PT - 234 : Fotokopi surat pernyataan Moh. Hisam, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 6, Desa Campor, Kecamatan Proppo, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

234. Bukti PT - 235 : Fotokopi surat pernyataan Muslim, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 7, Desa Campor, Kecamatan Proppo, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

235. Bukti PT - 236 : Fotokopi surat pernyataan Risal, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 8, Desa Campor, Kecamatan Proppo, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

236. Bukti PT - 237 : Fotokopi surat pernyataan Husnul Khitam, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 11, Desa Campor, Kecamatan Proppo, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

237. Bukti PT - 238 : Fotokopi surat pernyataan Hairul Rohman, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 02, Desa Bulangan Branta, Kecamatan Pegantenan, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

238. Bukti PT - 239 : Fotokopi surat pernyataan Baidawi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 12, Desa Plak Pak, Kecamatan Pegantenan, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

239. Bukti PT - 240 : Fotokopi surat pernyataan Mudahri, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 3, Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

240. Bukti PT - 241 : Fotokopi surat pernyataan Luqmanul Hakim, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 9, Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

241. Bukti PT - 242 : Fotokopi surat pernyataan A. Jefriyadi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 01, Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

242. Bukti PT - 243 : Fotokopi surat pernyataan Subaidi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 6, Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

243. Bukti PT - 244 : Fotokopi surat pernyataan Ach. Mahbubi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 2, Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

244. Bukti PT - 245 : Fotokopi surat pernyataan Andi Kusuma Putra, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 6, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

245. Bukti PT - 246 : Fotokopi surat pernyataan Harisno, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 1, Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

246. Bukti PT - 247 : Fotokopi surat pernyataan Samsul Bahri, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 1, Desa Sopaah, Kecamatan Pademawu, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

247. Bukti PT - 248 : Fotokopi surat pernyataan Syaifullah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 3, Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, tanggal 5 Pebruari 2025, yang menyatakan pemilih yang hadir di TPS sesuai dengan DPT dan telah menggunakan hak pilih, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak ada saksi dari pasangan calon yang keberatan.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 10 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pihak Terkait

1. Charles Simabura

Secara konstitusional dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*. Meskipun terdapat penyempitan makna yang dimuat UU Pemilu dimana konstitusi merumuskan "*perselisihan*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

hasil pemilu" direduksi menjadi "*perselisihan penetapan perolehan suara."* Ketentuan *a quo* sering dijadikan dasar untuk membatasi wewenang Mahkamah yaitu memeriksa dan memutus masalah hitung-hitungan semata.

Dengan merujuk beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU Pilkada maupun PHPU Pilpres ahli setidaknya mendeteksi 2 (dua) alasan pokok yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam PHPU yaitu:

a. alasan yang bersifat kuantitatif

   Permohonan lebih menekankan pada angka-angka hasil penghitungan suara baik karena kesalahan hitung, penggelembungan, penghilangan suara yang signifikan memegaruhi hasil pemilu.

b. alasan yang bersifat kualitatif

   Permohonan menyangkut perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang memuat dalil mengenai proses penyelenggaraan pemilu, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan menurut prinsip konstitusionalisme atau ketentuan hukum yang berlaku atau tidak.

Dengan demikian jika aspek kuantitatif hanya berkisar pada angka-angka penghitungan hasil pemilihan umum atau perolehan suara peserta pemilu, sedangkan dalam aspek kualitatif menurut Mahkamah Konstitusi antara lain dapat menyangkut hal berikut:

a. terpenuhinya asas pemilu jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia;
b. ketidakberpihakan (netralitas) para penyelenggara negara, BUMN, aparat keamanan, perangkat desa;
c. ketaatan lembaga penyelenggara pemilu terhadap peraturan perundang-undangan; atau
d. proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu.

Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah telah memeriksa dan memutus segala bentuk pelanggaran dimaksud. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada sejauh mana penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip demokrasi konstitusional atau tidak, yang membawa akibat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

pada terpengaruhnya hasil pemilu.[1] Keterpenuhan kedua aspek tersebut dipertimbangkan Mahkamah secara spesifik dan sangat ketat dalam pembuktiannya. Dari beberapa putusan Mahkamah seringkali mengabaikan dalil-dalil yang tidak dapat dibuktikan secara signifikan pengaruhnya terhadap hasil pemilihan umum.

Dengan demikian, apa yang sudah dilakukan Mahkamah selama ini telah tepat dan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Mahkamah terbukti berpegang pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak hanya memeriksa sengketa perolehan suara namun termasuk juga proses dari hasil pemilu.[2]

Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 dinyatakan: *Alasan-alasan Pemohon (Posita) antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*.

Bahwa benar UU Pemilu dan UU MK seakan membatasi Mahkamah hanya dapat menangani perkara hitung menghitung hasil Pemilu secara kuantitatif telah mendegradasi peran Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Pada faktanya Mahkamah melakukan *judicial activism* dengan mengembangkan suatu paradigma baru penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi tidak lagi semata-mata terpaku pada aspek kuantitatif, yakni angka-angka hasil penghitungan suara, melainkan juga pada aspek kualitatif yang memastikan bahwa proses-proses pemilu harus sesuai dengan asas jujur dan adil.

Pada aspek kuantititaf, dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon*

[1] Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, hal. 1814
[2] Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada, Hal. 19

terpilih". Pasal *a quo* menyatakan bahwa objek sengketa hasil pemilihan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang secara material dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Dengan demikian, tidak semua perbedaan atau kesalahan dalam proses penghitungan suara dapat dijadikan dasar pengajuan sengketa hasil pemilihan. Hanya perbedaan yang bersifat signifikan, yaitu yang memiliki potensi nyata untuk mengubah penetapan calon terpilih sehingga memenuhi syarat untuk diproses sebagai objek sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut konteks frasa "*perbedaan yang signifikan*" mengacu pada selisih perolehan suara yang secara material dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Artinya, perbedaan tersebut harus memiliki dampak langsung terhadap hasil akhir pemilu, yaitu siapa yang ditetapkan sebagai pemenang. Signifikansi ini ditentukan berdasarkan jumlah suara yang dipersoalkan dibandingkan dengan selisih suara antar pasangan calon. Jika jumlah suara yang disengketakan melebihi atau setidaknya sama dengan selisih suara antara pasangan calon yang ditetapkan sebagai pemenang dan pasangan calon yang mengajukan sengketa, maka perbedaan tersebut dianggap signifikan. Sebaliknya, apabila jumlah suara yang dipersoalkan tidak mencukupi untuk mengubah hasil, sengketa tersebut tidak memenuhi syarat material untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam aspek kualitatif dalam perkara ini berdasarkan Dari beberapa pengalaman Mahkamah Konstitusi tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) kategori yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menilai Pelanggaran TSM pada perselisihan hasil Pemilu atau Pemilukada yaitu:

> ***Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU*

Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN.

***Kedua**, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.*

***Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.*[3]

Dalam hal terdapat dalil adanya pelanggara TSM yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, maka menurut Pasal 135A UU Pemilihan: "*Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara **terstruktur, sistematis, dan massif**".* Perbuatan yang dimaksud oleh Pasal 73 ayat (2) tersebut yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Calon dan/atau tim Kampanye yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Dalam penjelasan Pasal 135A ayat (1) dijelaskan bahwa:

***"terstruktur"** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara*

[3] Putusan 190.PHPU.D-VII.2010, 3.18.1 Hal. 107.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

bersama-sama. Bahwa dalam pelanggaran ini harus dibuktikan adanya pelibatan penyelenggara pemilihan mulai dari Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sampai dengan pelibatan Panitia Pemungutann Suara (PPS) desa/kelurahan atau bahkan sampai pada level KPPS di TPS,dalam konteks pemilihan Bupati/Walikota. Tentunya pelibatan diatas harus dibuktikan dengan data dukung seperti adanya perintah bisa berupa pesan elektronik, rekaman suara, video atau pesan berantai dari KPU komisioner/kesekretariatan kepada perangkat KPU kebawah.

"**sistematis**" *adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.* Yaitu adanya perencanaan yang dilakukan oleh pasangan calon melibatkan unsur penyelenggara atau pelibatan unsur pemerintah atau unsur alat negara, tentang bagaimana pola perencanaan politik uang (bisa dalam bentuk uang/barang/janji) yang hal tersebut dilarang dalam undang-undang.

"massif" *yaitu dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.* Secara kuantititif massifitas tersebut manakala terjadi dihampir 50 persen lebih wilayah kabupaten/kota.[4] Selain itu menurut Pasal 4 Perbawaslu 9/2020 maka yang terkategori TSM dimaksud hanya menyangkut politik uang. Meskipun demikian dalam hal ada pelanggaran TSM lainnya maka harus merujuk unsur yang telah ditentukan oleh Peraturan peurndangan-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal dugaan pelanggaran tersebut dilakukan di tingkat TPS, maka sepanjang tidak signifikan memengaruhi hasil, kejadian dimaksud dapat saja diabaikan oleh Mahkamah sebagaimana pernah dimuat dalam Putusan 190.PHPU.D-VII.2010:

> ***[3.19.1.4]*** *Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di TPS tidak memiliki signifikansi untuk menggeser atau mengubah perolehan suara dari Pasangan Calon lainnya. Terlebih lagi, seandainya benar terjadi permasalahan di TPS-TPS tersebut, pelanggaran tersebut sifatnya berdiri sendiri, perseorangan,*

[4] menurut Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

parsial, sporadis, serta tidak memiliki kaitan antara pelanggaran satu dengan pelanggaran lainnya. Sebaliknya, Termohon mampu membuktikan bahwa beberapa saksi Pemohon telah ikut menandatangani Formulir C-1 pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara rinci berapa perolehan suara yang hilang bagi dirinya ataupun perolehan suara yang bertambah bagi Pasangan Calon lainnya akibat dari masing- masing permasalahan yang terjadi di TPS-TPS tersebut. Dengan demikian, Pemohon tidak mampu meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dalam permasalahan hukum a quo;

Selanjutnya dalam Putusan 79/PHPU.D-XI/2013 dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada Provinsi Sumatera Selatan dimana pada pertimbangan [3.9] Mahkamah mengakui bahwa:

“ … *Memang pada saat ini tidak mungkin ada Pemilukada yang bersih seratus persen atau sempurna, sebab di sana-sini terjadi pelanggaran. Namun demikian, sejauh pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil pemungutan suara ulang Pemilukada tersebut. Lagipula, pemungutan suara ulang tersebut telah terlaksana dengan baik dan lancar, serta diawasi dan disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu. … Adapun terhadap temuan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, masih dapat diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjad*i;

Dengan demikian, apa yang sudah dilakukan Mahkamah selama ini telah tepat dan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Mahkamah terbukti berpegang pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak hanya memeriksa sengketa perolehan suara namun termasuk juga proses dari hasil pemilu.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Ditemukannya Pemilih Pada DPT Yang Sudah Meninggal Dunia

Bahwa terdapatnya dugaan atas penggunaan suara oleh pemilih yang meninggal dunia dan memberikan suara yang tidak sama dengan daftar hadir telah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dinyatakan:

> **[3.11.4] angka 6**: *Demikian pula dengan dalil Pemohon mengenai pemilih yang telah meninggal dunia namun tercatat bertanda tangan pada Daftar Hadir di TPS, sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-38 sampai dengan Bukti P-42, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran alat bukti berupa surat pernyatan kematian demikian, apalagi tidak ada alat bukti lain yang dapat menguatkan isi surat pernyataan tersebut. Seandainya benar ada pemilih sudah meninggal namun tercatat hadir di TPS, seharusnya saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Konang ataupun di tingkat Kabupaten Bangkalan, dalam hal saksi Pemohon tidak hadir di TPS. Berdasarkan hal demikian, dalil Pemohon mengenai pemilih yang sudah meninggal namun tercatat hadir di TPS, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum*.

Selanjutnya terhadap pemilih tidak mengisi daftar hadir ataupun terjadinya perbedaan daftar hadir dengan suara sah dan kesamaan tanda tangan di dalam putusan a quo dinyatakan Mahkamah konstitusi sebagai berikut:

> **[3.11.4] angka 5**: "*Pemohon mendalilkan bahwa nama-nama yang bertanda tangan di Daftar Hadir 15 TPS di Desa Durin Timur sebenarnya tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilih. Tanda tangan para pemilih tersebut dipalsukan dan suara para pemilih tersebut menjadi bagian dari 4.050 suara sah dari 15 TPS dimaksud. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Daftar Hadir pada beberapa TPS memang tidak ditandatangani oleh pemilih sendiri melainkan ditandatangani oleh petugas TPS…"*
>
> *"… Hal demikian dikuatkan oleh Daftar Hadir yang diajukan sebagai alat bukti oleh Pemohon dan Termohon yang hampir semua tanda tangan pemilih di daftar tersebut terlihat sama atau setidaknya dilakukan oleh*

beberapa orang yang sama." "… Mahkamah meyakini para pemilih yang tercatat dalam DPT sesungguhnya telah hadir dan melakukan pemungutan suara, terlepas dari kemungkinan bahwa tidak semua pemilih yang hadir benar- benar merupakan pemilih terdaftar di dalam DPT…"

"… pemilih yang tidak mendapat undangan dan/atau tidak hadir di TPS namun namanya tercantum bertanda tangan dalam Daftar Hadir…"

"Berkaitan dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah meyakini bahwa Daftar Hadir TPS tidak ditandatangani sendiri oleh semua pemilih, namun Mahkamah tidak meyakini hal demikian berkorelasi dengan pilihan pemilih dan/atau perolehan suara yang disengketakan. Dengan kata lain Mahkamah berpendapat kesalahan atau kelalaian pengisian Daftar Hadir di TPS tidak serta- merta membuktikan adanya rekayasa 4.050 surat suara bagi keuntungan caleg Samsol dari Partai Gelora.

Dengan demikian dalil Pemohon a quo menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum."

Artinya mahkamah memandang bahwa meskipun diyakini bahwa ada yang mengisikan daftar hadir orang lain atau bukan oleh orang yang sebenarnya namun hal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi tidak serta merta menguntungkan pihak terkait karena pemohon juga berpeluang untuk diuntungkan atas kondisi yang demikian.

2. Alfian Futuhul Hadi

Dalam kapasitas sebagai ahli, akan disampaikan pandangan terkait salah satu sifat TSM, yaitu Masif. Setelah memperhatikan daftar TPS yang didalilkan oleh pemohon dalam posita dan petitum dokumen perbaikan permohonan, serta setelah dilakukan pemeriksaan mengenai penulisan dan duplikasi, dalam perhitungan terdapat sebanyak 112 TPS yang didalilkan oleh pemohon. Ke-112 TPS ini tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Pamekasan, yang memiliki total 13 kecamatan, 189 desa, dengan total TPS sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh), serta total pemilih sebanyak 666.048 (enam ratus enam puluh enam ribu, empat puluh delapan) pemilih.

Dari 112 TPS yang didalilkan tersebut, semua berkaitan dengan dalil dalam petitum pemohon. Meskipun memenuhi persebaran di lebih dari 50% wilayah kecamatan (7 dari 13 kecamatan), namun hanya terjadi pada 35 desa/kelurahan dari total 189 desa yang terdapat di Kabupaten Pamekasan. Fakta ini menunjukkan bahwa persebaran TPS yang didalilkan pemohon hanya terjadi pada 18,6% dari wilayah desa/kelurahan di Kabupaten Pamekasan.

Hal lain yang perlu disampaikan adalah bahwa dari 112 TPS yang didalilkan pemohon, terdapat sebanyak 38 TPS dengan perolehan suara pemohon lebih unggul dibandingkan paslon lain, sedangkan pada 74 TPS perolehan suara paslon 02 lebih unggul. Hal ini menunjukkan bahwa dalil yang diajukan oleh pemohon tidak dapat dipastikan menguntungkan paslon tertentu. Dengan demikian, kedua aspek tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan apakah memenuhi kriteria "Masif" sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, terkait selisih perolehan suara, sebagaimana diketahui bahwa selisih perolehan suara antara pihak Terkait dengan pemohon adalah 27.506 suara atau 4,81%. Sementara itu, pada 112 TPS yang didalilkan pemohon, berdasarkan perhitungan, sebanyak 38 TPS menunjukkan keunggulan suara bagi pemohon dengan selisih 5.841 suara, sedangkan pada 74 TPS, pihak Terkait (paslon 02) unggul dengan selisih 17.148 suara.

jika diasumskan apa-apa yang didalilkan oleh pemohon dianggap benar dan terbukti secara hukum telah menyebabkan selisih keunggulan yang menguntungkan pihak terkait (paslon 02) maka seiisih keunggulan bagi pihak Terkait sebesar 17,148 (tujuh belas ribu serratus empat puluh delapan) suara itu tidak lebih besar dari selisih perolehan suara total pikah Terkait (Paslon 02) sebesar 27.506 (dua puluh tujuh ribu lima ratus enam).

Berdasarkan perhitungan sebagai ahli, dilakukan simulasi peluang/kemungkinan jika PSU dilakukan pada 112 TPS yang didalilkan, dengan total suara yang diperebutkan sebanyak 59.778 suara. Dalam simulasi ini, perubahan keadaan yang dapat mengubah putusan pihak Termohon hanya dapat terjadi jika pemohon mampu memenangkan PSU dengan persentase minimal 73,01% di seluruh 112 TPS.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Simulasi PSU di 112 TPS:				
Suara PSU	Paslon 01	Paslon 01	Paslon 01	Selish Suara
597.778	0%	26,09%	73,01 %	
	0	16.134	43.644	27.510

Dengan perolehan ini, selisih hasil simulasi PSU baru melampaui selisih perolehan dengan pihak Terkait (paslon 02) saat ini, itu pun dengan asumsi Paslon 01 tidak memperoleh suara sama sekali.

Saksi Pihak Terkait

1. **Rusdi**
   - Saksi menerangkan bahwa ia memberikan suara di TPS 02, Kecamatan Campor, Desa Proppo.
   - Saksi menerangkan bahwa hasil perolehan suara di TPS 02 adalah sebagai berikut:
     - Paslon 01 memperoleh 1 suara.
     - Paslon 02 memperoleh 186 suara.
     - Paslon 03 memperoleh 407 suara dan menjadi peraih suara terbanyak di TPS tersebut.
   - Saksi menerangkan bahwa tidak ada pemilih yang menggunakan hak suara tanpa kartu panggilan (C.6-KWK).
   - Saksi menerangkan bahwa situasi pemungutan suara berlangsung aman, kondusif, dan tanpa kendala.
2. **Sodik**
   - Saksi menerangkan bahwa ia memberikan suara di TPS 6, Kecamatan Batumarmar, Desa Bujur Tengah, Dusun Jungudan.
   - Saksi menerangkan bahwa hasil perolehan suara di TPS 6 adalah sebagai berikut:
     - Paslon 01 memperoleh 3 suara.
     - Paslon 02 memperoleh 404 suara dan menjadi pemenang di TPS ini.
     - Paslon 03 memperoleh 178 suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil perolehan suara (angka 1 halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 405/LHP/PM.01.02/JI.19/04/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten saksi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 tidak mau menandatangani D. Hasil KABKOT-KWK-Bupati/Walikota selanjutnya KPU Kabupaten Pamekasan menuangkan perolehan suara berdasarkan D. Hasil KABKOT-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut: **[Vide Bukti PK-16.28-01]**

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Ir. Fattah Jasin, MS. – RP Ahmad Mujahid Ansori, Drs	17.307
2	Dr. KH. Kholilurahman, SH., M.Si. – H. Sukriyanto	291.246
3	**Muhammad Baqir Aminatullah - Taufadi, S.H.I**	**263.740**
Total Suara Sah		572.293

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia dan terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) tapi digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan pencoblosan surat suara dalam pemungutan suara termasuk adanya kejadian nama pemilih yang menggunakan haknya berdasarkan DPT, ternyata sudah meninggal dunia sebelum tanggal 27 November 2024 dan Pemilihan yang sudah merantau dan bekerja ke luar negeri yang terdaftar dalam DPT, namun digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan pencoblosan surat suara dalam pemungutan suara (huruf A halaman 8 S/d halaman 22 dan dan Huruf E halaman 25 S/d 44 dan Huruf H halaman 46 S/d 48). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Pamekasan menerima dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan kehadiran 100% berdasarkan formulir Laporan A.1 dengan tanda terima Nomor: 004PL/PB/Kab/16.28/XII/2024, pada tanggal 3 Desember 2024 laporan tersebut setelah dilaksanakan kajian awal tidak terpenuhi syarat Formal dan Material sehingga diberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporannya pada tanggal 5 Desember 2024 **[Vide Bukti PK-16.28.02]** terhadap pokok laporan pelapor tersebut Bawaslu Kabupaten Pamekasan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat direkomendasikan kepada KPU Kabupaten
2. Pamekasan/ditindaklanjuti, sebab hal ini sulit dilaksanakan mengingat KPU Kabupaten Pamekasan sudah menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan pada tanggal 5 Desember 2024 **[Vide PK-16.28.03]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa bawaslu kabupaten pamekasan menerima laporan dari Sdr. Zaini dengan tanda terima penyampaian laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/16.28/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya kehadiran 100 % di 106 TPS pada 8 Kecamatan di Kabupaten Pamekasan **[Vide PK-16.28.04]**

1.1. Bawaslu Kabupaten Pamekasan melakukan kajian awal terhadap *in casu* dan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil pelaporan **[Vide PK-16.28.05]**

1.2. Bawaslu kabupaten pamekasan memberikan kesempatan kepada pelapor pada tanggal 5 Desember 2024 yang ada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporannya **[Vide PK-16.28.06]**

1.3. Pelapor pada tanggal 8 Desember 2024 memperbaiki laporannya, dan berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan laporan sdr. Zaini diregister dikarenakan sudah lengkap syarat formil dan materil **[Vide PK-16.28.07]**

1.4. Bawaslu Kabupaten Pamekasan melakukan kajian terhadap perkara *a quo*, *in casu a quo* merupakan pelanggaran administrasi pemilihan dan terbukti terdapat TPS-TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang salah dalam prosedur dalam proses pemungutan suara, Berikut TPS-TPS yang terbukti berdasarkan Kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan

NO	Desa	TPS	Keterangan	Alat Bukti
Kecamatan Tlanakan				**(Vide Alat Bukti 16.28-08** **Kajian Penangan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pamekasan**
1	Panglegur	6	Terdapat kemiripan tanda tangan di daftar hadir TPS	
2	Kramat	2	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	
Kecamatan Palengaan				
3	Rombuh	1	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100%	
4	Rombuh	3	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100%	
5	Rombuh	5	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100%	

6	Rombuh	6	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100%	
7	Panaan	2	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100%	
8	Panaan	3	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100%	
9	Panaan	5	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	
10	Panaan	902	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100%	
11	Potoan Laok	1	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	
12	Potoan laok	2	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	
13	Potoan laok	3	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	
14	Potoan Laok	901	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100% namun terdapat kemiripan tanda tangan	
15	Kacok	1	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100%	
16	Banyupelle	1	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100%	
17	Banyupelle	5	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100%	

18	Banyupelle	6	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100%	
19	Banyupelle	8	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100%	
20	Banyupelle	9	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100%	
21	Banyupelle	10	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100%	
22	Banyupelle	11	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100%	
23	Banyupelle	13	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100% akan tetapi terdapat surat keterangan kematian	
24	Banyupelle	14	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100% akan tetapi terdapat surat keterangan kematian	
Kecamatan Pasean				
25	Sana Tengah	2	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100% namun terdapat kemiripan tanda tangan	
26	Sana Tengah	3	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100% namun terdapat kemiripan tanda tangan	
Kecamatan Batu Marmar				
27	Bujur Timur	10	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	
28	Bujur Tengah	2	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	

29	Bujur Tengah	3	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100%	
30	Bujur Tengah	4	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	
31	Bujur Tengah	5	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	
32	Bujur Tengah	6	Terdapat Kemiripan Tanda Tangan di daftar hadir TPS	
33	Bujur Tengah	7	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	
34	Bujur Tengah	9	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	
35	Bujur Tengah	10	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	
36	Bujur Tengah	11	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	
37	Bujur Tengah	12	Terdapat Kemiripan Tanda Tangan di daftar hadir TPS	
38	Bujur Tengah	13	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	
39	Batu Tengah	14	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	
40	Batu Bintang	1	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	

41	Batu Bintang	12	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	
42	Blaban	1	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	
43	Blaban	2	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	
44	Blaban	4	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	
45	Blaban	5	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	
46	Blaban	6	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	
47	Blaban	7	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	
48	Blaban	8	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	
49	Blaban	9	Terdapat Kemiripan Tanda Tangan di daftar hadir TPS	
50	Bujur Barat	1	Terdapat Kemiripan Tanda Tangan di daftar hadir TPS	
51	Bujur Barat	2	Terdapat Kemiripan Tanda Tangan di daftar hadir TPS	
52	Bujur Barat	4	Terdapat Kemiripan Tanda Tangan di daftar hadir TPS	

53	Bujur Barat	5	Terdapat Kemiripan Tanda Tangan di daftar hadir TPS	
54	Bujur Barat	6	Terdapat Kemiripan Tanda Tangan di daftar hadir TPS	
55	Bujur Barat	7	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	
56	Bujur Barat	8	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	
57	Bujur Barat	9	Terdapat Kemiripan Tanda Tangan di daftar hadir TPS	
58	Lesong Daya	1	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	
59	Lesong Daya	1	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	
60	Lesong Laok	1	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	
61	Lesong Laok	3	Pengguna Hak Pilih dan surat suara yang digunakan 100% namun terdapat surat keterangan kematian	
62	lesong Laok	4	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	
63	Bangsereh	1	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat kemiripan tanda tangan	

Kecamatan Pademawu				
64	Sopaah	1	Tanda Tangan Daftar Hadir tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	
65	Prekbun	1	Tanda Tangan Daftar Hadir tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	
66	Dasok	1	Tanda Tangan Daftar Hadir tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta tanda tangan mirip	
67	Dasok	4	Tanda Tangan Daftar Hadir tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta tanda tangan mirip	
68	Dasok	6	Tanda Tangan Daftar Hadir tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta tanda tangan mirip	
Kecamatan Pegantenan				
69	Tebul Timur	3	Terdapat Kemiripan Tanda Tangan di daftar hadir TPS	
70	Tebul Timur	4	Terdapat Kemiripan Tanda Tangan di daftar hadir TPS dan video viral seseorang mencoblos berkali-kali	
71	Bulangan Barat	2	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100%	
72	Bulangan Timur	1	Tanda Tangan Daftar Hadir tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta tanda tangan mirip	
73	Bulangan Branta	1	Tanda Tangan Daftar Hadir tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta tanda tangan mirip	
74	Plakpak	7	Tanda Tangan Daftar Hadir tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	

75	Plakpak	17	Tidak Tanda Tangan tapi di Contreng	
76	Pasanggar	4	Tanda Tangan Daftar Hadir tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta tanda tangan mirip	
77	Pasanggar	5	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100%	
78	Pasanggar	6	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100%	
79	Pasanggar	7	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100%	
80	Pasanggar	9	Tanda Tangan Daftar Hadir tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta tanda tangan mirip	
81	Palesanggar	6	Tanda Tangan Daftar Hadir tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat surat keterangan kematian	
82	Palesanggar	8	Tanda Tangan Daftar Hadir tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat surat keterangan kematian	
83	Palesanggar	13	Tanda Tangan Daftar Hadir tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta terdapat surat keterangan kematian	
84	Tanjung	3	Tanda Tangan Daftar Hadir tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	
85	Tanjung	4	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100%	
86	Tanjung	6	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100%	

Kecamatan Proppo				
87	Tattangoh	3	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	
88	Panagguan	5	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	
89	Mapper	1	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100% serta terdapat surat keterangan dari rumah sakit	
90	Mapper	2	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100% serta terdapat surat keterangan dari rumah sakit	
91	Mapper	3	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100% serta terdapat surat keterangan dari rumah sakit	
92	Mapper	4	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100% serta terdapat surat keterangan dari rumah sakit	
93	Mapper	1	Tanda Tangan tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100%	
94	Jambringin	3	Tanda Tangan Daftar Hadir tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta tanda tangan mirip	
95	Jambringin	4	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100%	
96	Jambringin	8	Tanda Tangan Daftar Hadir tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta tanda tangan mirip	
97	Campor	1	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100%	

98	Campor	2	Tanda Tangan Daftar Hadir tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta tanda tangan mirip	
99	Campor	3	Tanda Tangan Daftar Hadir tidak 100% sedangkan pengguna hak pilih 100% serta tanda tangan mirip	
100	Campor	4	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100%	
101	Campor	5	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100%	
102	Campor	6	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100%	
103	Campor	7	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100%	
104	Campor	8	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100%	
105	Campor	11	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100%	
Kecamatan Kadur				
106	Bangkes	8	daftar hadir dan pengguna hak pilih 100%	

1.5. Bawaslu Kabupaten Pamekasan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan/ditindaklanjuti, sebab hal ini sulit dilaksanakan mengingat KPU Kabupaten Pamekasan sudah menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan pada tanggal 5 Desember 2024 **[Vide PK-16.28.03]**

2. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 15 Desa Tanjung sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2013.15/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada dugaan pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut **[Vide PK-16.28.09]**

3. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 4 Desa Potoan Laok sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.06.2007.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada dugaan pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut **[Vide PK-16.28.10]**
4. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 2 Desa Bulangan Branta sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2004.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada dugaan pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut **[Vide PK-16.28.11]**
5. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 8 Desa Blaban sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2010.08/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada dugaan pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut **[Vide PK-16.28.12]**
6. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 8 Desa Bujur Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2012.08/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada dugaan pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut **[Vide PK-16.28.13]**
7. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 3 Desa Bujur Barat sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2002.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada dugaan pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut **[Vide PK-16.28.14]**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran *money politic* (Politik uang) yang dilakukan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (Huruf B halaman 23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Pamekasan menemukan informasi awal A 6 tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya menemukan informasi awal Video viral dari *whatsapp* berdurasi dua detik **[Vide Bukti PK-16.28.15]** Bawaslu Kabupaten Pamekasan meneruskan melalui surat Nomor:197/PP.00.02/K.JI-19/10/2024 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 187A Ayat (1) UU 10/2016 **[Vide Bukti PK-16.28.16]** Bawaslu Kabupaten Pamekasan melakukan pembahasan ketiga pada tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya menghentikan proses penyidikan disebabkan calon tersangka dan saksi mahkota tidak dapat dihadirkan **[Vide Bukti PK. 16.28.17]**

B. **Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan menemukan informasi awal A 6 tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya menemukan informasi awal Video viral dari *whatsapp* berdurasi 22 detik, 2 orang pemuda membagikan amplop berisi pecahan uang Rp. 50.000 dan stiker bergambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pamekasan nomor 2 (Kharisma) **[Vide Bukti PK-16.28.15]**

1.1. Bawaslu Kabupaten Pamekasan pada tanggal 18 oktober 2024 memberikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan Batumarmar untuk melaksanakan penelusuran terkait Video dugaan politik uang tersebut dan melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan. **[Vide Bukti PK-16.28.18] surat instruksi**

1.2. Bawaslu Kabupaten Pamekasan pada tanggal 19 oktober 2024 menerima laporan hasil pengawasan dari Panwaslu kecamatan batumarmar yang pada pokoknya Video tersebut terjadi di desa

bujur kecamatan batumarmar, dirumah adam amar asik dan pemuda yang membagikan uang tersebut bernama Ali dan Andi serta perekam Video itu bernama Budiyanto dan saleh sebagai salah satu penerima uang. **[Vide Bukti PK-16.28.19] LHP Panwascam**

1.3. Bawaslu Kabupaten Pamekasan berdasarkan hasil Rapat Pleno ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan meregister temuan dugaan pelanggaran politik uang dengan nomor register: 001/Reg/TM/PB/Kab/16.28/X/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK-16.28.20]**

1.4. Bawaslu Kabupaten Pamekasan melakukan pembahasan pertama dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Pamekasan tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: **[Vide Bukti PK-16.28.21]**

1.4.1. Pendapat Kejaksaan negeri Kabupaten Pamekasan yang pada pokoknya patut diduga melanggar ketentuan Pasal 187 A ayat (1)

1.4.2. Pendapat Kepolisian resor Kabupaten Pamekasan yang pada pokoknya patut diduga melanggar ketentuan Pasal 187 A ayat (1)

1.4.3. Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang pada pokoknya patut diduga melanggar ketentuan Pasal 187 A ayat (1)

Kesimpulan dari pembahasan mengundang dan mengirimkan klarifikasi terhadap terlapor dan saksi

1.5. Bawaslu Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 oktober 2024 mengundang klarifikasi terlapor Sdr. Andi dan Ali, Saksi Budiyanto, saleh serta pemilik tempat Adam Amar Asik untuk memberikan keterangan klarifikasi pada tanggal 26 Oktober 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Pamekasan, namun baik terlapor dan saksi tidak menghadiri undangan klarifikasi tersebut **[Vide Bukti PK-16.28.22]**

1.6. Bawaslu Kabupaten Pamekasan pada tanggal 27 Oktober 2024 kembali mengundang klarifikasi ke 2, sdr. Terlapor Ali dan andi,

saksi Saleh, Budiyanto dan Adam amar asik untuk memberikan klarifikasi pada tanggal 28 oktober 2024 di kantor bawaslu kabupaten pamekasan, namun hanya saksi saleh dan adam amar asik yang menghadiri undangan tersebut sedangkan terlapor Andi dan Ali serta saksi Budiyanto hadir akan tetapi pulang terlebih dahulu tanpa alasan yang jelas **[Vide Bukti PK-16.28.23]**

1.7. Bawaslu Kabupaten Pamekasan pada tanggal 30 Oktober 2024 melaksanakan pembahasan kedua sentra gakkumdu, yang pada pokoknya kepolisian resort pamekasan dan kejaksaan negeri pamekasan tidak sepakat kasus dugaan politik uang tersebut naik ke proses penyidikan karena alat bukti kurang, namun berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap dugaan politik uang tersebut telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke proses penyidikan karena sudah terpenuhi minimal 2 alat bukti **[Vide Bukti PK-16.28.24]**

1.7.1. Pendapat Kejaksaan negeri Kabupaten Pamekasan yang pada pokoknya tidak dapat dinaikan ke proses penyidikan dikarenakan kurangnya alat bukti

1.7.2. Pendapat Kepolisian resor Kabupaten Pamekasan yang pada pokoknya tidak dapat dinaikan ke proses penyidikan dikarenakan kurangnya alat bukti

1.7.3. Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang pada pokoknya memenuhi unsur dikarenakan alat bukti sudah cukup

Kesimpulan dari pembahasan dikembalikan pada hasil pleno Bawaslu Kabupaten Pamekasan

1.8. Bawaslu Kabupaten Pamekasan pada tanggal 30 Oktober 2024 mengirimkan surat penerusan Nomor: 197/PP.00.02/K.JI-19/10/2024 yang pada pokoknya dugaan pelanggaran pidana pemilihan kepada SPKT Polres Pamekasan serta menerbitkan surat perintah penyidikan kepada penyidik yang tergabung dalam sentra Gakkumdu kabupaten pamekasan untuk melakukan

penyidikan terhadap dugaan politik uang tersebut **[Vide Bukti PK-16.28.16]**

1.9. Bawaslu Kabupaten Pamekasan pada pokoknya mengeluarkan status temuan pada tanggal 30 oktober 2024 yang pokoknya terbukti sebagai temuan dugaan pelanggaran **[Vide Bukti PK-16.28.25]**

1.10. Bawaslu Kabupaten Pamekasan bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Pamekasan pada tanggal 19 November 2024 melakukan pembahasan ketiga dan gakkumdu Kabupaten Pamekasan yang pada pokoknya

1.10.1. Pendapat Kejaksaan negeri Kabupaten Pamekasan tidak dapat dilanjutkan karena tidak bisa menghadirkan terlapor dan saksi mahkota.

1.10.2. Pendapat Kepolisian resor Kabupaten Pamekasan yang pada pokoknya tidak dapat dilanjutkan karena tidak bisa menghadirkan terlapor dan saksi mahkota.

1.10.3. Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang pada pokoknya memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan dikarenakan sudah mencukupi alat bukti.

Kesimpulan dari pembahasan menerbitkan surat perintah pemberhentian penyidikan **[Vide Bukti PK-16.28.17]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran netralitas oleh Kepala Desa (Huruf C halaman 23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa bawaslu kabupaten pamekasan berdasarkan hasil pengawasan syber pada hari sabtu tanggal 12 oktober 2024 mendapatkan link tautan dari @gus.salam1 @kharisma.win @pamekasan_menyala terdapat konten kepala desa seddur kecamatan pakong yang berpose 2 jari bersama calon bupati dan wakil bupati kabupaten pamekasan (Kh. Kholilurrahman dan Sukriyanto) **[Vide**

Bukti PK-16.28.26] Bawaslu Kabupaten Pamekasan merekomendasikan kepada PJ Bupati Kabupaten Pamekasan surat Nomor: 191/PP.00.02/K.JI-19/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya terbukti melanggar netralitas kepala Desa **[Vide Bukti PK-16.28.27]** Terhadap rekomendasi tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang pada pokoknya meminta kronologi surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Pamekasan pengawasan syber pada hari sabtu tanggal 12 oktober 2024 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 088/LHP/PM.01.02/K.JI-19/14/X/2024 yang pada pokoknya menemukan dari akun @gus.salam1 @kharisma.win @pamekasan_menyala terdapat konten kepala desa seddur kecamatan pakong yang berpose 2 jari bersama calon bupati dan wakil bupati kabupaten pamekasan (Kh. Kholilurrahman dan Sukriyanto) **[Vide Bukti PK-16.28.26]**
   1.1. Bawaslu Kabupaten Pamekasan memberikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan Pakong untuk melakukan penelusuran terkait informasi tersebut **[Vide Bukti PK-16.28.28]**
   1.2. Bawaslu Kabupaten Pamekasan pada tanggal 14 Oktober 2024 mengundang sdr. Subki Suwito untuk memberikan keterangan terkait informasi dugaan netralitas tersebut hari selasa tanggal 15 Oktober 2024 pukul 10.30 di Kantor Panwaslu Kecamatan Pakong, akan tetapi Sdr. Subki suwito tidak menghadiri undangan permintaan keterangan tersebut. **[Vide Bukti PK-16.28.29]**
   1.3. Bawaslu Kabupaten Pamekasan pada hari Senin Tanggal 28 Oktober 2024 Nomor: 191/PP.00.02/K.JI-19/10/2024 merekomendasikan kepada PJ Bupati Kabupaten Pamekasan perihal kepala desa Seddur kecamatan Pakong yang melanggar netralitas kepala desa untuk selanjutnya ditintaklakuti sebagai pelanggaran hukum lainnya. **[Vide Bukti PK-16.28.27]**

1.4. Terhadap rekomendasi tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang pada pokoknya meminta kronologi surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Pelanggaran berupa pemilih mencoblos lebih satu kali (Huruf D halaman 24). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan temuan pemilihan dan permohnan sengketa permohoan

B. **Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 4 Desa Tebul Timur sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 006/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2009.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada pelanggaran di TPS 4 Desa Tebul Timur tetapi setelah dilakukan kajian terhadap laporan Sdr. Zaini dan Abd Kholis Bawaslu Kabupaten Pamekasan menemukan adanya pelanggaran di TPS 4 Desa Tebul Timur **[Vide Bukti PK-16.28.08]**
2. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 8 Desa Waru Timur sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 007/LHP/PM.01.02/JI-19.10.2009.08/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada dugaan pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS tersebut **[Vide Bukti PK-16.28.30]**
3. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 5 Desa Panaan sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.19.06.2006.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada dugaan pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS tersebut **[Vide Bukti PK-16.28.31] Form A**

4. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 7 Desa Blaban sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2010.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada dugaan pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS tersebut **[Vide Bukti PK-16.28.32)**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat adanya pelanggaran berupa intimidasi dan pengusiran terhadap saksi paslon nomor urut 3 yang dilakukan oleh Panitia (Huruf F halaman 44). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 1 Desa Bangsereh sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2003.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Bangsareh **[Vide Bukti PK-16.28.33]**
2. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 9 Desa Bujur Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2012.09/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 9 Desa Bujur Tengah **[Vide Bukti PK-16.28.34]**
3. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 5 Desa Bujur Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan hasil

pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2012.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 5 Desa Bujur Tengah **[Vide Bukti PK-16.28.35]**

4. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 6 Desa Bujur Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2012.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 6 Desa Bujur Tengah **[Vide Bukti PK-16.28.36]**
5. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 7 Desa Bujur Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2012.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 7 Desa Bujur Tengah **[Vide Bukti PK-16.28.37]**
6. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 10 Desa Bujur Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2012.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 10 Desa Bujur Tengah **[Vide Bukti PK-16.28.38]**
7. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 4 Desa Bujur Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2012.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 4 Desa Bujur Tengah **[Vide Bukti PK-16.28.39]**

8. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 4 Desa Dasok sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.02.2014.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 4 Desa Dasok **[Vide Bukti PK-16.28.40]**
9. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 6 Desa Dasok sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.19.02.2014.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 6 Desa Dasok **[Vide Bukti PK-16.28.41]**
10. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 7 Desa Larangan Badung sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JI.19.06.2005.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 7 Desa Larangan Badung **[Vide Bukti PK-16.28.42]**
11. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 4 Desa Larangan Badung sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JI.19.06.2005.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 4 Desa Larangan Badung **[Vide Bukti PK-16.28.43]**
12. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 1 Desa Potoan Laok sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.06.2007.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Potoan Laok **[Vide Bukti PK-16.28.44]**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

13. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 2 Desa Potoan Laok sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.06.2007.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Potoan Laok **[Vide Bukti PK-16.28.45]**
14. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 7 Desa Plakpak sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2001.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 7 Desa Plakpak **[Vide Bukti PK-16.28.46]**
15. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 17 Desa Plakpak sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 006/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2001.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 17 Desa Plakpak **[Vide Bukti PK-16.28.47]**
16. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 1 Desa Bulangan Branta sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2004.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Bulangan Barat **[Vide Bukti PK-16.28.48]**
17. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 1 Desa Bulangan Timur sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2009.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Bulangan Timur **[Vide Bukti PK-16.28.49]**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

18. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 6 Desa Palesanggar sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2001.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 6 Desa Palesanggar **[Vide Bukti PK-16.28.50]**
19. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 8 Desa Palesanggar sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 006/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2002.08/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 8 Desa Palesanggar **[Vide Bukti PK-16.28.51]**
20. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 4 Desa Pasanggar sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2012.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 4 Desa Pasanggar **[Vide Bukti PK-16.28.52]**
21. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 6 Desa Pasanggar sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2012.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 6 Desa Pasanggar **[Vide Bukti PK-16.28.53]**
22. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 7 Desa Pasanggar sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2012.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 7 Desa Pasanggar **[Vide Bukti PK-16.28.54]**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

23. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 9 Desa Pasanggar sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2012.09/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 9 Desa Pasanggar **[Vide Bukti PK-16.28.55]**
24. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 1 Desa Campor sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.05.01.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Campor **[Vide Bukti PK-16.28.56]**
25. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 3 Desa Campor sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.19.05.03.23/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Campor **[Vide Bukti PK-16.28.57]**
26. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 6 Desa Campor sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.19.05.06.23/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 6 Desa Campor **[Vide Bukti PK-16.28.58]**
27. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 7 Desa Campor sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.19.05.07.23/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 7 Desa Campor **[Vide Bukti PK-16.28.59]**
28. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 3 Desa Jambringin sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.19.05.07.23/27/XI/2024 tanggal 27

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Jambringin **[Vide Bukti PK-16.28.60]**

29. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 2 Desa Kramat sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.19.01.2005.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Kramat **[Vide Bukti PK-16.28.61]**
30. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 1 Desa Sopaah sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 007/LHP/PM.01.02/JI.19.02.2008.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Sopaah **[Vide Bukti PK-16.28.62]**
31. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 1 Desa Prekbun sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.02.2009.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Prekbun **[Vide Bukti PK-16.28.63]**
32. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 6 Desa Panglegur sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.19.01.2013.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 6 Desa Panglegur **[Vide Bukti PK-16.28.64]**
33. Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas TPS 17 Desa Plakpak Sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.01.2001.17/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 17 Desa Plakpak **[Vide Bukti PK-16.28.65]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang sudah merantau dan bekerja ke luar negeri yang terdaftar dalam DPT, namun digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan pencoblosan surat suara dalam pemungutan suara (Huruf G halaman 45). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas Desa Bujur Timur sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan di semua TPS se Desa Bujur Timur tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya **[Vide Bukti PK-16.28.66] Form A**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pamekasan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.16.28-01sampai dengan Bukti PK.16.28-66, sebagai berikut:

1. Bukti PK.16.28-01 : Fotokopi LHP Pengawasan saat rekapitulasi di Kabupaten, D. Hasil KABKOT-KWK Bupati/Walikota dan form kejadian khusus di saat rekapitulasi.
2. Bukti PK.16.28-02 : Fotokopi Tanda terima laporan Nomor: 004/PL/PB /Kab/16.28/XII/2024 dengan pelapor atas nama Zaini.
3. Bukti PK.16.28-03 : Fotokopi Status laporan Nomor: 004/Reg/LP /PB/Kab/16.28/XII/2024 dengan pelapor atas nama Zaini.
4. Bukti PK.16.28-04 : Fotokopi Formulir Model A. 1 Penerima Laporan dengan pelapor atas nama Zaini.
5. Bukti PK.16.28-05 : Fotokopi Kajian awal dugaan Pelanggaran terhadap laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/16.28/XII/2024.
6. Bukti PK.16.28-06 : Fotokopi Surat pemberitahuan perbaikan kepada pelapor atas nama Zaini.

7. Bukti PK.16.28-07 : Fotokopi Tanda bukti perbaikan laporan formulir A.3.1 dengan pelapor atas nama Zaini.
8. Bukti PK.16.28-08 : Fotokopi Kajian terhadap dugaan pelanggaran terhadap Laporan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/16.28/XII/2024.
9. Bukti PK.16.28-09 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 15 Desa Tanjung Nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2013.15/27/XI/2024.
10. Bukti PK.16.28-10 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 4 Desa Potoan Laok Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.06.2007.04/27/XI/2024.
11. Bukti PK.16.28-11 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 2 Desa Bulangan Branta Nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2 004.02/27/XI/2024.
12. Bukti PK.16.28-12 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 8 Desa Blaban Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2010.08/27/XI/2024.
13. Bukti PK.16.28-13 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 8 Desa Bujur Timur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2012.08/27/XI/2024.
14. Bukti PK.16.28-14 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 3 Desa Bujur Barat Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2002.03/27/XI/2024.
15. Bukti PK.16.28-15 : Fotokopi Formulir Model A. 6 Informasi Awal dugaan Pelanggaran.
16. Bukti PK.16.28-16 : Fotokopi surat penerusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan kepada Kepolisian Kabupaten Pamekasan Nomor: 197/PP.00.02/K.JI-19/10/2024.
17. Bukti PK.16.28-17 : Fotokopi Berita acara pembahasan ketiga sentra gakkumdu temuan Nomor: 001/reg/TM/BP/KAB/16.28/X/2024.
18. Bukti PK.16.28-18 : Fotokopi Surat instruksi Penelusuran dugaan pelanggaran Nomor: 197/PP.00.02/K.JI-19/10/2024 Kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batu Marmar.
19. Bukti PK.16.28-19 : Fotokopi Laporan Hasil Penelusuran Panwaslu Kecamatan Batu Marmar Nomor: 022/LHP/PM.01.02/JI-19.11/19/10/2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

20. Bukti PK.16.28-20 : Fotokopi Formulir Model A. 2 Temuan dugaan pelanggaran 001/reg/TM/BP/KAB/16.28/X/2024.
21. Bukti PK.16.28-21 : Fotokopi Berita acara pembahasan Pertama sentra gakkumdu temuan Nomor: 001/reg/TM/BP/KAB/16.28/X/2024.
22. Bukti PK.16.28-22 : Fotokopi Undangan Klarifikasi kepada Andi, Ali, dan Budiyanto.
23. Bukti PK.16.28-23 : Fotokopi Undangan Klarifikasi kedua kepada. Andi, Ali, dan Budiyanto.
24. Bukti PK.16.28-24 : Fotokopi Berita acara pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Temuan Nomor: 001/reg/TM/BP/KAB/16.28/X/2024.
25. Bukti PK.16.28-25 : Fotokopi Status Temuan dugaan pelanggaran politik uang Nomor: 001/reg/TM/BP/KAB/16.28/X/2024.
26. Bukti PK.16.28-26 : Fotokopi LHP Nomor: 0107.1/LHP/PM.01.02/JI-19/11/X/2024 temuan dugaan netralitas kepala Desa Seddur Kecamatan Pakong.
27. Bukti PK.16.28-27 : Fotokopi Surat Rekomendasi Netralitas Kepala Desa kepada Pj Bupati Pamekasan.
28. Bukti PK.16.28-28 : Fotokopi Surat Instruksi Penelusuran kepada ketua dan anggota Panwaslu kecamatan Pakong Nomor: 166/PP.00.02/K.JI-19/10/2024.
29. Bukti PK.16.28-29 : Fotokopi Undangan Permintaan Keterangan kepada Kepala Seddur Kecamatan Pakong.
30. Bukti PK.16.28-30 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 8 Desa Waru Timur Pamekasan Nomor: 007/LHP/PM.01.02/JI-19.10.2009.08/27/XI/2024.
31. Bukti PK.16.28-31 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 5 Desa Panaan Palengaan Pamekasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2010.07/27/XI/2024.
32. Bukti PK.16.28-32 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 7 Desa Blaban Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2010.07/27/XI/2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

33. Bukti PK.16.28-33 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 1 Desa Bangsereh Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2003.01/27/XI/2024.
34. Bukti PK.16.28-34 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 9 Desa Bujur Tengah Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2012.09/27/XI/2024.
35. Bukti PK.16.28-35 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 5 Desa Bujur Tengah Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2012.05/27/XI/2024.
36. Bukti PK.16.28-36 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 6 Desa Bujur Tengah Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2012.06/27/XI/2024.
37. Bukti PK.16.28-37 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 7 Desa Bujur Tengah Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2012.07/27/XI/2024.
38. Bukti PK.16.28-38 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 10 Desa Bujur Tengah Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2012.07/27/XI/2024.
39. Bukti PK.16.28-39 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 4 Desa Bujur Tengah Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2012.04/27/XI/2024.
40. Bukti PK.16.28-40 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS Desa 4 Desa Dasok Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.02.2014.04/27/XI/2024.
41. Bukti PK.16.28-41 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 6 Desa Dasok Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.19.02.2014.06/27/XI/2024.
42. Bukti PK.16.28-42 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 7 Desa Larangan Badung Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JI.19.06.2005.07/27/XI/2024.
43. Bukti PK.16.28-43 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 4 Desa Larangan Badung Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JI.19.06.2005.04/27/XI/2024.
44. Bukti PK.16.28-44 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 1 Desa Potoan laok Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.06.2007.01/27/XI/2024.
45. Bukti PK.16.28-45 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 2 Desa Potoan Laok Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.06.2007.02/27/XI/2024.
46. Bukti PK.16.28-46 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 7 Desa Plakpak Nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2001.07/27/XI/2024.
47. Bukti PK.16.28-47 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 17 Desa Plakpak Nomor: 006/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2001.07/27/XI/2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

48. Bukti PK.16.28-48 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 1 Desa Bulangan Branta Nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2004.01/27/XI/2024.
49. Bukti PK.16.28-49 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 1 Desa Bulangan Timur Nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2009.04/27/XI/2024.
50. Bukti PK.16.28-50 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 6 Desa Palesanggar Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2001.06/27/XI/2024.
51. Bukti PK.16.28-51 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 8 Desa Palesanggar Nomor: 006/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2002.08/27/XI/2024.
52. Bukti PK.16.28-52 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 4 Desa Pasanggar Nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2012.04/27/XI/2024.
53. Bukti PK.16.28-53 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 6 Desa Pasanggar Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2012.06/27/XI/2024.
54. Bukti PK.16.28-54 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 7 Desa Pasanggar Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2012.07/27/XI/2024.
55. Bukti PK.16.28-55 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 9 Desa Pasanggar Nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2012.09/27/XI/2024.
56. Bukti PK.16.28-56 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 1 Desa Campor Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.05.01.03/27/XI/2024.
57. Bukti PK.16.28-57 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 3 Desa Campor Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.19.05.03.23/27/XI/2024.
58. Bukti PK.16.28-58 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 6 Desa Campor Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.19.05.06.23/27/XI/2024.
59. Bukti PK.16.28-59 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 7 Desa Campor Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.19.05.07.23/27/XI/2024.
60. Bukti PK.16.28-60 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 3 Desa Jambringin Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.19.05.07.23/27/XI/2024.
61. Bukti PK.16.28-61 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 2 Desa Kramat Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.19.01.2005.02/27/XI/2024.
62. Bukti PK.16.28-62 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 1 Desa Sopaah Nomor: 007/LHP/PM.01.02/JI.19.02.2008.01/27/XI/2024.
63. Bukti PK.16.28-63 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 1 Desa Prekbun Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.02.2009.01/27/XI/2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

64. Bukti PK.16.28-64 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 6 Desa Panglegur Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.19.01.2013.06/27/XI/2024.
65. Bukti PK.16.28-65 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS 17 Desa Plakpak Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.01.2001.17/27/XI/2024.
66. Bukti PK.16.28-66 : Fotokopi LHP Pengawasan TPS Se Desa Bujur Timur.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan yang diajukan bukanlah terkait perselisihan hasil pemilihan, akan tetapi berkaitan dengan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, pidana *money politic,* netralitas kepala desa, serta pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang telah ada mekanisme penyelesaiannya tersendiri secara limitatif yaitu Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan Sentra Gakkumdu, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo.*

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Nomor 1438 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan 1438/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-19 = Bukti PT-7];

[3.2.2] Bahwa frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus" telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". Oleh karena itu, berkenaan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili secara permanen. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan 1438/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-19 = Bukti PT-7], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan 1438/2024 ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2024, padahal Termohon menetapkan Keputusan *a quo* pada tanggal 5 Desember 2024. Selain itu, pada dalil tenggang waktu permohonan, Pemohon mengajukan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, padahal Termohon tidak pernah menerbitkan Keputusan tersebut, sehingga karena kekeliruan Keputusan yang dimohonkan, maka permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perudang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan 1438/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 01.00 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-19 = Bukti PT-7]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024 dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 20.53 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 185/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Adapun terhadap perbedaan Nomor Keputusan pada bagian tenggang waktu pengajuan permohonan, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon pada bagian perihal, kewenangan Mahkamah, serta petitum Pemohon, telah ternyata yang dimohonkan adalah pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan 1438/2024. Sehingga, secara substansial Mahkamah dapat memahami maksud pembatalan yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan Mahkamah, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat cacat prosedur dan pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan melibatkan KPPS selaku penyelengara pemilu berupa tingkat kehadiran sampai 100 persen, padahal ada pemilih yang tercantum

dalam DPT telah meninggal dunia dan/atau pemilih yang sudah merantau, yang terjadi di 112 TPS yang tersebar di 7 kecamatan.

2. Terdapat pelanggaran berupa politik uang *(money politic)* yang dilakukan oleh calon wakil bupati nomor urut 2 dan tim suksesnya dengan membagikan amplop berisi uang dan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Paslon 2).
3. Terdapat pelanggaran netralitas beberapa kepala desa yang secara terang-terangan mendukung Paslon 2.
4. Terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali pada TPS 4 Desa Tebul Timur, TPS 8 Desa Waru Timur, TPS 5 Desa Panaan, TPS 7 Desa Blaban.
5. Terdapat intimidasi dan pengusiran kepada saksi Pemohon yang dilakukan oleh panitia pemilihan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, secara kasuistik dibuktikan dan diputusakan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, yang dimumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemekasan untuk Pemilukada ulang di Kabupaten Pemekasan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini;

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, secara kasuistik dibuktikan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, yang dimumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

5. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini;

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, secara kasuistik dibuktikan dan diputuskan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, yang dimumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 Kecamatan sepanjang di TPS-TPS yang disebutkan dan dilakukan supervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan dibawah ini sebagai berikut:
    1) Di Kecamatan Pegantenan antara lain:
        a. TPS 04, TPS 05, Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan;
        b. TPS 06, TPS 08 dan TPS 013 Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan;
        c. TPS 03 Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan;
        d. TPS 02, Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan;
        e. TPS 01 Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan;
        f. 15 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan;
    2) Di Kecamatan Proppo antara lain:
        a. TPS 01, Desa Mapper, Kecamatan Proppo;
    3) Di Kecamatan Palengaan antara lain:
        a. TPS 14 Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan;
    4) TPS 6 Desa Pasanggar Kecamatan Palenggaan;
    5) TPS 1 Desa LESONG LAOK, Kecamatan Batumarmar,
    6) TPS 3 Desa PATOAN LAOK, Kecamatan Palenggan,
    7) TPS 2 Desa PATOAN LAOK, Kecamatan Palenggaan,
    8) TPS 4 Desa PATOAN LAOK, Kecamatan Palenggaan,
    9) TPS 1 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu,
    10) TPS 4 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu,
    11) TPS 6 Desa DASOK, Kecamatan Pademawu,
    12) TPS 010 Desa Banyupelle, Kecamatan Palenggaan,
    13) TPS 011 Desa Banyupelle, Kecamatan Palenggaan,
    14) TPS 004 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenggaan,
    15) TPS 007 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenggaan,
    16) TPS 002 Desa Panaan, Kecamatan Palenggaan,
    17) TPS 003 Desa Panaan, Kecamatan Palenggaan,
    18) TPS 001 Desa Patoan Laok, Kecamatan Palenggaan,
    19) TPS 001 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
    20) TPS 003 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
    21) TPS 006 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
    22) TPS 007 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
    23) TPS 002 Desa Mapper, Kecamatan Proppo,
    24) TPS 003 Desa Mapper, Kecamatan Proppo,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

25) TPS 004 Desa Mapper, Kecamatan Proppo,
26) TPS 001 Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo,
27) TPS 005 Desa Panaguan, Kecamatan Proppo,
28) TPS 003 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan,
29) TPS 004 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan,
30) TPS 006 Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan,
31) TPS 002 Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan,
32) TPS 006 Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan,
33) TPS 001 Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu,
34) TPS 001 Desa Sopa'ah, Kecamatan Pademawu,
35) TPS 002 Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu,
36) TPS 002 Desa Sana Tengah, Kecamatan Pademawu,
37) TPS 001 Desa Bangreseh, Kecamatan Batumarmar,
38) TPS 001 Desa Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar,
39) TPS 010 Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar,
40) TPS 004 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar,
41) TPS 005 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar,
42) TPS 006 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar,
43) TPS 007 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar,
44) TPS 009 Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar,
45) TPS 001 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
46) TPS 002 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
47) TPS 004 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
48) TPS 005 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
49) TPS 006 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
50) TPS 007 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
51) TPS 009 Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,
52) TPS 002 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
53) TPS 003 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
54) TPS 002 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
55) TPS 004 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
56) TPS 005 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
57) TPS 006 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
58) TPS 007 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
59) TPS 009 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
60) TPS 010 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
61) TPS 011 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
62) TPS 012 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
63) TPS 013 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
64) TPS 014 Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar,
65) TPS 002 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
66) TPS 004 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
67) TPS 005 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
68) TPS 008 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
69) TPS 011 Desa Campor, Kecamatan Proppo,
70) TPS 004 Desa Jambringin, Kecamatan Proppo,
71) TPS 008 Desa Jambringin, Kecamatan Proppo,
72) TPS 001 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan,
73) TPS 008 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan,

74) TPS 012 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan,
75) TPS 013 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan,
76) TPS 014 Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan,
77) TPS 001 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan,
78) TPS 003 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan,
79) TPS 005 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan,
80) TPS 006 Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan,
81) TPS 009 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan,
82) TPS 013 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan,
83) TPS 004 Desa Totoan Laok, Kecamatan Palengaan,
84) TPS 002 Desa Totoan Laok, Kecamatan Palengaan,
85) TPS 003 Desa Totoan Laok, Kecamatan Palengaan,
86) TPS 001 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan,
87) TPS 005 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan,
88) TPS 006 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan,
89) TPS 008 Desa Banyupelleh, Kecamatan Palengaan,
90) TPS 003 Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean,
91) TPS 018 Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan,
92) TPS 001 Desa Mapper, Kecamatan Proppo, dan
93) TPS 004 Desa Rangperang Daya, Kecamatan Proppo;
94) TPS 1 Desa Bulanagan Timur
95) TPS 2 Desa Bulangan Berenta
96) TPS 3 Desa Pasean
97) TPS 09 Pasangger
98) TPS 3 Blaban
99) TPS 8 Blaban
100) TPS 3 Bujur Barat
101) TPS 3 Sana Tengah
102) TPS 1 Bujur Barat
103) TPS 17 Desa Plakpak
104) TPS 01 Desa Lesong Dejeh
105) TPS 1 Desa Lesong laok
106) TPS 04 Desa Lesong Laok
107) TPS 2 Desa Sana Tengah
108) TPS 3 Desa Bujur Barat
109) TPS 8 Desa Bujur Tengah
110) TPS 12 Desa Batu Bintang
111) TPS 8 Desa Bujur Barat
112) TPS 3 Desa Sana Tengah
113) TPS 1 Desa Bujur Barat

5. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan melaksanakan putusan ini;

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Ahli Pemohon bernama Moh. Saleh, Saksi Pemohon bernama Achmad Mukhlisin,

Mohammad Saleh Rekso, dan Hairul Hakim, Saksi Termohon bernama A. Tajul Arifin, Mohammad Maftuh, Moh. Syahid Hasbullah, dan Hasan Basri, Ahli Pihak Terkait bernama Alfian Futuhul Hadi dan Charles Simabura, Saksi Pihak Terkait bernama Moh. Sodik dan Rusdi, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-335, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-28, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-248, dan Bukti PK.16.28-01 sampai dengan Bukti PK.16.28-66], dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat cacat prosedur dan pelanggaran berupa tingkat kehadiran sampai 100 persen, padahal ada pemilih yang tercantum dalam DPT telah meninggal dunia dan/atau pemilih yang sudah merantau, yang didalilkan terjadi di 112 TPS yang tersebar di 7 kecamatan.

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-248 serta 1 (satu) orang ahli yaitu Moh. Saleh dan 2 (dua) orang saksi yaitu Mohammad Saleh Rekso dan Hairul Hakim (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi jawaban/bantahan yang pada pokoknya Termohon telah melakukan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Pamekasan yang dimulai dari tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 841 Tahun 2024 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pamekasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 tanggal 19 September 2024. Selain itu, dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang meninggal dunia tidak disandarkan pada dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berkenaan dengan dalil adanya pemilih yang sudah merantau dan disalahgunakan hak pilihnya, Termohon memberikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya Pemohon dalam buktinya hanya menunjukkan surat keterangan merantau

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

tanpa adanya bukti kuat bahwa pemilih yang merantau tersebut benar-benar tidak menggunakan hak pilihnya dan hak pilihnya digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti T-2, Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-22, Bukti T-25 sampai dengan Bukti T-28, serta 4 (empat) orang saksi yaitu A. Tajul Arifin, Mohammad Maftuh, Moh. Syahid Hasbullah, dan Hasan Basri (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak serta merta menetapkan DPT, namun sebelum DPT ditetapkan telah melalui proses yang panjang, terhadap pemilih yang sudah meninggal dunia, dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, Termohon tidak serta merta dapat memasukkan dan mengeluarkan Pemilih dari daftar Pemilih. Akan tetapi, untuk mengeluarkan Pemilih dari daftar pemilih harus dibuktikan secara *de jure* dengan disandarkan pada dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di samping itu, Pihak Terkait juga menerangkan bahwa Pihak Terkait melakukan penelitian dan pencocokan dengan mendatangi pemilih atau tempat pemilih sebagaimana yang didalilkan sudah meninggal dunia, dan menemukan pada faktanya pemilih yang bersangkutan masih hidup.

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PT-22 sampai dengan Bukti PT-142, serta 2 (dua) orang ahli yaitu Alfian Futuhul Hadi dan Charles Simabura dan 2 (dua) orang saksi yaitu Moh. Sodik dan Rusdi (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pamekasan menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 dengan tanda terima Nomor: 004/PL/PB/Kab/16.28/XII/2024, pada tanggal 3 Desember 2024. Laporan tersebut telah dilaksanakan kajian awal dan dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan material sehingga diberikan kesempatan kepada

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

pelapor untuk memperbaiki laporannya pada tanggal 5 Desember 2024. Pelapor pada tanggal 8 Desember 2024 memperbaiki laporannya, selanjutnya diregister dikarenakan sudah lengkap syarat formil dan materiil dengan Nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/16.28/XII/2024. Terhadap pokok laporan pelapor tersebut, Bawaslu Kabupaten Pamekasan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan atau ditindaklanjuti, karena KPU Kabupaten Pamekasan sudah menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan pada tanggal 5 Desember 2024.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pemekasan mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK-16.28.02 sampai dengan Bukti PK-16.28.08.

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Mahkamah menemukan dalam permohonan Pemohon, bahwa dari 112 TPS yang dimohonkan hanya terdapat 18 TPS yang disebutkan nama-nama pemilih yang telah meninggal dunia, yaitu TPS 04 dan TPS 05 Desa Pasanggar, TPS 06, TPS 08 dan TPS 13 Desa Palesanggar, TPS 03 Desa Tebul Timur, TPS 02 Desa Bulangan Barat, TPS 01 Desa Bulangan Timur, TPS 15 Desa Tanjung, TPS 001, TPS 002 dan TPS 004 Desa Patoan Laok, TPS 14 Desa Banyupelle, TPS 001 Desa Mapper, TPS 1, TPS 4 dan TPS 6 Desa Dasok, dan TPS 01 Desa Lesong Laok. Adapun terhadap TPS-TPS lainya, tidak terdapat penjelasan mengenai berapa pemilih yang telah meninggal dunia serta siapa saja pemilih dimaksud. Selain itu, terhadap pemilih yang sudah merantau, Pemohon hanya menyebutkan nama-nama pemilih yaitu Amrosiy, Nasukdin, Ismail, dan Bersawi pada Desa Bujur Timur, Kecamatan Batu Marmar, namun tidak terdapat penjelasan di TPS mana pemilih-pemilih tersebut telah disalahgunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan dalil Pemohon di 18 TPS tersebut.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Bahwa terhadap dalil adanya pemilih yang telah meninggal dunia dan disalahgunakan hak pilihnya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat pernyataan atau keterangan dari kepala desa serta surat pernyataan dari ahli waris (vide Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-12, Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-20, Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-33, Bukti P-36 sampai dengan Bukti P-68, Bukti P-71 sampai dengan Bukti P-72, Bukti P-114, Bukti P-132, Bukti P-135 sampai dengan Bukti P-136, Bukti P-139 sampai dengan Bukti P-140), setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti dimaksud, memang didapati bahwa nama-nama yang disebutkan di dalam surat pernyataan atau keterangan adalah nama-nama yang sama dengan yang didalilkan di dalam permohonan Pemohon. Namun, surat pernyataan tersebut tidak dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan salinan KTP sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi nama-nama pemilih dimaksud. Sementara itu, terhadap beberapa nama yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa surat pernyataan beserta KTP yang memuat NIK pemilih untuk menyatakan bahwa pemilih tersebut masih hidup. Adapun nama-nama pemilih tersebut antara lain Lima (Bukti T-7 = Bukti PT-40), Bukasah (Bukti PT-24), Saprae (Bukti PT-24), Moh. Samsul (Bukti PT-26), Misjati (Bukti PT-27), Minsiyah (Bukti PT-28), Sinami (Bukti PT-35), Kembar (Bukti PT- 38), Martilem (Bukti PT-43), Matheri (Bukti PT-45), Misjati (Bukti PT-53). Sementara terhadap nama-nama pemilih lainya, Pihak Terkait hanya mengajukan surat pernyataan yang juga tidak memuat NIK pemilih tanpa disertai salinan KTP pemilih dimaksud, antara lain yaitu Lukat (Bukti PT-22), Misturah (Bukti PT-30), Moh. Suli (Bukti PT-31), Patni (Bukti PT-32), Samiuddin (Bukti PT-33), Sihah (Bukti PT-34), Artali (Bukti PT-36), Bu Sinab (Bukti PT-37), Markati (Bukti PT-41), Marlani (Bukti PT-42), Mat Dimin (Bukti PT-44), Misjenten (Bukti PT-46), Misnadin (Bukti PT-48).

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait berupa surat pernyataan dan salinan KTP pemilih dimaksud, menurut Mahkamah nama-nama pemilih sebagaimana dalam bantahan Termohon dan keterangan Pihak Terkait telah ternyata masih hidup. Adapun terhadap nama-nama lain yang tidak dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, oleh karena bukti yang diajukan Pemohon hanya berupa surat pernyataan/keterangan yang tidak dilengkapi dengan NIK dan salinan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

KTP untuk dapat mengidentifikasi data kependudukan pemilih dimaksud, maka Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran berupa politik uang *(money politic)* yang dilakukan oleh calon wakil bupati nomor urut 2 dan tim suksesnya dengan membagikan amplop berisi uang dan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Paslon 2).

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-105 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Mohammad Saleh Rekso (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi jawaban/bantahan yang pada pokoknya mengenai dalil adanya praktik *money politic* tidak menjadi ranah Termohon untuk menindaklanjutinya. Adapun terhadap laporan Nomor 004/PL/PB/KAB/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024, belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht)* berkenaan dengan laporan dimaksud.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya bahwa penerapan ketentuan pidana pemilihan yang berkaitan dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara maupun pemilih adalah pada masa kampaye, bukan di luar masa kampanye. Adapun terhadap Laporan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/16.28/X/2024, Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan Sentra Gakkamudu telah menindaklanjutinya dan menyatakan peristiwa tersebut bukan merupakan kualifikasi pelanggaran politik uang.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pamekasan menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan menemukan informasi awal berupa video viral dari whatsapp berdurasi dua detik. Bawaslu Kabupaten Pamekasan meregister temuan dugaan pelanggaran politik uang dengan nomor

register: 001/Reg/TM/PB/Kab/16.28/X/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024. Selanjutnya, pada tanggal 30 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Pamekasan meneruskan temuan tersebut melalui Surat Nomor: 197/PP.00.02/K.JI-19/10/2024 yang pada pokoknya menyatakan memenuhi unsur dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 187A Ayat (1) UU 10/2016. Bawaslu Kabupaten Pamekasan bersama Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan ketiga pada tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya menghentikan proses penyidikan disebabkan calon tersangka dan saksi mahkota tidak dapat dihadirkan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pemekasan mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK-16.28.15 sampai dengan Bukti PK-16.28.25.

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya terjadi pelanggaran berupa politik uang *(money politic)* yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kegiatan tersebut terjadi pada acara tahlilan berupa pembagian amplop berisi uang dan stiker Paslon 2 sebagaimana keterangan saksi Pemohon atas nama Mohammad Saleh Rekso [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 10 Februari 2025, hlm. 70-72]. Terhadap peristiwa tersebut, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, terdapat temuan dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti dengan register: 001/Reg/TM/PB/Kab/16.28/X/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024 [vide Bukti PK-16.28.20]. Bawaslu Kabupaten Pamekasan mengeluarkan status temuan pada tanggal 30 Oktober 2024 yang pokoknya terbukti sebagai temuan dugaan pelanggaran dan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu [vide Bukti PK-16.28.25]. Namun, pada tanggal 19 November 2024, terhadap peristiwa tersebut telah

diterbitkan surat perintah pemberhentian penyidikan karena telah daluwarsa [vide Bukti PK-16.28.17].

Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan keterangan Bawaslu dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, praktik *money politic* sebagaimana didalilkan Pemohon adalah benar adanya dan secara faktual belum pernah diselesaikan melalui mekanisme penegakan hukum pidana. Hal demikian disebabkan karena singkatnya waktu penyelesaian pelanggaran pidana pemilihan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat menjadi modus bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pidana pemilihan untuk mengulur-ulur waktu dengan tidak menghadiri panggilan penyidik pada Sentra Gakkumdu sehingga kemudian diterbitkan surat perintah pemberhentian penyidikan karena telah daluwarsa. Meskipun demikian, dalam perkara *a quo,* Mahkamah telah dapat meyakini bahwa praktik *money politic* tersebut benar adanya. Namun, karena kejadian tersebut hanya terjadi di satu tempat kejadian, Mahkamah menilai peristiwa tersebut bersifat sporadis/kasuistis sehingga peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Dengan demikian, dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan kepala desa yang melanggar netralitas dengan secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/PL/PB/KAB/XII/2024, tertanggal 03 Desember 2024 dan saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan di Bawaslu.

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-106 sampai dengan bukti P-107.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar karena yang didalilkan hanya berupa laporan saja yang tidak disertai dengan keputusan yang sah oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016, Kepala Desa tidak dilarang untuk melakukan kampanye, selama memiliki izin kampanye.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya bahwa menolak dalil Pemohon karena faktanya tidak terjadi pelanggaran netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024. Pemohon tidak dapat mengkontruksikan dalil-dalil permohonan terkait dengan netralitas kepala desa, karena Pemohon tidak mendalilkan siapa kepala desa yang mendukung pasangan calon, bagaimana bentuk dukungannya, caranya bagaimana, di mana dan kapan dukungan itu dilakukan, dan apakah terdapat relevansinya dengan perolehan suara Pihak Terkait. Hal tersebut penting untuk diuraikan agar dapat diperoleh fakta bahwa netralitas kepala desa yang didalilkan Pemohon memiliki relevansinya dengan perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon telah melaporkan kepala desa yang diduga mendukung pasangan calon kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan telah diproses dan ditangani Bawaslu Kabupaten Pamekasan, dan hasil kajiannya tidak ada pelanggaran netralitas kepala desa, baik sebelum maupun setelah penetapan pasangan calon. Tidak terdapat rekomendasi yang dilimpahkan atau diteruskan kepada Bupati, sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pamekasan menerangkan, berdasarkan hasil pengawasan *cyber* pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024, didapati link tautan dari @gus.salam1 @kharisma.win @pamekasan_menyala yang berisi konten Kepala Desa Seddur, Kecamatan Pakong yang berpose 2 jari bersama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pamekasan (KH. Kholilurrahman dan Sukriyanto). Bawaslu Kabupaten Pamekasan merekomendasikan kepada PJ Bupati Kabupaten Pamekasan melalui surat Nomor: 191/PP.00.02/K.JI-19/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya peristiwa tersebut terbukti melanggar netralitas kepala desa. Terhadap rekomendasi tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang pada pokoknya meminta kronologi surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan.

Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Pamekasan mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK-16.28.25 sampai dengan Bukti PK-16.28.29.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya terdapat pelanggaran netralitas beberapa kepala desa yang secara terang-terangan mendukung Paslon 2. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak terdapat laporan kepada Bawaslu berkaitan peristiwa dimaksud, namun terdapat temuan berdasarkan hasil pengawasan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024 yang merupakan masa kampanye, Kepala Desa Seddur, Kecamatan Pakong berfoto bersama Paslon 2 beserta simpatisannya [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 10 Februari 2025, hlm. 239-242]. Terhadap peristiwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Nomor: 191/PP.00.02/K.JI-19/10/2024 merekomendasikan kepada Pj. Bupati Kabupaten Pamekasan untuk menindaklanjutinya sebagai pelanggaran hukum lainnya [Vide Bukti PK-16.28.27].

Bahwa menurut Mahkamah, terhadap peristiwa yang didalilkan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilihan yang hasilnya adalah diterbitkannya rekomendasi kepada Pj. Bupati Pamekasan dan telah diberikan sanksi berupa peringatan. Terlebih lagi, kejadian tersebut terjadi di satu tempat kejadian dan tidak terdapat bukti yang kuat bahwa kepala desa tersebut menggunakan kewenangannya untuk mengarahkan pemilih. Sehingga, tidak dapat diyakini bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Dengan demikian, dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.4] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran berupa KPPS membiarkan terjadinya pelanggaran adanya warga yang memakai masker dan melakukan pencoblosan di kotak suara lebih dari satu kali di TPS 4 Desa Tebul Timur. Pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 8 Desa Waru Timur, yang dilakukan oleh pemilih yang memakai kaos Paslon 02. Pencoblosan lebih dari satu kali terjadi

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

di TPS 5 Desa Panaan, yang dilakukan oleh seorang warga yang mencoblos Paslon 02 di kotak suara lebih dari satu kali sambil mengatakan “bukti nyata”. Adanya warga yang mengambil surat undangan pencoblosan dari warga lain untuk melakukan pencoblosan di TPS 7 Desa Blaban.

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-108 sampai dengan Bukti P-111.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi jawaban/bantahan yang pada pokoknya bukti berupa video yang diajukan Pemohon tersebut masih membutuhkan validasi dari keterangan ahli karena dapat dimungkinkan bukti yang diajukan tersebut adalah berupa video rekayasa atau video yang telah diedit oleh Pemohon. Sedangkan saat proses pemungutan suara, pada TPS-TPS yang didalilkan tidak terdapat keberatan atau catatan Formulir Model C. Kejadian Khusus.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti T-6.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya bahwa dalil permohonan Pemohon hanya bersifat asumsi, karena sangat kecil kemungkinan Pemilih mencoblos lebih dari satu kali, karena dalam proses pelaksanaan pemungutan suara diawasi oleh Pengawas TPS, saksi pasangan calon dan pemantau pemilihan dan warga masyarakat di TPS. Jika ada Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, maka dapat dipastikan akan diketahui dengan mudah, karena Pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali akan ketahuan dibuktikan dengan salah satu jari Pemilih sudah terdapat tinta pemilihan, dan tidak mungkin Pemilih akan mendapatkan lebih dari satu surat suara dalam satu jenis pemilihan. Tidak ada hasil pengawasan Pengawas TPS, PKD, Panwas Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang menemukan Pemilih mencoblos lebih dari satu kali sebagaimana yang didalilkan Pemohon serta tidak terdapat rekomendasi dari Panwas Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang merekomendasikan pemungutan suara ulang terhadap TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon. TPS-TPS yang didalilkan Pemohon *a quo,* seluruh saksi pasangan calon menandatangi Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-

Bupati, maka jika kejadian Pemilih mencoblos lebih dari satu kali, saksi pasangan calon tidak akan menandatangani formulir tersebut.

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PT-102.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pamekasan menerangkan bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Nomor: 006/LHP/PM.01.02/JI.19.07.2009.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada pelanggaran di TPS 4 Desa Tebul Timur. Laporan hasil pengawasan Nomor: 007/LHP/PM.01.02/JI-19.10.2009.08/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada dugaan pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 8 Desa Waru Timur. Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.19.06.2006.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada dugaan pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 5 Desa Panaan. Laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/JI.19.11.2010.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada dugaan pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 7 Desa Blaban. Akan tetapi, setelah dilakukan kajian atas nama pelapor Zaini yang diregistrasi dengan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/16.28/XII/2024, Bawaslu Kabupaten Pamekasan menemukan adanya pelanggaran di TPS 4 Desa Tebul Timur.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pemekasan mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK-16.28.08, Bukti PK-16.28.30 sampai dengan Bukti PK-16.28.32.

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali pada TPS 4 Desa Tebul Timur, TPS 8

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Desa Waru Timur, TPS 5 Desa Panaan, dan TPS 7 Desa Blaban. Pemohon mengajukan bukti berupa video yang menunjukkan bahwa terdapat kejadian seseorang mencoblos lebih dari satu surat suara [vide bukti P-108 sampai dengan P-111]. Terhadap hal tersebut, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang pada pokoknya bahwa bukti tersebut masih membutuhkan validasi dari keterangan ahli karena dapat dimungkinkan bukti yang diajukan tersebut adalah berupa video rekayasa atau video yang telah diedit oleh Pemohon. Sedangkan saat proses pemungutan suara, pada TPS-TPS yang didalilkan tidak terdapat keberatan atau catatan Formulir Model C. Kejadian Khusus. Buktinya, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model C.Hasil-KWK pada TPS-TPS dimaksud [vide Bukti T-6]. Adapun Bawaslu Kabupaten Pamekasan menerangkan bahwa Bawaslu hanya dapat meyakini satu peristiwa yaitu pada TPS 4 Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan yang dapat dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK-16.28.08].

Setelah Mahkamah mencermati bukti berupa video yang diajukan oleh Pemohon, bahwa benar terdapat kejadian seseorang mencoblos lebih dari satu surat suara [vide bukti P-108 sampai dengan P-111]. Namun, Mahkamah juga tidak dapat menemukan identifikasi yang jelas mengenai siapa yang melakukan, di TPS mana peristiwa itu terjadi, selain sebagaimana disebutkan dalam dalil permohonan dan keterangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Di samping itu, tidak terdapat bukti-bukti lain yang dapat memperkuat kebenaran peristiwa dimaksud berupa keberatan atau Formulir Model C. Kejadian Khusus pada TPS-TPS yang didalilkan. Terlebih, andaipun benar peristiwa itu terjadi, setelah Mahkamah mencermati jumlah DPT pada keempat TPS dimaksud, secara keseluruhan adalah 2.076 pemilih, dengan rincian TPS 4 Desa Tebul Timur berjumlah 519 pemilih, TPS 8 Desa Waru Timur berjumlah 406 pemilih, TPS 5 Desa Panaan berjumlah 579 pemilih, TPS 7 Desa Blaban berjumlah 572 pemilih, yang dalam batas penalaran yang wajar, andaipun diperintahkan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di keempat TPS dimaksud dan keseluruhan suara pemilih dalam DPT diberikan kepada Pemohon, tidak secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

[3.8.5] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadinya intimidasi dan pengusiran oleh panitia kepada saksi untuk menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK yang terjadi di 33 TPS. Akibat dari adanya intimidasi tersebut, saksi dari pasangan calon nomor urut 3 merasa tertekan, saksi juga tidak diberitahukan adanya orang yang telah meninggal sehingga para saksi menandatangani C.Hasil Salinan-KWK-Bupati.

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-249 sampai dengan Bukti P-281 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Mohammad Saleh Rekso, dan Hairul Hakim.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi jawaban/bantahan yang pada pokoknya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana tindakan intimidasi yang diduga dilakukan oleh KPPS di beberapa TPS yang dipermasalahkan. Apabila 33 orang saksi dari Pemohon merasa terintimidasi, seharusnya saksi-saksi dari Pemohon tersebut menyatakan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti T-8, Bukti T-10, dan Bukti T-28.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya bahwa tidak ada intimidasi dan pengusiran saksi pasangan calon nomor urut 3, hal mana dapat dibuktikan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di 33 (tiga puluh tiga) TPS sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan Pemohon. Maka bagaimana mungkin saksi Pemohon dilakukan pengusiran akan menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PT-23, Bukti PT-29, Bukti PT-61, Bukti PT-62, Bukti PT-67, Bukti PT-68, Bukti PT-72 sampai dengan Bukti PT-75, Bukti PT-84 sampai dengan Bukti PT-87, Bukti PT-96, Bukti PT-106 sampai dengan Bukti PT-109, Bukti PT-111, Bukti PT-140, Bukti PT-143 sampai dengan Bukti PT-170, Bukti PT-173.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pamekasan menerangkan bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan. Bawaslu telah melakukan pengawasan pada ke 33 TPS yang didalilkan dan tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara pada TPS-TPS dimaksud.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pemekasan mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK-16.28.33 sampai dengan Bukti PK-16.28.65.

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya terjadi intimidasi dan pengusiran kepada saksi Pemohon yang dilakukan oleh panitia pemilihan, Pemohon telah menyampaikan alat bukti berupa surat pernyataan dari saksi mandat Pemohon pada TPS-TPS yang didalilkan [vide Bukti P-249 sampai dengan Bukti P-281], serta diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Hairul Hakim dan Mohamad Saleh Rekso yang menerangkan telah terjadi intimidasi kepada saksi mandat di tingkat TPS. Terhadap hal tersebut, Pihak Terkait juga mengajukan surat pernyataan dari saksi mandat Pihak Terkait pada TPS-TPS yang didalilkan yang pada pokoknya menerangkan tidak benar adanya peristiwa intimidasi dimaksud [vide Bukti PT-143 sampai dengan Bukti PT-163]. Adapun Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mandat Pemohon menandatangi Formulir Model C. Hasil KWK Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan dan tidak mengajukan keberatan serta tidak terdapat catatan kejadian khusus pada TPS-TPS yang didalilkan. Bawaslu Kabupaten Pamekasan juga menerangkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pada masing-masing TPS yang didalilkan Pemohon, tidak terdapat peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon serta tidak ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara dan penghitungan suara [vide Bukti PK-16.28.33 sampai dengan Bukti PK-16.28.65].

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran peristiwa adanya intimidasi kepada saksi mandat pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon. Andaipun benar terjadi intimidasi sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan korelasinya terhadap pilihan pemilih. Lagipula, peristiwa tersebut didalilkan terjadi secara acak di beberapa TPS dan hanya bersifat sporadis/kasuistis sehingga tidak dapat diyakini bahwa peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Dengan demikian, dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.6] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah mengesampingkan/menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 3/2024.
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. ....;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

1. …;

2. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 842 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi, S.H.I. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 843 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi, S.H.I. adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 Nomor Urut 3;

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 Nomor Urut 3;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan:

> (2). Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
> a. …

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
d. ...

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan adalah 889.798 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pamekasan;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% x 572.293 suara (total suara sah) = 5.723 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 263.740 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 291.246 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 291.246 - 263.740= 27.506 suara (setara dengan 4,81%) atau lebih dari 5.723 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

[4.7] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu,** tanggal **sembilan belas,** bulan **Februari,** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin,** tanggal **dua puluh empat,** bulan **Februari,** tahun **dua ribu dua puluh lima,** selesai diucapkan pukul **22.12 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

Saldi Isra	**Ridwan Mansyur**
ttd.	**ttd.**
Arsul Sani	**Arief Hidayat**

Anwar Usman	**Enny Nurbaningsih**
ttd.	**ttd.**
Daniel Yusmic P. Foekh	**M. Guntur Hamzah**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Abdul Basid Fuadi

Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) yang diterbitkan oleh BSrE.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pamekasan